

Kabupaten
SUMBA TENGAH DALAM ANGKA
Sumba Tengah Regency in Figures
2018



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUMBA BARAT
BPS-Statistics of Sumba Barat Regency

Kabupaten
SUMBA TENGAH DALAM ANGKA
Sumba Tengah Regency in Figures
2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUMBA BARAT**
BPS-Statistics of Sumba Barat Regency

Kabupaten Sumba Tengah Dalam Angka *Sumba Tengah Regency In Figures* **2018**

ISSN : 2355-4886

Nomor Publikasi / Publication Number : 53016.1003

Katalog BPS / BPS Catalogue : 1102001.5316

Ukuran Buku / Book Size : 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman / Number of Pages : lxxxii + 266 halaman / pages

Naskah / Manuscript :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat

Statistics of Sumba Barat Regency

Gambar Kover oleh / Cover Designed by :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat

Statistics of Sumba Barat Regency

Ilustrasi Kover / Cover Illustration:

Air Terjun Matayangu

Matayangu Waterfall

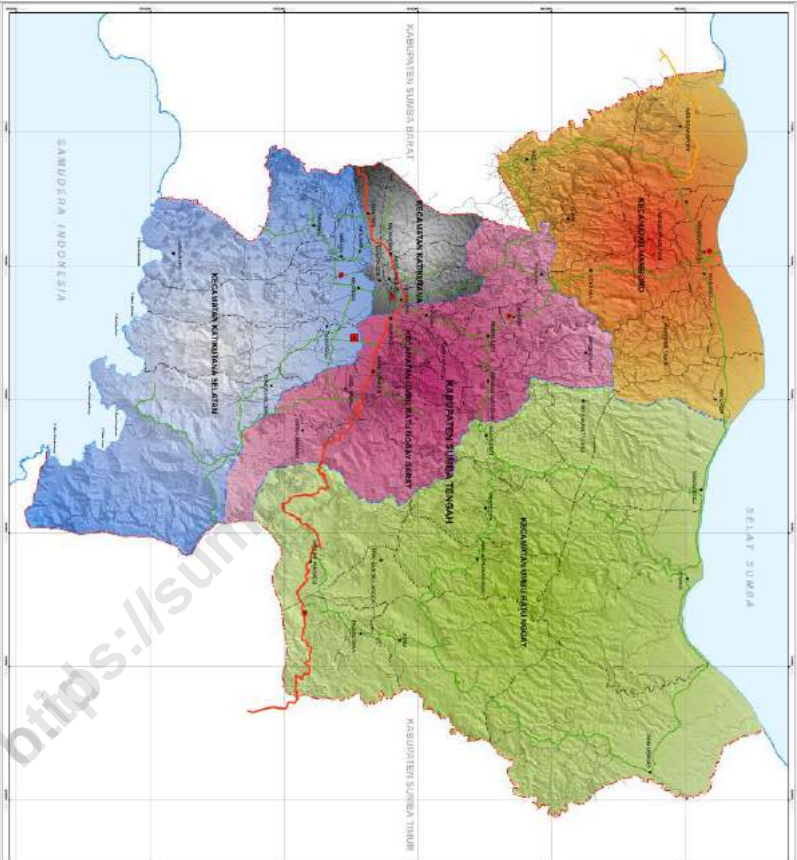
Diterbitkan oleh / Published by :

© BPS Kabupaten Sumba Barat/Statistics of Sumba Barat Regency

Dicetak oleh / Printed by :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without from BPS-Statistics of Sumba Bara Regency.



KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kabupaten Sumba Tengah
Kabupaten Sumba Tengah
Kabupaten Sumba Tengah

JURIL PERJA
KOMUNITAS KAL
KABUPATEN Sumba Tengah
KABUPATEN Sumba Tengah

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Wilayah
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Desa



INSER PERJA
INSER PERJA

NO. PERJA
NO. PERJA

SKALA 1 : 210.000
SKALA 1 : 210.000



NEMAN SAMBA DEWANA
INSTITUT TEKNIK DAN MANAJEMEN SURABAYA
INSTITUT TEKNIK DAN MANAJEMEN SURABAYA
INSTITUT TEKNIK DAN MANAJEMEN SURABAYA

PLH KEPALA BPS KABUPATEN SUMBA BARAT
CHIEF OF STATISTICS OF SUMBA BARAT REGENCY



Matamira B Kale, S.Si, M.Si

KATA PENGANTAR

KABUPATEN SUMBA TENGAH DALAM ANGKA 2018 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Publikasi ini merupakan lanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang memuat berbagai macam data dan informasi tentang keadaan geografi dan iklim di Sumba Tengah, ciri dan keadaan sosial ekonomi penduduk, serta kondisi sosial dan perkonomian Sumba Tengah.

Untuk menjaga kesinambungan data, maka bentuk dan jenis tabel yang disajikan sebagian besar tetap dipertahankan, begitu juga untuk hal data terakhir yang belum tersedia, maka data yang disajikan adalah data keadaan tahun sebelumnya.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kerja sama yang serupa dapat lebih meningkat lagi di masa yang akan datang.

Walaupun publikasi ini telah dipersiapkan sebaik-baiknya, kekurangan dan kesalahan sangat mungkin terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini di masa mendatang, tanggapan dan saran-saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Waikabubak, Agustus 2018

PLH KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Matamira B Kale, S.Si, M.Si

NIP. 19700721 199112 2 001

P R E F A C E

SUMBA TENGAH REGENCY IN FIGURES 2018 is a collection of statistical data issued annually by Statistical Office of Sumba Barat Regency, in cooperation with The Regional Government of Sumba Tengah. This publication, which is a continuation of previous publications, presents various kind of information and statistical data of geographical situation and climate, socio-economic characteristics of the population as well as social and economic conditions of Sumba Tengah.

To maintain time series comparability, most of the tables from previous publication are retained, so in the case that the expected current data were not available, data from its own time series data is presented.

The release of this publication has been made possible, due to the assistance and contributions of various government institutions and private organizations. To all who has involved in the preparation of this publication, I would like to express my high appreciation and gratitude. Hope this cooperation will be continued in the future.

Comments and suggestions to improve the contents of this publication in the future are always welcome.

Waikabubak, August 2018

BPS-STATISTICS OF
SUMBA BARAT REGENCY
Chief,

Matamira B Kale, S.Si, M.Si
NIP. 19700721 199112 2 001

DAFTAR ISI CONTENTS

	Halaman / Page
Peta Kabupaten Sumba Tengah / <i>Map Of Sumba Tengah</i>	iii
Foto Kepala BPS Kabupaten Sumba Barat.....	v
Kata Pengantar / <i>Preface</i>	vii
Daftar Isi / <i>Contents</i>	ix
Daftar Tabel / <i>List of Tables</i>	xi
Daftar Gambar / <i>List of Figures</i>	xxvii
Penjelasan Umum / <i>Explanatory Notes</i>	xix
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.....	xxxi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik.....	xlv
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.....	lxi
1. Geografi dan Iklim/ <i>Geography and Climate</i>	1
2. Pemerintahan/ <i>Government</i>	19
3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan/ <i>Population and Employment</i>	43
4. Sosial/ <i>Social</i>	63
5. Pertanian/ <i>Agriculture</i>	115
6. Industri dan Energi/ <i>Industry and Energy</i>	159
7. Perdagangan/ <i>Trade</i>	175
8. Hotel dan Pariwisata/ <i>Hotel and Tourism</i>	185
9. Transportasi dan Komunikasi/ <i>Transportation and Communication</i>	195

Halaman / Page

10. Keuangan Daerah dan Harga/ <i>Regional Financial and Prices</i>	211
11. Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan/ <i>Expenditure and Food Consumption</i>	231
12. Pendapatan Regional/ <i>Regional Income</i>	239
13. Perbandingan Regional/ <i>Regional Comparison</i>	259

DAFTAR TABEL LIST OF TABLES

	Halaman / Page
Bab / Chapter I Keadaan Geografi dan Iklim / Geographycal Situation and Climate	1
1.1 Geografi / Geography	5
1.1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>The Area by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	9
1.1.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Height Above Mean Sea Level (AMSL) by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	10
1.1.3 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Sumba Tengah (km) / <i>Distance between Subdistrict Capital and Regency Capital in Sumba Tengah Regenc (km) 2017</i>	11
1.2 Iklim / Climate	13
1.2.1 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Sumba Tengah/ <i>Average Temperature and Humidity by Month in Sumba Tengah Regency 2017</i>	15
1.2.2 Temperatur Minimum dan Maksimum di Kota Waikabubak menurut Bulan/ <i>Minimum and Maximum Temperature in Waikabubak by Month 2017</i>	16
1.2.3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Amount of Precipitation and Number of Rainy Days by Month in Sumba Tengah Regency 2017</i>	17

Bab /		
Chapter II	Pemerintahan / Government	19
	2.1 Wilayah Administrasi	23
	2.1.1 Nama-nama Ibukota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kecamatan / <i>Name of Capital Districts and Number of Villages/Urban Villages by District 2017</i>	25
	2.1.2 Banyaknya Desa menurut Tingkat Perkembangan Desa dan Kecamatan / <i>Number of Villages by Developing Level and District 2017</i>	26
	2.2 DPRD	29
	2.2.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah/ <i>Number of Members of The Regional House of Representatives by Political Parties and Sex in Sumba Tengah Regency 2017</i> ...	31
	2.2.2 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD menurut Jenisnya / <i>Number of Law Product Made by Regional Parliament 2014-2017</i> .	32
	2.3 PNS	35
	2.3.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Civil Servants by Institution/Office and Sex in Sumba Tengah Regency 2017</i>	37
	2.3.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Civil Servants by Educational Attainment and Sex in Sumba Tengah Regency 2017</i>	40
	2.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Civil Servants by Hierarchy and Sex in Sumba Tengah Regency 2017</i> .	41

Bab /		
Chapter III	Penduduk dan Tenaga Kerja / <i>Population and Man Power</i>.....	43
	3.1. Penduduk / <i>Population</i>.....	49
3.1.1.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah, 2010, 2014, dan 2015/ <i>Population and Population Growth Rate by Subdistrict in Sumba Tengah Regency, 2010, 2016, and 2017</i>	53
3.1.2.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Population and Sex Ratio by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	54
3.1.3.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah/ <i>Population Distribution and Density by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	55
3.1.4.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Population by Age Group and Sex in Sumba Tengah Regency 2017</i>	56
	3.2. Angkatan Kerja / <i>Labour Force</i>.....	57
3.2.1.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah/ <i>Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity During The Previous Week and Sex in Sumba Tengah Regency 2017</i>	59
3.2.2.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Population Aged 15 Years and Over by Educational Attainment and Type of Activity During The Previous Week in Sumba Tengah Regency 2017</i>	60

3.2.3.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Population Aged 15 Years and Over Who Worked During the Previous Week by Age Group and Sex in Sumba Tengah Regency 2017</i>	61
3.2.4.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Population Aged 15 Years and Over Who Worked During the Previous Week by Main Industry and Sex in Sumba Tengah Regency 2017</i>	62
Bab /		
Chapter IV	S o s i a l /Social Affairs	63
4.1.	Pendidikan / Education	69
4.1.1.	Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Percentage of Population Aged 7-24 Years by Sex, Age Group, and School Participation in Sumba Tengah Regency 2017</i>	71
4.1.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Net Enrolment Rate and Gross Enrolment Rate by Educational Level in Sumba Tengah Regency 2017</i>	72
4.1.3.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Primary Schools by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	73
4.1.4.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Madrasah Ibtidaiyah (MI) by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	74

4.1.5. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Junior High Schools by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	75
4.1.6. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Madrasah Tsanawiyah (MTs) by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	76
4.1.7. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Senior High Schools by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	77
4.1.8. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Senior High Schools by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	78
4.1.9. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Public Vocational High Schools by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	79
4.2. Kesehatan / Health	81
4.2.1. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Health Facilities by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	83
4.2.2. Banyaknya Rumah Sakit dan Pelayanan Rumah Sakit menurut Kecamatan / <i>Number of Hospitals and Hospital Services by District 2017</i>	84
4.2.3. Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Specialist Doctor, Generalist Doctor, and Dentist by Type of Health Facility in Sumba Tengah Regency 2017</i>	85

4.2.4. Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Sumba Tengah 2012-2015 / <i>Percentage of Children Under Five Years Who Had Immunization by Type of Immunization in Sumba Tengah Regency 2012-2017</i>	86
---	----

Halaman / Page

4.2.5. Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Cases of the 10 Most Diseases in Sumba Tengah Regency 2017</i>	87
4.2.6. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Births, Babies with Low Birth Weights (LBW), Treated LBW, and Malnutrition Cases in Sumba Tengah Regency 2017</i>	88
4.2.7. Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Pregnant Women, Those with One Visit and four Visits of Antenatal Care, Chronic Energy Deficiency (CED), and Receiving Iron Supplement in Sumba Tengah Regency 2016-2017</i>	89
4.2.8. Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro), HIV/AIDS, dan Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Young People Aged 15 - 24 Who Had Counselling on Reproductive Health, HIV/AIDS, and Family Planning by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	90
4.2.9. Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Cases of HIV/AIDS, Sexually Transmitted Infection, Dengue Fever, Diarrhea, Tuberculosis (TB) and Malaria by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	91
4.2.10. Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Family Planning Clinics and Village Family Planning Service Units by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	92

4.2.11. Banyaknya Akseptor Aktif menurut Metode Kontrasepsi yg Digunakan dan Kecamatan / <i>Number of Active Acceptor by Contraceptive Method Used and District 2017</i>	93
4.3. Agama dan Sosial Lainnya / <i>Religion and Other Sossial Affairs</i>	95
4.3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Population by Subdistrict and Religion in Sumba Tengah Regency 2017</i>	97
4.3.2. Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number Of Worship Facilities By Subdistrict In Sumba Tengah Regency 2017</i>	98
4.3.3. Banyaknya Bencana Alam yang Terjadi Menurut Jenis Bencana dan Kecamatan/ <i>Number of Natural Disaster by Type of Disaster and Subdistrict 2017</i>	99
4.3.4. Banyaknya Korban Bencana Alam menurut Kecamatan dan Jenis Korban/ <i>Number of Natural Disaster Victims by District and Kind of Victims 2017</i>	100
4.3.5. Banyaknya Korban Bencana Alam menurut Kecamatan dan Jenis Kerusakan Rumah/ <i>Number of Natural Disaster Victims by District and Kind of House Damaged 2017</i>	101
4.4. Kriminalitas / <i>Crime</i>	103
4.4.1. Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Reported Criminal Cases by Subdistrict Police Office in Sumba Tengah Regency2013-2017</i>	
4.4.2. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Percentage of Crime Clearance Rate by District Pollice Office in Sumba Tengah Regency 2014-2017</i>	105 106
4.4.3. Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas Dirinci Menurut Bulan / <i>Number of Traffic Accident by Month 2017</i>	107

4.5. Kemiskinan dan Pembangunan Manusia / Poverty and Human Development.....	109
4.5.1. Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Households by Subdistrict and Household Classification in Sumba Tengah Regency 2014-2017</i>	111
4.5.2. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Poverty Line and Number of Poor People in Sumba Tengah Regency 2010-2017</i>	112
4.5.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumba Tengah/ <i>Human Development Index Component of Sumba Tengah Regency 2016-2017</i>	113
 Bab /	
Chapter V Pertanian /Agriculture.....	115
 5.1 Tanaman Pangan / Food Crops.....	121
5.1.1. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Sumba Tengah (hektar) / <i>Area of Wetland by Subdistrict and Type of Irrigation in Sumba Tengah Regency 2017</i>	123
5.1.2. Luas Lahan Tegall/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah (hektar) / <i>Area of Dry Field/Garden, Shifting Cultivation, Land and Temporarily Unused Land by Subdistrict in Sumba Tengah Regency (hectar) 2017</i>	124
5.1.3. Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Harvested Area of Wetland and Dryland Paddy by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	125
5.1.4. Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Harvested Area of Maize, Soybean, Peanut, Mungbean, Cassava, and Sweet Potato by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	126

5.1.5.	Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Production of Wetland and Dryland Paddy by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	127
5.1.6.	Produksi Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Production of Maize, Soybean, Peanut, Mungbean, Cassava, and Sweet Potato by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	128
5.1.7.	Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Productivity of Wetland and Dryland Paddy by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	129
5.1.8.	Produktivitas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Productivity of Maize, Soybean, Peanut, Mungbean, Cassava, and Sweet Potato by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	130
5.2.	Hortikultura / Horticulture	131
5.2.1	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Sumba Tengah (hektar) / <i>Harvested Area of Vegetables by Subdistrict and Kind of Plant in Sumba Tengah Regency (hectare) 2017</i>	133
5.2.2.	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Production of Vegetables by Subdistrict and Kind of Plant in Sumba Tengah Regency 2016</i>	134
5.2.3.	Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Production of Fruits by Subdistrict and Kind of Fruit in Sumba Tengah Regency 2017</i>	135
5.3.	Perkebunan / Estate Crops	137
5.3.1.	Luas Tanaman Perkebunan Menurut Tanaman Dan Jenis Tanaman Di Kabupaten Sumba Tengah (Hektar) / <i>Planted Area Of Estate Crops By Subdistrict And Kind Of Crop In Sumba</i>	

	<i>Tengah Regency (Hectare) 2017</i>	139
5.3.2.	Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumba Tengah (ton) / <i>Production of Estate Crops by Subdistrict and Kind of Crop in Sumba Tengah Regency (ton) 2017</i>	140
5.4.	Peternakan / Livestock	141
5.4.1.	Populasi Ternak Besar menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Large Livestock Population by Kind and District in Sumba Tengah Regency 2017</i>	143
5.4.2.	Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Poultry Population by Subdistrict and Kind of Poultry in Sumba Tengah Regency 2017</i>	144
5.4.3.	Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Poultry Livestock Population by Kind and District 2017</i>	145
5.5.	Perikanan / Fishery	147
5.5.1.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Fish Capture Households by Subdistrict and Subsector in Sumba Tengah Regency 2016 - 2017</i>	149
5.5.2.	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sumba Tengah (ton) / <i>Production of Fish Capture by Subdistrict and Subsector in Sumba Tengah Regency (ton) 2016-2017</i>	150
5.5.3.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Aquaculture Households by Subdistrict and Type of Aquaculture in Sumba Tengah Regency 2017</i>	151
5.5.4.	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sumba Tengah (ton) / <i>Production Fish Capture by Subdistrict and Subsector in Sumba Tengah Regency (ton) 2017</i>	152
5.5.5.	Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Fishing Boats by Subdistrict and Type of Boat in Sumba Tengah Regency 2017</i>	153

5.6. Kehutanan / Forestry.....	155
5.6.1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah (hektar) <i>Forest and Inland Water Area by Subdistrict in Sumba Tengah Regency (hectare) 2016.....</i>	157
5.6.2. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Sumba Tengah (m3) / <i>Timber Production by Type of Product in Sumba Tengah Regency (m3) 2016.....</i>	158
Bab /	
Chapter VI Industri dan Energi/ <i>Industry and Energy</i>.....	159
6.1. Perindustrian / <i>Industries</i>.....	165
6.1.1. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Establishment, Employees, and Production Value by Industrial Classification in Sumba Tengah Regency 2017.....</i>	167
6.1.2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sumba Tengah <i>Construction Costliness Index of Sumba Tengah Regency 2017</i>	168
6.2. Energi / <i>Energy</i>.....	169
6.2.1. <i>Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Sumba Tengah/ Installed Capacity, Production, and Distribution of Electricity of State Electricity Company at Branch Level in Sumba Tengah Regency 2014-2017.....</i>	171
6.2.2. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Registered Electricity Costumers by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017.....</i>	172
6.2.3. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Customer and Distributed Clean Water by Type of Customers in Sumba Tengah Regency 2017.....</i>	173

Bab /		
Chapter VII	Perdagangan / Trade	175
7.1.	Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Establishments by Type of Business Entity in Sumba Tengah Regency 2012-2017.....</i>	181
7.2.	Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Merchants by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017.....</i>	182
7.3.	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Trading Facilities by Type of Facility in Sumba Tengah Regency 2015 - 2017.....</i>	183
7.4.	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Cooperatives by Type of Cooperative and Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017.....</i>	184
Bab /		
Chapter VIII	Hotel dan Pariwisata / <i>Hotel and Tourism</i>.....	185
8.1.	Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Klasifikasi di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Hotel and Other Accomodations by Classification in Sumba Tengah Regency 2011-2017.....</i>	191
8.2.	Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Sumba Tengah (hari) / <i>Average Length of Stay of Foreign and Domestic Visitors by Month in Sumba Tengah Regency (day) 2017.....</i>	192
8.3.	Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis Hotel dan Bulan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Room Occupancy Rate of Hotels and Other Accommodations by Type of Accomodation and Month in Sumba Tengah Regency 2017.....</i>	193
8.4.	Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Restaurant by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2016-2017.....</i>	194

Bab /		
Chapter IX	Transportasi dan Komunikasi / <i>Treansportation and Communication</i>	195
	9.1. Transportasi / <i>Transportation</i>	201
9.1.1.	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan Yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Length of Roads by Subdistrict and Level of Government Authority in Sumba Tengah Regency (km) 2017</i>	203
9.1.2.	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sumba Tengah (km) / <i>Length of Roads by Subdistrict and Type of Road Surface in Sumba Tengah Regency (km) 2017</i>	204
9.1.3.	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Sumba Tengah (km) / <i>Length of Roads by Subdistrict and Road Condition in Sumba Tengah Regency (km) 2017</i>	205
9.1.4.	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Motor Vehicles by Subdistrict and Type of Vehicle in Sumba Tengah Regency 2017</i>	206
	9.2. Pos dan Komunikasi / <i>Pos and Communication 2015</i>	207
9.2.1.	Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Number of Auxiliary Post Office by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017</i>	209
9.2.2.	Jumlah Satuan Sambungan Telepon menurut Kelompok Pelanggan dan Kecamatan / <i>Number of Telephone Customers by Group and District 2017</i>	210
Bab /		
Chapter X	Keuangan Daerah dan Harga / <i>Regional Financial and Prices</i>	211
10.1.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah)/ <i>Actual Revenues of Government of Sumba Tengah Regency by Source of Revenues (thousand rupiahs) 2015 - 2017</i>	217

10.2.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah) / <i>Actual Expenditures of Government of Sumba Tengah Regency by Kind of Expenditures (thousand rupiahs)2015-2017</i>	219
10.3.	Perkembangan Penabung dan Tabungan pada Bank-Bank di Waibakul / <i>Trend of Accounts and Saving Deposits in Waibakul 2003 – 2017</i>	221
10.4.	Perkembangan Kredit Perbankan menurut Jenis Penggunaan pada Bank-Bank di Waibakul / <i>Trend of Bank Credits by Type of Utilization 2003 – 2017</i>	222
10.5.	Perkembangan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) pada Bank-Bank di Waibakul 2003 – 2017.....	223
10.6.	Perkembangan Giro Perbankan pada Bank-Bank di Waibakul / <i>Trend of Bank Transfers 2003 – 2017</i>	224
10.7.	Posisi Pinjaman Perbankan Dirinci menurut Sektor / <i>Outstanding of Bank Loan by Sector 2014 – 2017</i>	225
10.8.	Indeks Harga Konsumen Kota Waikabubak / <i>Consumer Price Index of Kota Waikabubak 2015</i>	226
10.9.	Laju Inflasi Kota Waikabubak menurut Kelompok / <i>Inflation Rate of Kota Waikabubak by Group 2014 – 2015</i>	227
10.10.	Rata-rata Harga Eceran Sembilan Bahan Pokok dan Bahan Strategis Lainnya di Pasar Inpres Waikabubak / <i>Average Retail Price of Nine Essential Commodities and Other Strategies Commodities at Pasar Inpres Waikabubak 2014– 2015</i>	228
10.11.	Rata-rata Perkembangan Harga Eceran Sembilan Bahan Pokok dan Bahan Strategis Lainnya di Pasar Inpres Waikabubak / <i>Average Trend of Retail Price of Nine Essential Commodities and Other Strategies Commodities at Pasar Inpres Waikabubak 2014– 2015</i>	229

Bab /

Chapter XI	Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan / <i>Expenditure and Food Consumption</i>	231
-------------------	--	------------

11.1.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Percentage of Population by Expenditure Per Capita Per Month Class in Sumba Tengah Regency 2017</i>	235
-------	--	-----

11.2.	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Average Expenditure and Percentage of Average Expenditure Per Capita Per Month by Food Group in Sumba Tengah Regency 2017</i>	236
11.3.	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Sumba Tengah / <i>Average Expenditure and Percentage of Average Expenditure Per Capita Per Month by Non-Food Group in Sumba Tengah Regency 2017</i>	237

Bab /

Chapter XII Pendapatan Regional / Regional Income..... 239

12.1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah Atas Dasar Harga Berlakumenurut Lapangan Usaha / <i>Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency at Current Market Prices by Industrial Origin 2015 - 2017</i>	243
12.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha / <i>Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency at Constant 2010 Market Prices by Industrial Origin 2015 - 2017</i>	245
12.3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha / <i>Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency at Current Market Prices by Industrial Origin 2015 - 2017</i>	247
12.4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha / <i>Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency at Constant 2010 Market Prices by Industrial Origin 2015 - 2017</i>	249
12.5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha / <i>Chain Index of Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency at Current Market Prices by Industrial Origin 2015 - 2017</i>	251

12.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha / <i>Chain Index of Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency at Constant 2010 Market Prices by Industrial Origin 2015 – 2017</i>	253
12.7	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah menurut Lapangan Usaha (2010=100) / <i>Implicit Price Index of Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency by Industrial Origin (2010=100) 2015 – 2017</i>	255
12.8	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah Menurut Lapangan Usaha (persen) / <i>Growth Rate of Implicit Price Indices Of Gross Regional Domestic of Sumba Tengah Regency by Industry (percent) 2015 – 2017</i>	258

Bab /

Chapter XIII Perbandingan Regional / Regional Comparison 259

13.1.	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (ribu) / <i>Population by Regency/City in NTT Province (thousand) 2013-2017</i>	263
13.2.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT / <i>Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Regency/City in NTT Province 2013-2017</i>	264
13.3.	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (ribu) / <i>Number of Poor People by Regency/City in NTT Province 2013-2017</i>	265
13.4.	Komponen dan Peringkat IPM menurut Kabupaten/Kota di NTT/ <i>Component and Grade HDI by Regency/Municipality in NTT 2017</i>	266

DAFTAR GAMBAR LIST OF FIGURES

Halaman / Page

Peta Kabupaten Sumba Tengah / Map of Sumba Tengah Regency.....	iii
1.1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Sumba Tengah menurut Kecamatan / Percentage of Total Area of Sumba Tengah Regency by District 2017.....	7
2.1. Komposisi Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah Hasil Pemilihan Umum / Distribution of Regional Parliament Members of Sumba Tengah Election 2017.....	29
2.2. Persentase PNS di Sumba Tengah menurut Tingkat Pendidikan / Percentage of Civil Servant in Sumba Tengah by Education Level 2017.....	35
3.1. Piramida Penduduk Sumba Tengah / Population Pyramid of Sumba Tengah 2017.....	51
3.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin / Percentage of Population Aged 15 Years and Over Who Worked During the Previous Week By Main Industry Status 2017.....	57
5.1. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan / Food Crops Production 2014-2015 (Ton).....	119
6.1. Banyaknya Tenaga Listrik yang Dibangkitkan oleh PLN dan Penggunaannya / Electrical Power Produced and Its Utilization 2017.....	163
7.1. Jumlah Perusahaan Sektor Perdagangan menurut Jenisnya / Number of Establishment Trade Scale 2017.....	179
8.1. Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah/ Number of Restaurant by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017.....	189

Halaman / Page

9.1. Panjang Jalan di Sumba Tengah Menurut Kondisi Jalan / <i>Length of Road in Each District by Road Condition</i> 2017	199
10.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Tengah / <i>Actual Regional Revenues of Sumba Tengah Regency</i> 2016-2017 (Milyar Rp)	215

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda, satuan-satuan dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut :

1. Tanda-tanda :

Data belum tersedia.....	: ...
Data tidak tersedia.....	: -
Data dapat diabaikan.....	: 0
Tanda desimal.....	: ,
Angka sementara.....	: x
Angka sangat sementara.....	: xx
Angka sangat sangat sementara.....	: xxx
Angka diperbaiki.....	: r
Angka perkiraan.....	: e
Data tidak dapat ditampilkan.....	: NA

2. Satuan :

Barrel.....	: 158,99 liter = $1/6,2898 \text{ m}^3$
Batang (sabun cuci).....	: 400 gram
Botol.....	: 700 cc
Km (Kilometer).....	: 1000 meter (m)
Lusin.....	: 12 buah
Once (oz).....	: 28,31 gram
Ton.....	: 1000 kg
Sak (untuk semen).....	: 40 kg atau 50 kg
Kwintal (kw).....	: 100 kg
Liter.....	: 1000 cc
Liter (untuk beras).....	: 0,80 kg
MSCF.....	: $1/35,3 \text{ m}^3$
Metrik ton (m.ton).....	: 0,98421 long ton = 1.000 kg

Satuan lain : buah, bungkus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%)

EXPLANATORY NOTES

Symbols, units and other acronyms which are used in this publication, are as follows:

1. Symbols :

Data not yet available.....	: ...
Data not available.....	: -
Data negligible.....	: 0
Decimal point.....	: ,
Preliminary figures.....	: x
Very preliminary figures.....	: xx
Very very preliminary figures.....	: xxx
Revised figures.....	: r
Estimated figures.....	: e
Not Applicable.....	: NA

2. Units :

Barrel.....	: 158,99 litres = $1/6,2898 \text{ m}^3$
Brigette (for soap).....	: 400 grams
Bottle.....	: 700 cc
Km (Kilometer).....	: 1000 meters (m)
Dozen.....	: 12 units
Once (oz).....	: 28,31 grams
Ton.....	: 1000 kg
Sack (for cement).....	: 40 kg or 50 kg
Quintal (q).....	: 100 kg
Litre.....	: 1000 cc
Litre (for rice).....	: 0,80 kg
MSCF.....	: $1/35,3 \text{ m}^3$
Metric ton (m.ton).....	: 0,98421 long ton = 1.000 kg

Other units : unit, pack, number, pieces, tin, brigette, pulsa, ton-kilometers (ton-km), hour, minute, percents (%)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG**

STATISTIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a) Bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien;
- c) Bahwa Undang-undang nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional;
- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Statistik yang baru.
- Mengingat** : Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
5. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan.
6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
7. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

8. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Kompilasi produk administrasi adalah cara penyimpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
11. Badan adalah Badan Pusat Statistik.
12. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lain.
13. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.
14. Sinopsis adalah suatu iktisar penyelenggaraan statistik.
15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik atau melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.
17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, dan atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik.

BAB II ASAS, ARAH, DAN TUJUAN

Pasal 2

Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional, Undang-undang ini juga berasaskan :

- a) keterpaduan;
- b) keakuratan; dan
- c) kemuktahiran.

Pasal 3

Kegiatan statistik diarahkan untuk :

- a) Mendukung pembangunan nasional;
- b) Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan
- d) Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

BAB III JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bagian Pertama

Jenis Statistik

Pasal 5

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas:

- a) statistik dasar;
- b) statistik sektoral; dan
- c) statistik khusus.

Pasal 6

- 1) Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang - undang.

Bagian Kedua

Cara pengumpulan Data

Pasal 7

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

- a) sensus;
- b) survei;
- c) kompilasi produk administrasi; dan
- d) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- 1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh badan, yang meliputi :
 - a. sensus penduduk;
 - b. sensus Pertanian; dan
 - c. sensus ekonomi.
- 2) Penetapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 9

- 1) Survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b diselenggarakan sesera berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data yang rinci.
- 2) Survei antar sensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk menjembatani 2 (dua) sensus tersebut.

Pasal 10

- 1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi .
- 2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

BAB IV PENYELENGGARAN STATISTIK

Bagian Pertama

Statistik Dasar

Pasal 11

- 1) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan memperoleh data dengan cara :
 - a. sensus;
 - b. survei;
 - c. kompilasi produk administrasi; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Statistik Sektoral

Pasal 12

- 1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan.
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara :
 - a. survei;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional.

- 4) Hasil statistik sektoral diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan.

Bagian Ketiga **Statistik Khusus**

Pasal 13

- 1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan.
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masyarakat memperoleh data dengan cara:
 - a. survei;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

Pasal 14

- 1) Dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) wajib memberitahukan sinopsis kegiatan statistik yang telah selesai diselenggarakannya kepada Badan.
- 2) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. judul;
 - b. wilayah kegiatan statistik;
 - c. objek populasi;
 - d. jumlah responden;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. metode statistik;
 - g. nama dan alamat penyelenggara; dan
 - h. abstrak.
- 3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi data, atau cara penyampaian lain yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.
- 4) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern .

BAB V PENGUMUMAN DAN PEYEBARLUASAN

Pasal 15

- 1) Badan berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya.
- 2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam Berita Resmi Statistik.

Pasal 16

Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 17

- 1) Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.
- 2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sisten Statistik Nasional, Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, defenisi, klasifikasi, dan ukuran - ukuran. Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
- 3) Ketentuan mengenai tatacara dan lingkup koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 18

- 1) Kerja sama penyelenggaran statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Kerjasama penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah, atau masyarakat Indonesia.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBANNYA

Bagian Pertama

Penyelenggara Kegiatan Statistik

Pasal 19

Penyelenggara kegiatan statistik berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek.

Pasal 20

Penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Bagian Kedua

Petugas Statistik

Pasal 22

Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang telah ditentukan.

Pasal 23

Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan statistik sebagaimana adanya.

Pasal 24

Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik.

Pasal 25

Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan nilai nilai agama, adat istiadat setempat, tatakrama dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga

Responden

Pasal 26

- 1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.
- 2) Setiap responden berhak menolak petugas statistik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

Pasal 27

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 28

- 1) Pemerintah membentuk Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 2) Badan mempunyai perwakilan wilayah di Daerah yang merupakan instansi vertikal.
- 3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29

- 1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan.
- 2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat non struktural dan independen yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 30

- 1) Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi dilingkungannya untuk melaksanakan statistik sektoral.
- 2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengadakan koordinasi dengan badan untuk menerapkan penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 31

Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat, agar lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan mendukung pembangunan nasional.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Badan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b. Mengembangkan statistik sebagai ilmu;

- c. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d. Mewujudkan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerja sama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e. Mengembangkan Sistem Informasi Statistik;
- f. Meningkatkan penyebaran informasi statistik;
- g. Meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; dan
- h. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Pasal 33

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

- 1) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lambat 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 37

Petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 38

Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36 ayat (2), pasal 37, pasal 38, dan pasal 39 adalah kejahatan.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus Dan Undang - undang Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang - Undang ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 39

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

MOERDIONO



**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2007**

TENTANG

BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa statistik mempunyai peranan yang penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan ragam informasi yang berkembang seiring dengan kemajuan kehidupan bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya permintaan data oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, lembaga swasta, dan masyarakat menjadikan statistik sebagai informasi yang sangat diperlukan;
 - c. bahwa Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas;
 - d. bahwa kebijakan nasional di bidang statistik dasar perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan peran serta pengguna statistik sehingga hasil statistik dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat;

- e. bahwa sehubungan dengan dasar menimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik, dipandang perlu mengatur kembali Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BPS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b. pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. penetapan sistem statistik sosial;
- e. pembinaan dan fasilitas terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

BPS terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris Utama;
- c. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
- d. Deputi Bidang Statistik Sosial;
- e. Deputi Bidang Statistik Produksi;
- f. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
- g. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
- h. Inspektorat Utama;
- i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Instansi Vertikal.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS.

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

Pasal 6

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS;
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPS;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS;
- d. pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPS;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPS; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPS.

Bagian Keempat Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Pasal 9

- (1) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang metodologi dan informasi statistik.
- (2) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
- c. pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survey, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Statistik Sosial

Pasal 12

- (1) Deputi Bidang Statistik Sosial adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik sosial.
- (2) Deputi Bidang Statistik Sosial dipimpin oleh Deputi.

Pasal 13

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Deputi Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
- c. pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Statistik Produksi

Pasal 15

- (1) Deputi Bidang Statistik Produksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik produksi.
- (2) Deputi Bidang Statistik Produksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Deputi Bidang Statistik Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
- c. pelaksanaan pengembangan statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Pasal 18

- (1) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik distribusi dan jasa.

(2) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 19

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa;
- c. pelaksanaan pengembangan statistik pertanian perdagangan, harga, keuangan, dan jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedelapan **Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik**

Pasal 21

- (1) Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang neraca dan analisis statistik.
- (2) Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dipimpin oleh Deputi.

Pasal 22

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik;
- c. pelaksanaan pengembangan neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kesembilan Inspektorat Utama

Pasal 24

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 25

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

- e. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kesepuluh Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

- (1) Di lingkungan BPS dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai unsure penunjang tugas dan fungsi BPS.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Bagian Kesebelas Instansi Vertikal

Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah, dibentuk instansi vertikal BPS, yang terdiri dari :
 - a. BPS Provinsi;
 - b. BPS Kabupaten/Kota.
- (2) BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
- (3) BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
- (4) Organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPS setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Keduabelas Lain-lain

Pasal 29

Di lingkungan BPS dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (2) Deputi terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (3) Inspektorat Utama terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Administrasi, Inspektorat membawahkan kelompok jabatan fungsional Auditor dan Bagian Administrasi terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan paling banyak 2 (dua) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbagian dan masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbidang.
- (5) BPS Provinsi terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan paling banyak 5 (lima) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari paling banyak 5 (lima) Subbagian dan masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi, BPS Provinsi membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- (6) BPS Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan paling banyak 5 (lima) Seksi, BPS Kabupaten/Kota membawahkan kelompok jabatan fungsional.

BAB III TATA KERJA

Pasal 31

Semua unsur di lingkungan BPS dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPS sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36

- (1) Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon I.a
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala BPS Provinsi adalah jabatan eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala BPS Kabupaten/Kota adalah jabatan eselon III.a
- (4) Kepala SUBbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 37

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPS.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPS, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 yang mengatur mengenai BPS, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPS, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsi BPS sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (3) Sampai dengan terbentuknya organisasi BPS secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan BPS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tugas dan fungsi BPS.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BPS ditetapkan oleh Kepala BPS setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka :

- a. Ketentuan mengenai BPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- b. Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I BPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Sekretaris Kabinet

ttd

Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
Kepala Biro Kepegawaian
dan Hukum, BPS

ttd

Karsidik, SE., MM
NIP. 340 003 628



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1999**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN STATISTIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya memenuhi asas kepaduan, keakuratan, dan kemutakhiran data dalam kegiatan statistik perlu diatur mekanisme penyelenggaraan statistik baik statistik dasar, sektoral, maupun khusus menuju terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dalam pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, serta dalam rangka penjabaran lebih lanjut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Sensus penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik penduduk pada saat tertentu.
- (2) Sensus pertanian adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh petani, rumah tangga pertanian, dan perusahaan pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik pertanian pada saat tertentu.
- (3) Sensus ekonomi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh usaha dan atau perusahaan non pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik usaha dan atau perusahaan pada saat tertentu.
- (4) Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu obyek pada saat tertentu.
- (5) Survei antar sensus adalah survei yang dilakukan di antara 2 (dua) sensus sejenis.
- (6) BPS adalah singkatan dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- (7) Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, dan lembaga-lembaga lainnya di luar BPS.

BAB II STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS

Bagian Pertama Statistik Dasar

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Berkewajiban menyediakan Statistik Dasar.

- (2) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- (3) Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

- (1) Sensus terdiri dari :
 - a. Sensus Penduduk;
 - b. Sensus Pertanian;
 - c. Sensus Ekonomi.
- (2) Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada :
 - a. tahun berakhiran angka 0 (nol) bagi sensus penduduk;
 - b. tahun berakhiran angka 3 (tiga) bagi sensus pertanian;
 - c. tahun berakhiran angka 6 (enam) bagi sensus ekonomi.

Pasal 4

- (1) Pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk.
- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya, dan karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang kependudukan.

Pasal 5

- (1) Pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian.
- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup karakteristik petani, tanah, tanaman, kegiatan usaha di bidang pertanian, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang pertanian.

Pasal 6

- (1) Pencacahan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi.

- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, pemakai bahan baku, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang ekonomi.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan sensus, Kepala BPS menetapkan wilayah pencacahan.
- (2) Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan.

Pasal 8

- (1) BPS wajib mengumumkan rencana penyelenggaraan sensus kepada masyarakat sebelum sensus dilaksanakan.
- (2) Setiap penyelenggaraan sensus didahului dengan uji coba sensus.

Pasal 9

- (1) Selain sensus, BPS juga menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik dasar.
- (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Survei juga dilakukan di antara 2 (dua) sensus sejenis.
- (4) Survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah survei antar sensus.

Pasal 10

- (1) Wilayah pencacahan survei statistik dasar ditetapkan oleh Kepala BPS.
- (2) Pelaksanaan survei statistik dasar di lapangan dilakukan oleh petugas survei yang ditetapkan oleh BPS.

Pasal 11

Kompilasi produk administrasi statistik dasar dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.

Pasal 12

- (1) BPS berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik dasar, BPS mendapatkan dukungan pelaksanaan operasional dari Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sesuai lingkup tugas dan wewenangnya.
- (2) Dukungan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data, serta sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi yang dilakukan BPS.

Paragraf 2 Petugas dan Responden

Pasal 14

- (1) Pencacahan di lapangan dalam pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas sensus yang diangkat secara sah oleh kepala BPS.
- (2) Petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Petugas sensus dapat berasal dari pegawai BPS dan atau direkrut dari pegawai instansi pemerintah lainnya atau anggota masyarakat.
- (4) Setiap petugas sensus wajib mengikuti pelatihan tata cara pelaksanaan sensus.
- (5) Ketentuan tentang pengangkatan, pemberhentian dan pelatihan petugas sensus diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditetapkan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus wajib :

- a. memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal petugas sensus;
- b. memperhatikan nilai-nilai agama, adapt istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan sensus sebagaimana adanya.

Pasal 17

Setiap petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden dan yang diperoleh dari obyek kegiatan sensus.

Pasal 18

- (1) Petugas sensus yang merupakan tenaga lepas dan bukan pegawai negeri yang mendapat kecelakaan dan mengakibatkan cacat atau meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, mendapat jaminan asuransi.
- (2) Biaya pembayaran premi untuk jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran penyelenggaraan sensus.
- (3) Besarnya jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh kepala BPS setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 19

- (1) Setiap responden sensus wajib :
 - a. menerima petugas sensus;
 - b. memberi izin petugas sensus memasuki halaman atau pelataran, tanah atau tempat usaha, serta masuk ke dalam bangunan yang berada di wilayah kerja petugas sensus;
 - c. memberi izin petugas sensus memasang, memeriksa, atau memperbaharui tanda nomor bangunan atau stiker sensus baik bangunan tempat tinggal maupun bangunan bukan tempat tinggal;

- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan petugas sensus mengenai diri sendiri, anggota keluarga, orang lain yang berkaitan, dan atau kegiatannya secara lengkap dan benar;
 - e. memperlihatkan catatan tertulis, buku-buku dan naskah-naskah yang diperlukan oleh petugas sensus.
- (2) Pimpinan lembaga atau orang lain yang ditunjuk dari lembaga yang telah ditetapkan sebagai responden berkewajiban memberikan keterangan kepada petugas sensus mengenai segala kegiatan lembaga sesuai dengan daftar isian sensus dan atau memperlihatkan catatan tertulis, buku-buku, dan naskah-naskah.
 - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Setiap responden berhak menolak petugas sensus yang tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 16 huruf a dan b.

Pasal 20

- (1) Ketentuan yang berlaku bagi petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku juga bagi petugas survei statistik dasar.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban responden sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga bagi responden survey statistik dasar.

Paragraf 3 Pengolahan Hasil

Pasal 21

- (1) BPS bertanggung jawab melakukan pengolahan hasil sensus, survey, dan kompilasi produk administrasi untuk menyediakan statistik dasar yang lengkap, akurat, dan mutakhir untuk kebutuhan sampai pada lingkup satuan pemerintahan terkecil.
- (2) Sajian statistik dasar hanya disampaikan dalam bentuk data agregasi dan bukan data individu.

Pasal 22

- (1) Perwakilan BPS di daerah berwenang melakukan pengolahan hasil sensus, survey, dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan statistik dasar bagi lingkup daerah yang bersangkutan.
- (2) Perwakilan BPS di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

Bagian Kedua Statistik Sektoral

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 23

- (1) Instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan BPS.
- (3) Statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus, wajib dilakukan bersama-sama dengan BPS.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survey, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Wilayah survey statistik sektoral meliputi sebagian atau seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 25

- (1) Instansi pemerintah menyelenggarakan survey dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- (2) Instansi pemerintah juga dapat menyelenggarakan survey dan kompilasi produk untuk kebutuhan intern instansi yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Hasil survey statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) juga ditujukan untuk mendukung penyediaan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional.
- (2) Penyelenggaraan survey statistik sektoral, wajib :
 - a. Memberitahukan rencana penyelenggaraan survey kepada BPS;
 - b. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;
 - c. Menyerahkan hasil penyelenggaraan survey yang dilakukannya kepada BPS.
- (3) Rencana penyelenggaraan survey sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat : nama instansi, judul, tujuan survey, jenis data yang akan dikumpulkan, wilayah kegiatan statistik, metode statistik yang akan digunakan, obyek populasi dan jumlah responden, dan waktu pelaksanaan.
- (4) Tata cara memberitahukan rencana penyelenggaraan survey sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur dengan Keputusan Kepala BPS.

Pasal 27

Kompilasi produk administrasi statistik sektoral dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara statistik sektoral berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan atau masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Petugas dan Responden

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pencacahan survey statistik sektoral dilakukan oleh petugas survey yang telah ditetapkan instansi penyelenggara.
- (2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survey statistik sektoral.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara survey statistik sektoral menetapkan responden atau obyek penelitian sebelum survey dilakukan.
- (2) Setiap orang yang telah bersedia menjadi responden tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 3 Pengolahan Hasil

Pasal 31

- (1) Instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik sektoral berwenang melakukan pengolahan hasil statistik sektoral yang diselenggarakan.
- (2) Pengolahan hasil statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi pemerintah bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 32

Ketentuan tentang penyajian statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berlaku juga bagi penyelenggaraan statistik sektoral.

Bagian Ketiga

Statistik Khusus

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 33

- (1) Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dapat menyelenggarakan statistik khusus.
- (2) Penyelenggaraan statistik khusus dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan kegiatan statistik khusus memperoleh data melalui survey, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Survey dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Wilayah survey statistik khusus meliputi sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 35

- (1) Survei statistik khusus, meliputi :
 - a. survey yang hasilnya untuk dipublikasikan;
 - b. survey untuk kebutuhan intern.
- (2) Hasil survey statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a turut mendukung pengembangan Sistem Statistik Nasional.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara survey statistik khusus wajib memberikan sinopsis hasil survey yang diselenggarakan kepada BPS.
- (2) Sinopsis hasil survey yang wajib diberitahukan, meliputi survey yang memenuhi kriteria :
 - a. hasilnya dipublikasikan;

- b. menggunakan metode statistik;
 - c. merupakan data primer.
- (3) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi survey yang digunakan untuk keperluan intern.
 - (4) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat judul, wilayah kegiatan survey, obyek populasi, jumlah responden, waktu pelaksanaan, metode statistik, nama dan alamat penyelenggara, dan abstraksi.
 - (5) Batas waktu dan tata cara penyampaian sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.

Pasal 37

- (1) Kewajiban memberitahukan synopsis dibebankan kepada pihak yang mempunyai hak untuk menyebarkan hasil kegiatan statistik.
- (2) Pemberitahuan synopsis dapat dikuasakan kepada penyelenggara kegiatan statistik di dalam negeri apabila pihak yang memiliki hak berada di luar negeri.
- (3) Penyampaian pemberitahuan synopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi, dan atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.

Pasal 38

- (1) Kompilasi produk administrasi statistik khusus dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Petugas dan Responden

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pencacahan survey statistik khusus dilakukan oleh petugas survey yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

- (2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survey statistik khusus.

Pasal 40

Penyelenggara survey statistik khusus menetapkan responden atau obyek penelitian sebelum survei dilakukan.

Paragraf 3 Pengolahan Hasil

Pasal 41

- (1) Penyelenggara statistik khusus berwenang melakukan pengolahan hasil survey dan kompilasi produk administrasi yang diselenggarakannya.
- (2) Pengolahan hasil statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain.

BAB III PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN, PEMANFAATAN, DAN PEMASYARAKATAN HASIL STATISTIK

Pasal 42

- (1) Pengumuman dan penyebaran hasil kegiatan statistik dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dilaksanakan secara bekerja sama, maka yang berwenang mengumumkan dan menyebarkan hasil kegiatan adalah sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

Pasal 43

- (1) BPS berwenang mengumumkan dan menyebarkan hasil statistik dasar yang diselenggarakannya kepada masyarakat, instansi pemerintah Pusat dan atau Daerah.
- (2) Hasil statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hasil sensus, hasil survey, dan hasil kompilasi produk administrasi.

Pasal 44

- (1) Pengumuman hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS dimuat dalam Berita Resmi Statistik atau media lainnya.
- (2) Berita Resmi Statistik merupakan salah satu media penyebarluasan hasil statistik.
- (3) Pelaksanaan teknis pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala BPS.

Pasal 45

- (1) Hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS, pemanfaatannya terbuka untuk umum.
- (2) BPS memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik yang diselenggarakannya.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh manfaat dari hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus yang hasilnya untuk dipublikasikan, pemanfaatannya terbuka untuk umum.
- (2) Penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pemasyarakatan statistik dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran kepada responden, penyelenggara, dan pengguna statistik akan arti dan pentingnya statistik.
- (2) Pemasyarakatan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan BPS bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat.

- (3) Pemasyarakatan statistik dilakukan dengan menyebarluaskan hasil kegiatan statistik sesuai dengan kebutuhan pengguna statistik.
- (4) Pemasyarakatan statistik dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu melalui berbagai media informasi, seminar, atau dialog.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Pertama Umum

Pasal 48

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- (a) pelaksanaan kegiatan statistik;
- (b) pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Pasal 49

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Statistik

Pasal 50

- (1) Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional.
- (2) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik.

Pasal 51

- (1) Dalam hal kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik sektoral antara pemerintah dengan lembaga swasta, instansi pemerintah bertindak sebagai penyelenggara utama.
- (2) Dalam hal koordinasi dan atau kerjasama dilakukan dengan pihak luar negeri, maka pihak Indonesia harus bertindak sebagai penyelenggara utama.

Pasal 52

Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara instansi pemerintah dan BPS dapat dilakukan dalam hal :

- (a) pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus;
- (b) pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dapat dilakukan sendiri oleh instansi pemerintah.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a wajib dilaksanakan bersama-sama oleh BPS dan instansi pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala BPS dan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan bekerjasama dengan BPS, pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPS bersama-sama dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan statistik sektoral tersebut dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Bagian Ketiga
Pembakuan Konsep, Definisi,
Klasifikasi, dan Ukuran-ukuran

Pasal 55

BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat bekerja sama melakukan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran untuk mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka mewujudkan kerjasama pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, BPS bertindak aktif memprakarsai kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, Kepala BPS memperoleh saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik.

Pasal 57

- (1) Hasil kerjasama pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, selanjutnya disusun oleh BPS.
- (2) Konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang disusun oleh BPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan utama penyelenggaraan statistik di Indonesia.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) BPS melakukan pembinaan statistik.
- (2) Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 59

- (1) Pembinaan statistik ditujukan untuk lebih :
 - a. meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik;
 - b. membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional;
 - c. mengembangkan Sistem Statistik Nasional;
 - d. mendukung pembangunan nasional.
- (2) Sasaran pembinaan statistik mencakup :
 - a. penyelenggara kegiatan statistik;
 - b. responden;
 - c. pengguna statistik.

Pasal 60

Upaya pembinaan statistik meliputi :

- a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b. pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c. peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d. perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e. pengembangan sistem informasi statistik;
- f. peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
- g. peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
- h. peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Pasal 61

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan formal;
- b. pelatihan;
- c. seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah statistik;
- d. peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Pasal 62

Pengembangan statistik sebagai ilmu dilaksanakan melalui :

- a. penelitian dan pengembangan;
- b. pengadaan dan penyebaran media ilmiah statistik;
- c. peningkatan pengembangan profesi;
- d. peningkatan penerapan ilmu statistik melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan atau pertemuan ilmiah lainnya;
- e. pengadaan bahan rujukan tentang ilmu statistik;
- f. peningkatan kerjasama pengembangan statistik sebagai ilmu antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Pasal 63

Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui :

- a. penerapan dan pengembangan jaringan informasi statistik;
- b. penerapan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
- c. penerapan dan pengembangan penginderaan jarak jauh
- d. peningkatan kerjasama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung kegiatan statistik.

Pasal 64

Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya dilaksanakan melalui :

- a. pengkajian, evaluasi, dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran;
- b. pembakuan dan penyebarluasan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran-ukuran yang dibakukan;
- c. peningkatan kerjasama pengembangan dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang dibakukan antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Pasal 65

Pengembangan sistem informasi statistik dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan keterpaduan penyusunan jaringan system informasi statistik;

- b. peningkatan komunikasi system informasi statistik antar penyelenggara kegiatan statistik;
- c. peningkatan hubungan system jaringan antar penyelenggara kegiatan statistik;
- d. peningkatan kerjasama pengembangan jaringan system informasi statistik.

Pasal 66

Peningkatan penyebarluasan informasi statistik dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan mutu dan frekuensi penyebarluasan informasi statistik melalui berbagai media cetak dan elektronik;
- b. penganekaragaman bentuk dan cara penyajian data sesuai dengan penggolongan pengguna statistik;
- c. peningkatan kemudahan dalam memperoleh data hasil kegiatan statistik;
- d. peningkatan kerjasama penyebarluasan informasi hasil kegiatan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.

Pasal 67

Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan penyuluhan tentang pemanfaatan hasil statistik secara berkala;
- b. peningkatan penyebarluasan hasil statistik secara menyeluruh atau bertahap;
- c. peningkatan kerjasama penerangan dan pemasyarakatan kegiatan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah.
- (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik dasar untuk keperluan Pemerintah Daerah, pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), berlaku juga untuk pembiayaan pembinaan statistik.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Semua ketentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

lxxxi

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. H. MULADI, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt.

ttd

Edy Sudibyo

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
BADAN PUSAT STATISTIK
Kepala Biro Perencanaan,

ttd

Pietojo, MSA

LUAS WILAYAH SUMBA TENGAH

(Km²)

1.869,16

LUAS PER KECAMATAN

KATIKUTANA

78,83

MAMBORO

358,59

UMBU RATU NGGAY

791,37

KATIKUTANA SELATAN

368,34

UMBU RATU NGGAY BARAT

272,05

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS**TECHNICAL NOTES**

1. Secara astronomis Kabupaten Sumba Tengah terletak antara $9^{\circ} 20'$ - $9^{\circ} 50'$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ} 22'$ - $119^{\circ} 55'$ Bujur Timur (BT).
 2. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Sumba Tengah memiliki batas-batas: Utara - Selat Sumba, Selatan - Samudera Indonesia, Barat - Kabupaten Sumba Barat, Timur - Kabupaten Sumba Timur.
 3. Kabupaten Sumba Tengah terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Mambooro, Katikutana, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Ratu Nggay, dan Katikutana Selatan.
 4. Kabupaten Sumba Tengah memiliki luas daratan mencapai $187,87 \text{ km}^2$. Sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit di mana hampir 50 persen luas wilayahnya memiliki kemiringan 14° - 40° .
 5. Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Sumba Tengah dan Propinsi Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung
1. *Astronomically, Sumba Barat Regency is located between $9^{\circ} 20'$ - $9^{\circ} 50'$ South Latitude dan $119^{\circ} 22'$ - $119^{\circ} 55'$ East Longitude.*
 2. *In terms of geographic position, Sumba Tengah Regency has boundaries as follows: North - Sumba Strait, South - Indonesia Ocean, West - Sumba Barat Regency, and East - Sumba Timur Regency.*
 3. *Sumba Tengah Regency has 5 district: Mambooro, Katikutana, Umbu Ratu Nggay Barat, Umbu Ratu Nggay, and Katikutana Selatan.*
 4. *Total land area of Sumba Tengah is $187,87 \text{ km}^2$. Most of the Sumba Tengah area is hilly area which almost 50 percent of the area have declivity between 14° - 40° .*
 5. *The same with another places in Indonesia, Sumba Tengah Regency and NTT Province has only two seasons, dry season and rainy season. On June to September the wind flow comes from Australia which contains little moisture, caused the dry season. On the contrary, on December to March the wind flow contains a great deal of moisture which comes from Asia and Pacific Ocean, caused the rainy season. This condition changes and*

uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Walaupun demikian, mengingat Sumba Tengah dan umumnya NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah Sumba Tengah kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Sumba Tengah lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan Sumba Tengah sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari sampai dengan April, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering.

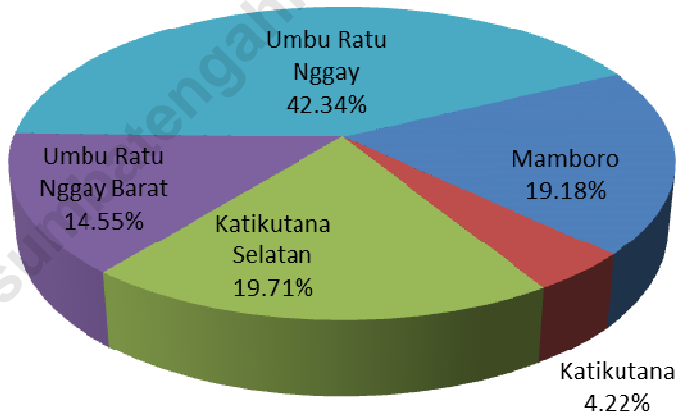
turn for a half of year, after passing, the transitional period on April-May and October-November. Nevertheless, since Sumba Tengah and Commonly NTT as not so far from Australia, the great deal of moisture of wind flow comes from Asia and Pasific Ocean, has cleareased after reaching Sumba Tengah area. And it makes Sumba Tengah has the dry area which is relatively wet in 4 months (January until April and December) and the rest of 8 months is dry.

1.1.

GEOGRAFI /
GEOGRAPHY

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Gambar / Figure 1.1
Persentase Luas Wilayah
Kabupaten Sumba Tengah menurut Kecamatan,
Percentage of Total Area of Sumba Tengah Regency by
District
2017



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 1.1.1
 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
Total Area by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2017

	Kecamatan Subdistrict	Luas (km ²) Total Area (square.km)	Persentase Percentage
	(1)	(2)	(3)
1	Katikutana	78,83	4,22
2	Katikutana Selatan	368,34	19,71
3	Umbu Ratu Nggay Barat	272,05	14,55
4	Umbu Ratu Nggay	791,37	42,34
5	Mamboro	358,59	19,18
	Sumba Tengah	1 869,18	100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

Source : National Land Affairs Board

Tabel / Table 1.1.2

Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten
Sumba Tengah

*Height Above Mean Sea Level (AMSL) by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
2017*

	Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Tinggi/Height (meter)
	(1)	(2)	(3)
1	Katikutana	Anakalang	0 - 800
2	Katikutana Selatan	Waikabeti	0 - 720
3	Umbu Ratu Nggay Barat	Maderi	0 - 800
4	Umbu Ratu Nggay	Lendi Wacu	0 - 800
5	Mamboro	Mananga	0 - 450
	Sumba Tengah	Waibakul	0 - 800

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Pertanahan Nasional

Source : Village Community Empowerment Service and National Land Board

Tabel / Table 1.1.3

Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Sumba Tengah (km)
Distance between Subdistrict Capital and Regency Capital in Sumba Tengah Regency
 (km)
 2017

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Jarak ke Ibukota Kabupaten <i>Distance to Regency Capital</i>
	(1)	(2)	(3)
1	Katikutana	Anakalang	5
2	Katikutana Selatan	Waikabeti	8
3	Umbu Ratu Nggay Barat	Maderi	22
4	Umbu Ratu Nggay	Lendi Wacu	38
5	Mamboro	Mananga	42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Source Village and Community Empowerment Service

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

1.2.

IKLIM /
CLIMATE

<https://sumkategankabps.g>

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 1.2.1
Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Sumba Tengah
Average Temperature and Humidity by Month in Sumba Tengah Regency
2017

Bulan/Month	Suhu Udara Temperature (°C)			Kelembaban Udara Humidity (%)		
	Maks Max	Min	Rata- rata Average	Maks Max	Min	Rata- rata Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	-	-	-	-	-	-
Februari/February	-	-	-	-	-	-
Maret/March	-	-	-	-	-	-
April/April	-	-	-	-	-	-
Mei/May	-	-	-	-	-	-
Juni/June	-	-	-	-	-	-
Juli/July	-	-	-	-	-	-
Agustus/August	-	-	-	-	-	-
September/September	-	-	-	-	-	-
Oktober/October	-	-	-	-	-	-
November/November	-	-	-	-	-	-
Desember/December	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Data belum tersedia

Remarks

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah
Source Food Crops, Horticulture and Estate Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 1.2.2

Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan
di Kabupaten Sumba Tengah

*Average Atmospheric Pressure, Wind Velocity and Duration of Sunshine by Month in
Sumba Tengah Regency*

2017

Bulan/Month	Tekanan Udara Atmospheric Pressure (mb)	Kecepatan Angin/Wind Velocity (knot)	Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	-	-	-
Februari/February	-	-	-
Maret/March	-	-	-
April/April	-	-	-
Mei/May	-	-	-
Juni/June	-	-	-
Juli/July	-	-	-
Agustus/August	-	-	-
September/September	-	-	-
Oktober/October	-	-	-
November/November	-	-	-
Desember/December	-	-	-

Keterangan : Data belum tersedia

Remarks

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah

Source : Food Crops, Horticulture and Estate Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 1.2.3
 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Sumba Tengah
*Amount of Precipitation and Number of Rainy Days by Month in Sumba Tengah
 Regency
 2017*

(%)

Bulan/Month	Curah Hujan Precipitation (mm ³)	Hari Hujan Rainy Days
(1)	(2)	(3)
Januari/January	-	-
Februari/February	-	-
Maret/March	-	-
April/April	-	-
Mei/May	-	-
Juni/June	-	-
Juli/July	-	-
Agustus/August	-	-
September/September	-	-
Oktober/October	-	-
November/November	-	-
Desember/December	-	-

Keterangan : Data belum tersedia

Remarks

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah

Source : Food Crops, Horticulture and Estate Service of Sumba Tengah Regency

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

JUMLAH DESA & KELURAHAN SUMBA TENGAH 2017

0 KELURAHAN



65 DESA



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS**TECHNICAL NOTES**

1. Secara administrasi, sejak tanggal 22 Mei 2007, Kabupaten Sumba Barat mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Pimpinan Daerah bertanggung jawab sebagai lembaga eksekutif dan DPRD bertanggung jawab sebagai lembaga legislatif. Kabupaten Sumba Tengah dipimpin oleh seorang Bupati dengan ibu kota kabupaten adalah Waibakul.
 3. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah hasil pemilihan umum tahun 2014 sebanyak 20 orang. Bila dilihat komposisinya, jumlah anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah dari 20 anggota yang dipilih, 3 kursi (15%) masing-masing berasal dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P dan Partai Nasdem, 2 kursi (10%) masing-masing dari Partai Hanura dan Partai KPI, 1 kursi masing masing dari PBB dan PKS.
 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2017 sebanyak 1.983 orang.
1. *Administratively, since 22 May 2007, Sumba Barat Regency has split into Sumba Barat, Sumba Barat Daya and Sumba Tengah Regency.*
 2. *Regional government consist of Head of Region and Parliament. Head of Region responsible in executive and Parliament responsible in legislative. Sumba Tengah Regency is lead by a regent with Waibakul as the capital city.*
 3. *The result of 2014 general election registered that number of regional parliament members of Sumba Tengah was 20 persons, which came for different parties. The composition as follows 3 persons (15 %) each from Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P and Partai Nasdem; 2 persons (10 %) each from Hanura and KPI; and 1 persons each from PBB and PKS.*
 4. *In 2017, total number of civil servants of Sumba Tengah Regency was 1.983 people.*

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

2.1.

WILAYAH ADMINISTRASI /
ADMINISTRATIVE AREA

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 2.1.1
 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Villages by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2017

Kecamatan Subdistrict	Desa/Village	Kelurahan/Village
(1)	(2)	(3)
1 Katikutana	7	-
2 Katikutana Selatan	9	-
3 Umbu Ratu Nggay Barat	18	-
4 Umbu Ratu Nggay	18	-
5 Mambo	13	-
Sumba Tengah	65	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Source Village and Community Empowerment Service

Tabel / Table 2.1.2
 Banyaknya Kelurahan/Desa menurut Tingkat Perkembangan Desa dan Kecamatan
Number of Villages by Developing Level and District
 2017

Kecamatan <i>District</i>	Swadaya	Swakarya Self Developing	Swa- sembada Self Supporting	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Mamboro	-	13	-	13
02. Katikutana	-	7	-	7
03. U. R. Nggay Barat	-	18	-	18
04. Umbu Ratu Nggay	-	18	-	18
05. Katikutana Selatan	-	9	-	9
Sumba Tengah	-	65	-	65

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Source : Village and Community Empowerment Service

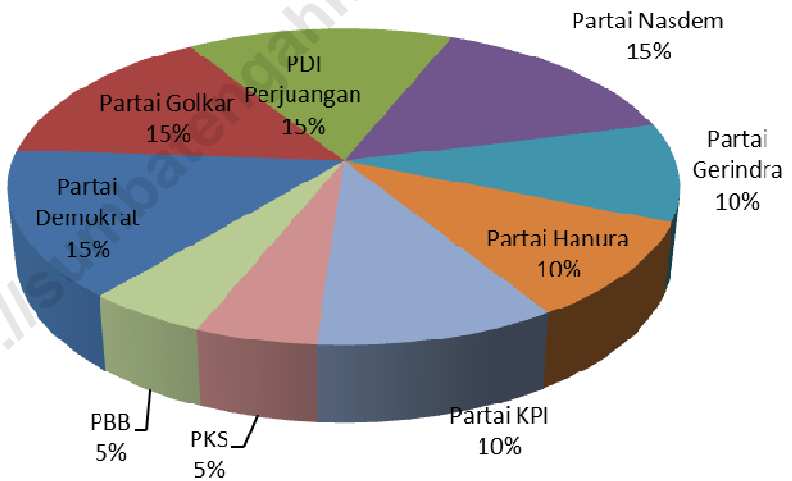
2.2.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH /

THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Gambar / Figure 2.1
Komposisi Jumlah Anggota DPRD
Kabupaten Sumba Tengah Hasil PEMILU
Distribution of Regional Parliament Members of
Sumba Tengah Election
2017



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 2.2.1
 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di
 Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Members of The Regional House of Representatives by Political Parties and Sex in
 Sumba Tengah Regency
 2017*

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Partai Demokrat	3	-	3
2. Partai Golongan Karya	3	-	3
3. Partai PDI Perjuangan	3	-	3
4. Partai Nasional Demokrat	3	-	3
5. Partai GERINDRA	2	-	2
6. Partai HANURA	2	-	2
7. Partai KPI	2	-	2
8. Partai Keadilan Sejahtera	1	-	1
9. Partai Bulan Bintang	1	-	1
Sumba Tengah	20	-	20

Sumber: DPRD Kab. Sumba Tengah

Source: Regional Parliament of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 2.2.2
 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD menurut Jenisnya
Number of Law Product Made by Regional Parliament
 2015 - 2017

Partai Party	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(3)
1. Peraturan Daerah	7	8	11
2. Peraturan Daerah Inisiasi (Prakarsa) DPRD	2	3	3
Jumlah Total	9	11	14

Catatan :

Sumber: DPRD Kab. Sumba Tengah

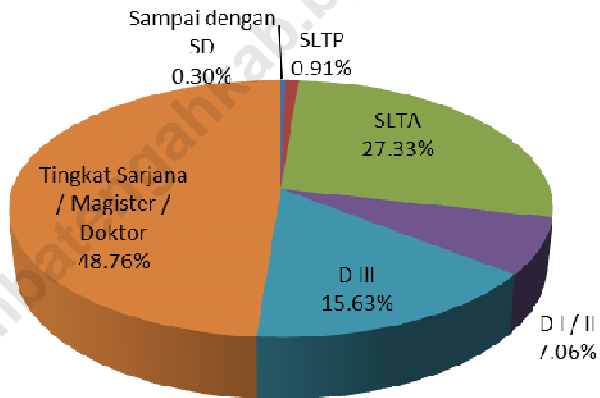
Source: Regional Parliament of Sumba Tengah Regency

2.3.

PEGAWAI NEGERI SIPIL /
CIVIL SERVANT

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Gambar / Figure 2.2
Persentase PNS menurut Tingkat Pendidikan
Percentage of Civil Servant by Education Level
2017



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 2.3.1
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di
 Kabupaten Sumba Tengah
Number of Civil Servants by Institution/Office and Sex in Sumba Tengah Regency
 2017

	Dinas/Instansi Pemerintahan <i>Institution/Office</i>	Jenis Kelamin/Sex		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat Daerah	6	1	7
2	Bagian Umum	18	6	24
3	Badan Tata Pemerintahan	4	4	8
4	Bagian Humas	3	3	6
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3	4	7
6	Bagian Ekonomi	3	4	7
7	Bagian Pembangunan	3	4	7
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4	2	6
9	Bagian Hukum	6	1	7
10	Bagian Organisasi	4	5	9
11	Sekretariat DPRD	9	5	14
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan	14	8	22
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15	7	22
14	Inspektorat	15	7	22
15	Dinas Ketahanan Pangan	52	31	83
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	13	6	19

Lanjutan Tabel / Continued Table 2.3.1

	Dinas/Instansi Pemerintahan <i>Institution/Office</i>	Jenis Kelamin/Sex		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	381	509	890
18	Dinas Kesehatan	85	254	339
19	Dinas Sosial	8	6	14
20	Dinas Statistik, Komunikasi, Informatika dan Persandian	10	4	14
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	17	5	22
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11	10	21
23	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	17	5	22
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	27	6	33
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	17	11	28
26	Dinas Perikanan	10	8	18
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32	6	38
28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	12	6	18
29	Badan Keuangan	14	19	33
30	Dinas Lingkungan Hidup	9	5	14
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	8	2	10
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	12	27
33	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	18	3	21
34	Kecamatan Katikutana	8	4	12
35	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	22	1	23

Lanjutan Tabel / *Continued Table 2.3.1*

Dinas/Instansi Pemerintahan <i>Institution/Office</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
36 Kecamatan Mambo	14	3	17
37 Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	17	1	18
38 Kecamatan Katikutana Selatan	10	5	15
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	2	11
40 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	11	9	20
41 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	3	8
42 Sanggar Kegiatan Belajar	2	4	6
43 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	5	0	5
44 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	8	16
<i>Jumlah/Total</i>	974	1009	1983

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sumba Tengah

Source : *Employment, Education and Training Board of Sumba Tengah Regency*

Tabel / Table 2.3.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah

*Number of Civil Servants by Educational Attainment and Sex in Sumba Tengah Regency
2017*

Pendidikan Terakhir <i>Educational Attainment</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD <i>Up to Primary School</i>	6	0	6
SLTP/Sederajat <i>General/Vocational Junior High School</i>	16	2	18
SMA/Sederajat <i>General/Vocational Senior High School</i>	285	257	542
Diploma I,II <i>Diploma I,II</i>	45	95	140
Diploma III/Sarjana Muda <i>Diploma III/Bachelor</i>	122	188	310
Tingkat Sarjana/Magister/Doktor/Ph.d <i>University Graduates</i>	500	467	967
Jumlah/ <i>Total</i>	974	1 009	1 983

Sumber :
Source

Tabel / Table 2.3.3
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di
 Kabupaten Sumba Tengah
Number of Civil Servants by Hierarchy and Sex in Sumba Tengah Regency
 2017

Golongan Kepangkatan <i>Hierarchy</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I/A (Juru Muda)	1	-	1
I/B (Juru Muda Tingkat I)	2	-	2
I/C (Juru)	1	-	1
I/D (Juru Tingkat I)	5	2	7
Golongan I/Range I	9	2	11
II/A (Pengatur Muda)	40	52	92
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	86	80	166
II/C (Pengatur)	87	148	235
II/D (Pengatur Tingkat I)	81	111	192
Golongan II/Range II	294	391	685
III/A (Penata Muda)	129	166	295
III/B (Penata Muda Tk I)	98	113	211
III/C (Penata)	226	209	435
III/D (Penata Tingkat I)	67	50	117
Golongan III/Range III	520	538	1 058
IV/A (Pembina Muda)	95	72	167
IV/B (Pembina Muda Tingkat I)	33	11	44
IV/C (Pembina)	16	1	17
IV/D (Pembina Tingkat I)	1	-	1
Golongan IV/Range IV	145	84	229
Jumlah/Total	968	1 015	1 983

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

**JUMLAH PENDUDUK
SUMBA TENGAH 2017**

70.719

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

TECHNICAL NOTES

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Data jumlah penduduk tahun ini diambil dari hasil registrasi penduduk di tiap desa. 2. Penduduk Sumba Tengah merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Sumba Tengah. 3. Rata-rata pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. 4. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per km persegi. 5. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. 6. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu bangunan dengan pengelolaan makanan dari satu dapur (pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu). 7. Data ketenagakerjaan yang utama bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). 8. Sesuai dengan konsep ILO, pengangguran terbuka mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, dan penduduk yang tidak | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Population data in this publication is taken from population registration at each villages.</i> 2. <i>Sumba Tengah population are all residents of the entire territory of Sumba Tengah Regency.</i> 3. <i>Average growth of population is the annual population growth rate over a certain period.</i> 4. <i>Population density is the number people per square kilometer.</i> 5. <i>Sex ratio is the number of males to the number of females in a given area and time.</i> 6. <i>Household is a person or a group of person who usually live together in a building or housing unit who make common provision for food and other essentials of living. Common provision means one organizing daily needs for all of household members.</i> 7. <i>The main source of employment data is National Labour Force Survey (Sakernas).</i> 8. <i>As the ILO concept, open unemployment covers population who were looking for work, population who were establishing a new business/firm/establishment,</i> |
|---|--|

- mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
9. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
10. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara sedang tidak bekerja dan pengangguran.
11. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu.
12. Jumlah jam kerja seluruhnya adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).
13. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan / tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Klasifikasinya mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit.
14. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan
- discouraged job seekers, and those who were not actively looking for work with the reason of already having job not starting to work.*
9. *Working age population is population aged 15 years and over.*
10. *Labor force are people aged 15 years old and over who, in the previous week, were working, temporarily absent from work but having jobs, and those who did not have job and looking for work.*
11. *The concept of working means activity intended to earn income by doing work or helping to do work at least one hour continuously during the reference week.*
12. *Total working hours is the total hours spent by an employee to perform all jobs (excluding the time used for other activities which are not classified as work).*
13. *Industry is field of a person's activity or establishment. The classification of industries follows the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) in one digit.*
14. *Employment status is the status of a person at his place of work or establishment where he has*

pekerjaan.

employed.

15. Pekerja tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan / keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapatkan upah/gaji.

15. *Unpaid worker is a person who intended to work without pay in an establishment run by other members of the family, relative or neighbor.*

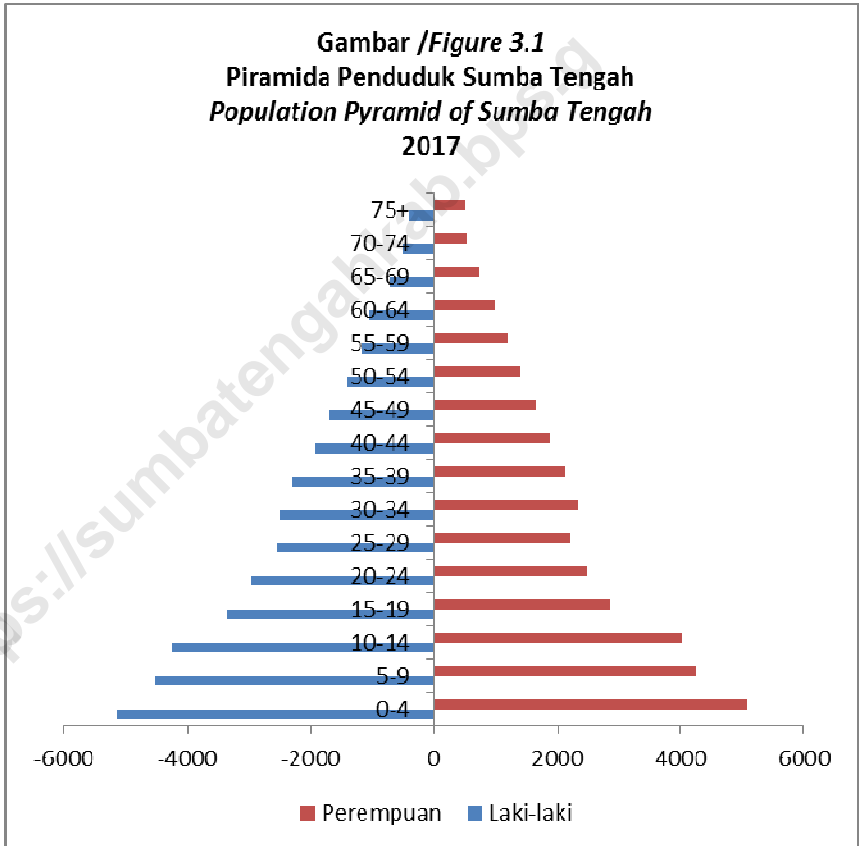
<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

3.1.

**KEPENDUDUKAN /
*POPULATION***

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Gambar /Figure 3.1
Piramida Penduduk Sumba Tengah
Population Pyramid of Sumba Tengah
2017



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 3.1.1
 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
 Sumba Tengah, 2010, 2016, dan 2017
*Population and Population Growth Rate by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2010, 2016, and 2017*

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk Population			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2010	2016	2017	2010- 2017	2016- 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Katikutana	9 733	10 915	11 134	1,87	2,01
2 Katikutana Selatan	10 095	11 409	11 615	1,95	1,80
3 Umbu Ratu Nggay Barat	16 223	17 941	18 204	1,58	1,46
4 Umbu Ratu Nggay	12 264	13 540	13 700	1,52	1,18
5 Mamboro	14 170	15 801	16 066	1,74	1,68
Sumba Tengah	62 485	69 606	70 719	1,71	1,60

Catatan : Data 2010 berdasarkan Sensus Penduduk 2010

Note

Tabel / Table 3.1.2
 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
Population and Sex Ratio by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2017

Kecamatan Subdistrict	Jenis Kelamin Sex			Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Katikutana	5 729	5 405	11 134	106
2 Katikutana Selatan	5 940	5 675	11 615	105
3 Umbu Ratu Nggay Barat	9 490	8 714	18 204	109
4 Umbu Ratu Nggay	7 034	6 666	13 700	106
5 Mamboro	8 192	7 874	16 066	104
Sumba Tengah	36 385	34 334	70 719	106

Catatan : Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2017

Note Based on 2017 Population Projection

Tabel / Table 3.1.3
 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
Population Distribution and Density by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2017

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km
(1)	(2)	(3)
1 Katikutana	15,74	141,24
2 Katikutana Selatan	16,42	31,53
3 Umu Ratu Nggay Barat	25,74	66,91
4 Umu Ratu Nggay	19,37	17,31
5 Mambo	22,72	44,80
Sumba Tengah	100,00	37,83

Catatan : Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2017
Note Based on 2016 Population Projection

Tabel / Table 3.1.4
 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah
Population by Age Group and Sex in Sumba Tengah Regency
 2017

Kelompok Umur Age Group	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	5 145	5 084	10 229
5–9	4 520	4 270	8 790
10–14	4 234	4 023	8 257
15–19	3 352	2 857	6 209
20–24	2 963	2 488	5 451
25–29	2 552	2 218	4 770
30–34	2 501	2 348	4 849
35–39	2 293	2 145	4 438
40–44	1 913	1 878	3 791
45–49	1 679	1 650	3 329
50–54	1 408	1 400	2 808
55–59	1 167	1 207	2 374
60–64	1 036	983	2 019
65–69	713	739	1 452
70–74	500	533	1 033
75+	409	511	920
Jumlah/Total	36 385	34 334	70 719

Catatan : Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2017

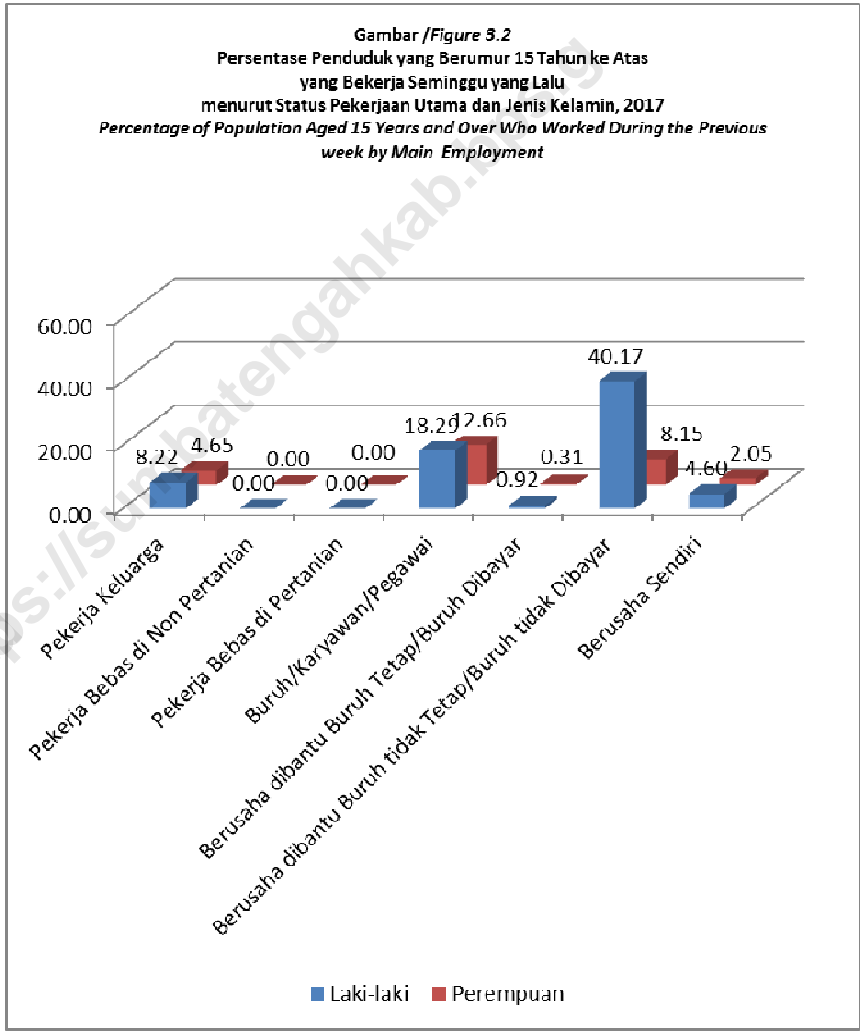
Note Based on 2016 Population Projection

3.2.

KETENAGAKERJAAN /
EMPLOYMENT

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Gambar /Figure 3.2
 Persentase Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas
 yang Bekerja Seminggu yang Lalu
 menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2017
*Percentage of Population Aged 15 Years and Over Who Worked During the Previous
 week by Main Employment*



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 3.2.1

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah
Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity During The Previous Week and Sex in Sumba Tengah Regency
 2017

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>	17 873	6 728	24 601
Bekerja/ <i>Working</i>	17 003	6 549	23 552
Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	870	179	1 049
Bukan Angkatan Kerja <i>Economically Inactive</i>	4 713	14 298	19 011
Sekolah/ <i>Attending School</i>	2 411	2 291	4 702
Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	1 241	11 067	12 308
Lainnya/ <i>Others</i>	1 061	940	2 001
Jumlah/ <i>Total</i>	22 586	21 026	43 612
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <i>Economically Active Participation Rate</i>	79,13	32,00	56,41
Tingkat Pengangguran/ <i>Unemployment Rate</i>	4,87	2,66	4,26

Sumber : Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2017
Source : National Labor Force Survey 2017

POPULATION AND EMPLOYMENT

Tabel / Table 3.2.2

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Sumba Tengah

Population Aged 15 Years and Over by Educational Attainment and Type of Activity During The Previous Week in Sumba Tengah Regency

2017

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>		
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran Terbuka <i>Unemployment</i>	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah SD <i>Don't Have Primary School Certificate</i>	9 670	193	9 863
Sekolah Dasar/Paket A <i>Primary School</i>	4 392	256	4 648
Sekolah Menengah Pertama/Paket B/ <i>Junior High School</i>	1 600	267	1 867
Sekolah Menengah Atas/Paket C/ <i>Senior High School</i>	3 538	60	3 598
Sekolah Menengah Atas Kejuruan/ <i>Vacational Senior High School</i>	999	62	1 061
Diploma I/II/III/Akademi <i>Diploma I/II/III/Academy</i>	645	0	645
Universitas S1/D4/S2/S3 <i>University</i>	2 708	211	2 919
Jumlah/ <i>Total</i>	23 552	1 049	24 601

Sumber : Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2017

Source : National Labor Force Survey 2017

Tabel / Table 3.2.3

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Tengah
Population Aged 15 Years and Over Who Worked During the Previous Week by Age Group and Sex in Sumba Tengah Regency
 2 0 1 7

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
15-19	640	65	705
20-24	902	410	1 312
25-29	2 170	1 365	3 535
30-34	2 688	1 003	3 691
35-39	2 876	1 372	4 248
40-44	2 009	903	2 912
45-49	1 429	574	2 003
50-54	1 587	222	1 809
55-59	1 301	479	1 780
60+	1 401	156	1 557
Jumlah/ <i>Total</i>	17 003	6 549	23 552

Sumber : Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2017

Source : National Labor Force Survey 2017

POPULATION AND EMPLOYMENT

Tabel / Table 3.2.4

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kab. Sumba Tengah
Population Aged 15 Years and Over Who Worked During the Previous Week by Main Industry and Sex in Sumba Tengah Regency
 2017

Lapangan Pekerjaan Utama ¹ <i>Main Industry ¹</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	10 695	2 406	13 101
2	691	0	691
3	180	409	589
4	78	0	78
5	646	0	646
6	377	691	1 068
7	582	0	582
8	74	65	139
9	3 680	2 978	6 658
Jumlah/Total	17 003	6 549	23 552

- Keterangan/Note:
¹ 1 Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, Hunting, and Fisheries*
 2 Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*
 3 Industri Pengolahan/*Manufacturing Industry*
 4 Listrik, Gas, dan Air/*Electricity, Gas, and Water*
 5 Bangunan/*Construction*
 6 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel/*Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurants, and Hotels*
 7 Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/*Transportation, Warehousing, and Communication*
 8 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan/*Financial, Insurance, Real Estate, and Business Services and Business Service*
 9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan/*Community, Social, and Personal Services*

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017
 Source: National Labor Force Survey 2017

SEKOLAH DASAR (SD) SUMBA TENGAH 2017

81 SEKOLAH

12.976 MURID

894 GURU

Angka Partisipasi Murni

96,36

Angka Partisipasi Kasar

114,74



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS**TECHNICAL NOTES**

1. Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal, termasuk yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
 2. Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal dan non formal, termasuk mahasiswa yang sedang cuti.
 3. Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang tidak lagi terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal pada saat pencacahan.
 4. Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata atau kalimat sederhana dengan suatu aksara tertentu.
 5. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan yang dicatat adalah pendidikan formal berdasar kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional.
 6. Imunisasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut.
1. *Not/never attending school is someone who has never attended or never been registered in a formal education, including those who just completed kindergarten.*
 2. *Attending school is someone who is currently attending formal and non formal education.*
 3. *Not attending school anymore is someone who is not currently attending attending school.*
 4. *Able to read and write is the ability to read and write at least a simple sentence.*
 5. *School is an education institution starting from primary, secondary, or tertiary education. The education data recorded in the survey covering data on formal education based on the curriculum set up by Ministry of National Education.*
 6. *Immunization is putting enervated microbe of a certain disease into human body by injection or drinking to make the body immune to that disease.*

- | | |
|---|---|
| <p>7. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, criminal atau hal lain.</p> | <p>7. <i>Health complaint is a condition where a person has health or mental problems because of acute illness, accident, crimes or other.</i></p> |
| <p>8. Mengobati sendiri adalah upaya oleh anggota rumah tangga/keluarga dengan melakukan pengobatan sendiri tanpa datang ke tempat fasilitas kesehatan atau memanggil dokter atau petugas kesehatan ke rumahnya.</p> | <p>8. <i>Self treatment is an effort of household members/family to have a health treatment by themselves without visiting health facilities or a doctor/health personnel.</i></p> |
| <p>9. Status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri adalah jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.</p> | <p>9. <i>Own ownership property status is a status of dwelling occupied belongs to the head of household or one of household member. Houses bought through bank credit or houses with leasing status were also categorized as an own property.</i></p> |
| <p>10. Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap.</p> | <p>10. <i>Reported crime incidence includes all criminal cases reported and received by police office and all crimes caught by police.</i></p> |
| <p>11. Persentase penyelesaian tindak pidana menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan kepada kejaksaan. b. Dalam hal delik aduan, | <p>11. <i>Crime clearance refers to percentage of crime clearance by police. A criminal case is categorized as a cleared case by police, if:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>All document are ready to submit or already submitted to justice court.</i> b. <i>In the case of attense that warrants complaint, the complaint was withdraw within a</i> |

- pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- c. Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan kewenangan hukum.
 - d. Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian.
 - e. Tersangka meninggal dunia.
 - f. Kasus kadaluwarsa.
12. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri atas 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Perhitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
- given period state in the law.*
- c. *The case was cleared by police based on the law authority.*
 - d. *The case was not the responsibility of police office.*
 - e. *The suspect died.*
 - f. *The case was out of date.*
12. *To measure poverty, BPS has used the concept of basic needs approach. Therefore, poverty is viewed as economic inability to fulfill food and non-food basic needs which are measured by consumption/ expenditure. The method used is calculating poverty line, which consist of two components that are food poverty line (FPL) and non food poverty line (NFPL). The poverty line was calculated separately for urban and rural areas*

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

4.1.

PENDIDIKAN /
EDUCATION

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 4.1.1
 Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Kelompok Umur Sekolah dan
 Partisipasi Sekolah di Kabupaten Sumba Tengah
*Percentage of Population Aged 7-24 Years by Age Group, and School Participation in
 Sumba Tengah Regency
 2017*

Kelompok Umur Sekolah <i>School Age Group</i>	Partisipasi Sekolah/ <i>School Participation</i>		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>Not/Never Attending School</i>	Masih Sekolah <i>Attending School</i>	Tidak Sekolah Lagi Not <i>Attending School Anymore</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
7 - 12	1,36	98,47	0,17
13 -15	0,49	95,76	3,75
16 - 18	2,23	78,14	19,64
19 - 24	2,84	22,55	74,61

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Source : *National Socio Economic Survey kor 2017*

Tabel / Table 4.1.2

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumba Tengah
Net Enrolment Rate and Gross Enrolment Rate by Educational Level in Sumba Tengah Regency
 2017

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	APM <i>Net Enrollment Rate</i>	APK <i>Gross Enrollment Rate</i>
(1)	(2)	(3)
SD/MI <i>Elementary School</i>	96,36	114,74
SMP/MTs <i>Junior High School</i>	70,54	98,89
SMA/SMK/MA <i>Senior High School</i>	43,62	63,47

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Source : National Socio Economic Survey 2017

Tabel / Table 4.1.3
 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut
 Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Primary Schools by
 Subdistrict in Sumba Tengah Regency*
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Katikutana	8	1 799	130	14
2 Katikutana Selatan	11	1 884	119	16
3 Umbu Ratu Nggay Barat	24	3 293	266	12
4 Umbu Ratu Nggay	21	2 657	186	14
5 Mamboro	17	3 343	193	17
Sumba Tengah	81	12 976	894	15

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Sumba Tengah
 Source Public Education Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.1.4

Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah

Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Madrasah Ibtidaiyah (MI) by Subdistrict in Sumba Tengah Regency

2017

Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Katikutana	-	-	-	-
2 Katikutana Selatan	-	-	-	-
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-	-
4 Umbu Ratu Nggay	-	-	-	-
5 Mamboro	-	-	-	-
Sumba Tengah	-	-	-	-

Catatan/Note : Belum ada MI di Kab Sumba Tengah

Sumber : Kementerian Agama Kab. Sumba Tengah

Source : Religion Ministry of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.1.5
 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama
 Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Junior High Schools
 by Subdistrict in Sumba Tengah Regency*
 2017

Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Katikutana	5	1 391	107	13
2 Katikutana Selatan	5	767	76	10
3 Umbu Ratu Nggay Barat	7	1 074	111	10
4 Umbu Ratu Nggay	9	1 105	97	11
5 Mamboro	7	1 111	96	12
Sumba Tengah	33	5 448	487	11

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Sumba Tengah
 Source : Public Education Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.1.6
 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Madrasah
 Tsanawiyah (MTs) by Subdistrict in Sumba Tengah Regency*
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Katikutana	-	-	-	-
2 Katikutana Selatan	-	-	-	-
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-	-
4 Umbu Ratu Nggay	-	-	-	-
5 Mamboro	1	100	20	5
Sumba Tengah	1	100	20	5

Sumber : Kementerian Agama Kab. Sumba Tengah

Source Religion Ministry of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.1.7
 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas Menurut
 Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Senior High Schools
 by Subdistrict in Sumba Tengah Regency*
 2017

Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Katikutana	1	951	51	19
2 Katikutana Selatan	1	542	41	13
3 Umbu Ratu Nggay Barat	1	363	28	13
4 Umbu Ratu Nggay	-	-	-	-
5 Mambo	1	234	20	12
Sumba Tengah	4	2 090	140	15

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Sumba Tengah
 Source Public Education Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.1.8
 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah Menurut
 Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Senior High Schools
 by Subdistrict in Sumba Tengah Regency*
 2017

Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Katikutana	-	-	-	-
2 Katikutana Selatan	-	-	-	-
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-	-
4 Umbu Ratu Nggay	-	-	-	-
5 Mamboro	1	22	7	3
Sumba Tengah	1	22	7	3

Sumber : Kementerian Agama Kab. Sumba Tengah

Source Religion Ministry of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.1.9
 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan
 Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Schools, Pupils, Teachers, and School-Teacher Ratio of Public Vocational
 High Schools by Subdistrict in Sumba Tengah Regency*
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Sekolah Schools	Murid Pupils	Guru Teachers	Rasio Murid- Guru/Pupil- Teacher Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Katikutana	-	-	-	-
2 Katikutana Selatan	-	-	-	-
3 Umbu Ratu Nggay Barat	1	773	65	12
4 Umbu Ratu Nggay	1	101	13	8
5 Mambooro	1	384	35	11
Sumba Tengah	3	1 258	113	11

Catatan : Termasuk Sekolah Menengah Teologi Kristen Waibakul

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Sumba Tengah

Source *Public Education Service of Sumba Tengah Regency*

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

4.2.

KESEHATAN /
HEALTH

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 4.2.1
 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Health Facilities by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2017

Kecamatan Subdistrict	Rumah Sakit Hospital	Rumah Bersalin Maternity Hospital	Puskesmas Public Health Center	Posyandu Maternal & Child Health Center	Klinik/Balai Kesehatan Clinic/Health Center	Polindes Village Maternity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	0	0	1	31	1	8
2 Katikutana Selatan	0	0	1	18	0	4
3 Umu Ratu Nggay Barat	1	0	1	12	0	5
4 Umu Ratu Nggay	0	0	3	31	0	6
5 Mambooro	0	0	2	16	0	6
Sumba Tengah	1	0	8	108	1	29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah

Source Public Health Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.2.2
 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Health Personnel by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2017

Kecamatan Subdistrict	Tenaga Kesehatan/Health Personnel				
	Tenaga Medis Medical Personnel	Tenaga Keperawatan Nursing Personnel	Tenaga Kebidanan Midwifery Personnel	Tenaga Kefarmasian Pharmacy Personnel	Tenaga Kesehatan Lainnya Other Health Personnel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Katikutana	2	36	14	2	8
2 Katikutana Selatan	1	38	13	2	5
3 Umbu Ratu Nggay Barat	1	14	10	1	6
4 Umbu Ratu Nggay	2	46	28	2	14
5 Mamboro	2	26	13	0	13
Sumba Tengah	8	160	78	7	46

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah

Source Public Health Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.2.3
 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Specialist Doctor, Generalist Doctor, and Dentist by Type of Health Facility in Sumba Tengah Regency
 2017

Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Dokter Spesialis <i>Specialist Doctors</i>	Dokter Umum <i>Generalist Doctors</i>	Dokter Gigi <i>Dentist</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Puskesmas/ <i>Public Health Center</i>	0	8	0
Rumah Sakit/ <i>Hospital</i>	3	9	0
Dinas Kesehatan Kabupaten	0	1	0
Jumlah/ <i>Total</i>	3	18	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah
 Source *Public Health Service of Sumba Tengah Regency*

Tabel / Table 4.2.4
 Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di
 Kabupaten Sumba Tengah
*Percentage of Children Under Five Years Who Had Immunization by Type of
 Immunization in Sumba Tengah Regency
 2014 - 2017*

Jenis Imunisasi Type of Immunization	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	
BCG	55,1	43,0	61,1	57
Campak/Measles	58,1	74,0	65,4	70,2
DPT 1	64,5	79,2	73,7	70,7
DPT 2	69,5	84,1	70,9	0
DPT 3	73,5	84,2	69,8	65,2
Polio 1	57,1	65,4	46,7	-
Polio 2	61,0	76,6	62,8	-
Polio 3	68,1	80,6	59,9	-
Polio 4	66,2	83,1	55,0	79,5
Hepatitis B 1	64,5	79,2	73,7	70,7
Hepatitis B 2	69,5	84,1	70,9	-
Hepatitis B 3	73,5	84,2	69,8	65,2
HB 0	40,1	58,4	40,7	-
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	62,8	89,2	62,0	61,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah
 Source Public Health Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.2.5
 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Cases of the 10 Most Diseases in Sumba Tengah Regency
 2017

Jenis Penyakit <i>The Type of Disease</i>		Jumlah Kasus <i>Number Of Cases</i>
(1)		(2)
1.	Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)	28 178
2.	Gastritis	7 396
3.	Penyakit pada sistem otot & jaringan (Polimralgia Reumatik)	6 807
4.	Faringitis Akut	4 849
5.	Dermatitis Kontak Alergik	4 818
6.	Artritis Reumatoid	4 115
7.	Vulnus	3 635
8.	Demam Tifoid	2 915
9.	Migren	2 145
10.	Asma Bronkial (Asma Stabil)	2 109

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah
 Source Public Health Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.2.6

Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Births, Babies with Low Birth Weights (LBW), Treated LBW, and Malnutrition Cases in Sumba Tengah Regency
 2011-2017

Tahun Year	Bayi Lahir Births	BBLR/LBW		Gizi Buruk Malnutrition
		Jumlah Total	Dirujuk Treated	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	1 168	24	9	95
2012	1 423	33	5	114
2013	1 450	42	8	59
2014	1 328	63	4	52
2015	1 343	64	5	33
2016	1 246	55	0	31
2017	1 818	76	0	23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah
Source Public Health Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.2.7

Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Pregnant Women, Those with One Visit and four Visits of Antenatal Care, Chronic Energy Deficiency (CED), and Receiving Iron Supplement in Sumba Tengah Regency
 2011 - 2017

Tahun Years	Jumlah Ibu Hamil <i>Pregnant Women</i>	Melakukan Kunjungan K1 <i>One Visit</i>	Melakukan Kunjungan K4 <i>Four Visits</i>	Kurang Energi Kronis (KEK) <i>Chronic Energy Deficiency (CED)</i>	Mendapat Zat Besi (Fe) <i>Receiving Iron Supplement</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	1 644	1 772	1 080	-	1 078
2012	1 610	1 930	1 223	-	1 193
2013	1 701	1 709	1 330	363	1 341
2014	1 738	1 523	1 208	253	1 218
2015	2 162	1 563	1 234	119	1 049
2016	2.650	1.545	1.257	0	1.262
2017	2 635	2 053	2 126	0	2 126

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah

Source : Public Health Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.2.8

Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro), HIV/AIDS, dan Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah

Number of Young People Aged 15 - 24 Who Had Counselling on Reproductive Health, HIV/AIDS, and Family Planning by Subdistrict in Sumba Tengah Regency 2017

Kecamatan Subdistrict	Penyuluhan Kespro Reproductive Health Counselling	Penyuluhan HIV/AIDS HIV/AIDS Counselling	Penyuluhan KB Family Planning Counselling
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Katikutana	100	100	100
2 Katikutana Selatan	50	50	50
3 Umbu Ratu Nggay Barat	50	50	50
4 Umbu Ratu Nggay	50	50	50
5 Mamboro	100	100	100
Sumba Tengah	350	350	350

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Tengah

Source : Population Control, Family Planning, Women Empowerment and Child Protection Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.2.9
 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di
 Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Cases of HIV/AIDS, Sexually Transmitted Infection, Dengue Fever, Diarhea,
 Tuberculosis (TB) and Malaria by Subdistrict in Sumba Tengah Regency*
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	HIV/AIDS HIV/AIDS	IMS Sexually Transmit- ed Infection	DBD Dengue Fever	Diare Diarhea	TB Tubercu- losis	Malaria Malaria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	0	0	0	423	50	74
2 Katikutana Selatan	0	0	0	422	39	194
3 Umbu Ratu Nggay Barat	0	0	0	396	25	167
4 Umbu Ratu Nggay	0	0	0	605	22	182
5 Mambo	1	1	0	280	37	330
Sumba Tengah	1	1	0	2 126	173	947

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah

Source Public Health Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.2.10

Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Family Planning Clinics and Village Family Planning Service Units by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	KKB Family Planning Clinics	PPKBD Village Family Planning Service Units
(1)	(2)	(3)
1 Katikutana	1	7
2 Katikutana Selatan	1	9
3 Umbu Ratu Nggay Barat	3	18
4 Umbu Ratu Nggay	3	18
5 Mamboro	2	13
Sumba Tengah	10	65

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Tengah

Source : *Population Control, Family Planning, Women Empowerment and Child Protection Service of Sumba Tengah Regency*

Tabel / Table 4.2.11
 Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten
 Sumba Tengah
*Number of Eligible Couples and Family Planning Participants by Subdistrict in Sumba
 Tengah Regency*
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Jumlah PUS Eligible Couples	Peserta KB Aktif Family Planning Participants			
		IUD	MOW	MOP	Kondom Condom
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Katikutana	1 629	30	211	-	-
2 Katikutana Selatan	1 425	14	130	-	-
3 Umbu Ratu Nggay Barat	2 317	15	218	1	-
4 Umbu Ratu Nggay	2 290	89	71	2	-
5 Mamboro	2 159	23	95	-	-
Sumba Tengah	9 820	171	725	3	0

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Tengah

Source : Population Control, Family Planning, Women Empowerment and Child Protection Service of Sumba Tengah Regency

Lanjutan Tabel / Continued Table 4.2.11

Kecamatan Subdistrict	Peserta KB Aktif Family Planning Participants			
	Implan Implants	Suntikan Injection	Pil Pill	Jumlah Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Katikutana	232	323	146	942
2 Katikutana Selatan	511	112	26	793
3 Umbu Ratu Nggay Barat	487	532	269	1 522
4 Umbu Ratu Nggay	592	552	44	1 350
5 Mamboro	375	1 058	64	1 615
Sumba Tengah	2 197	2 577	549	6222

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Tengah

Source : Population Control, Family Planning, Women Empowerment and Child Protection Service of Sumba Tengah Regency

4.3.

AGAMA
RELIGION

<https://sambutanwahid.com/ps.g>

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 4.3.1
 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sumba Tengah
Population by Subdistrict and Religion in Sumba Tengah Regenc
 2 0 1 7

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Islam <i>Islam</i>	Protestan <i>Christian</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu <i>Hindu</i>	Budha <i>Buddha</i>	Konghucu	Lainnya <i>Other</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Katikutana	781	7 442	4 182	57	3	-	227
2	Katikutana Selatan	108	9 120	3 202	-	-	-	85
3	Umbu Ratu Nggay Barat	404	21 106	3 986	12	-	-	451
4	Umbu Ratu Nggay	305	12 775	2 052	5	-	-	427
5	Mamboro	3 121	12 449	1 003	4	-	-	877
	Sumba Tengah	4 719	62 892	14 425	78	3	-	2 067

Sumber : Kementrian Agama Kab. Sumba Tengah

Source Religion Ministry of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.3.2
 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Worship Facilities by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2017

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Masjid <i>Mosque</i>	Mushola <i>Mushola</i>	Gereja Protestan <i>Christian Church</i>	Gereja Katholik <i>Catholic Church</i>	Pura <i>Temple</i>	Vihara <i>Vihara</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	1	1	12	5	-	-
2 Katikutana Selatan	-	-	22	9	-	-
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	36	16	1	-
4 Umbu Ratu Nggay	1	1	41	17	-	-
5 Mamboro	3	1	23	7	-	-
Sumba Tengah	5	3	134	54	1	-

Sumber : Kementerian Agama Kab. Sumba Tengah

Source Religion Ministry of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.3.3
 Banyaknya Bencana Alam yang Terjadi menurut Jenis Bencana dan Kecamatan
Number of Natural Disaster by Type of Disaster and Subdistrict
 2017

Kecamatan <i>District</i>	Banjir <i>Flood</i>	Kebakaran /Kilat <i>Fire/Flash</i>	Tanah Longsor <i>Land Slide</i>	Angin Topan <i>Typhoon</i>	Gempa Bumi <i>Earthquake</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Katikutana	-	1	-	-	-
02. Katikutana Selatan	-	2	-	-	-
03. Umu Ratu Nggay Barat	-	4	-	-	-
04. Umu Ratu Nggay	5	4	-	-	-
05. Mamboro	1	6	-	3	-
Sumba Tengah	6	17	-	3	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Tengah
Source : Regional Disaster Mitigation Board of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.3.4
 Banyaknya Korban Bencana Alam menurut Kecamatan dan Jenis Korban
Number of Natural Disaster Victims by District and Kind Of Victims
 2017

Kecamatan <i>District</i>	Meninggal Dunia <i>Fatality</i>	Luka/Sakit <i>Casualty</i>	Hilang <i>Missing</i>
(1)	(4)	(5)	(6)
01. Katikutana	-	-	-
02. Katikutana Selatan	-	-	-
03. Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-
04. Umbu Ratu Nggay	-	-	-
05. Mamboro	-	-	-
Sumba Tengah	-	-	-

Keterangan : Tidak ada korban jiwa
Remarks

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Tengah
Source : Regional Disaster Mitigation Board of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.3.5
 Banyaknya Korban Bencana Alam menurut Kecamatan dan Jenis Kerusakan Rumah
Number of Natural Disaster Victims by District and Kind of House Damaged
 2017

Kecamatan <i>District</i>	Rusak Berat/Total <i>Totally/Severely Damaged</i>	Rusak Sedang <i>Damaged</i>	Rusak Ringan <i>Lightly Damaged</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Katikutana	-	-	-
02. Katikutana Selatan	2	-	-
03. Umbu Ratu Nggay Barat	4	-	-
04. Umbu Ratu Nggay	4	-	-
05. Mamboro	6	-	-
Sumba Tengah	16	-	-

Keterangan : Dalam Satuan Rumah
Remarks

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Tengah
Source : Regional Disaster Mitigation Board of Sumba Tengah Regency

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

44.

KRIMINALITAS /
CRIME

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 4.4.1
 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Reported Criminal Cases by Subdistrict Police Office in Sumba Tengah
 Regency
 2013 - 2017*

Kepolisian Sektor <i>Subdistrict Police Office</i>	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Katikutana	52	113	127	55	89
2 Mamboro	14	23	13	14	16
3 Umbu Ratu Nggay	11	15	31	30	21
Jumlah	77	151	171	99	126

Sumber : Kepolisian Resort Kabupaten Sumba Barat

Source : *Police Resort of Sumba Barat Regency*

Tabel / Table 4.4.2
 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten
 Sumba Tengah
*Percentage of Crime Clearance Rate by District Police Office in Sumba Tengah
 Regency
 2013 - 2017*

Kepolisian Sektor Subdistrict Police Office	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Katikutana	19,23	0,88	9,45	18,21	53,5
2 Mamboro	7,14	13,04	15,38	7,14	56,25
3 Umbu Ratu Nggay	0,00	6,67	12,90	11,45	27,3
Sumba Barat	14,29	3,31	10,53	12,67	45,7

Sumber : Kepolisian Resort Kabupaten Sumba Barat

Source : Police Resort of Sumba Barat Regency

Tabel / Table 4.4.3
 Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas Dirinci menurut Bulan
Number of Traffic Accident by Month
 2017

Bulan <i>Month</i>	Jumlah Kece- lakaan <i>Total Accident</i>	Korban / <i>Victims</i>			Kerugian <i>loss</i> (Rp.000.000)
		Mati <i>Death</i>	Luka Berat <i>Seriously Injured</i>	Luka Ringan <i>Light Injured</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Januari/ <i>January</i>	1	-	-	1	-
02. Februari/ <i>February</i>	-	-	-	-	-
03. Maret/ <i>March</i>	-	-	-	-	-
04. April/ <i>April</i>	-	-	-	-	-
05. Mei/ <i>May</i>	-	-	-	-	-
06. Juni/ <i>June</i>	-	-	-	-	-
07. Juli/ <i>July</i>	-	-	-	-	-
08. Agustus/ <i>August</i>	1	-	-	1	0,3
09. September/ <i>September</i>	1	1	-	-	-
10. Oktober/ <i>October</i>	2	2	-	-	11,5
11. November/ <i>November</i>	-	-	-	-	-
12. Desember/ <i>December</i>	1	-	1	-	0,2
Jumlah/ <i>Total</i>	6	3	1	2	12

Sumber : Kepolisian Resort Sumba Barat
 Source

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

4.5.

KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA /
POVERTY AND HUMAN DEVELOPMENT

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 4.5.1
 Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Households by Subdistrict and Household Classification in Sumba Tengah Regency
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Pra Sejahtera Pre- prosperous Family	Keluarga Sejahtera Prosperous Family				Jumlah Total
		I	II	III	III+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	1 579	526	175	24	-	2 304
2 Katikutana Selatan	2 260	424	128	28	-	2 840
3 Umbu Ratu Nggay Barat	3 974	389	242	30	-	4 635
4 Umbu Ratu Nggay	3 237	343	54	7	-	3 641
5 Mamboro	3 487	59	6	-	-	3 552
Sumba Tengah	14 537	1 741	605	89	0	16 972

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Tengah

Source : Population Control, Family Planning, Women Empowerment and Child Protection Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 4.5.2
 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Sumba Tengah
Poverty Line and Number of Poor People in Sumba Tengah Regency
 2010 - 2017

Tahun Year	Garis Kemiskinan Poverty Line (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin Number of Poor People	
		Jumlah (000) Total (000)	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	164 489	21,30	34,05
2011	184 100	20,60	32,10
2012	206 049	20,90	32,10
2013	216 218	21,30	31,93
2014	227 297	21,26	31,40
2015	233 078	24,69	36,22
2016	250 589	25,34	36,55
2017	271 365	25,37	36,01

Catatan :

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Source : National Socio Economic Survey kor 2017

Tabel / Table 4.5.3
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumba Tengah
Human Development Index Component of Sumba Tengah Regency
2016-2017

Komponen <i>Component</i>	2016	2017
(1)	(2)	(2)
1. Angka Harapan Hidup (tahun) <i>Life Expectancy at Birth (year)</i>	67,73	67,74
2. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) <i>Expected Years Schooling (year)</i>	11,93	12,31
3. Rata-rata Lamanya Sekolah (tahun) <i>Mean Years Schooling (year)</i>	5,21	5,51
4. Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rp) <i>Per Capita Expenditure (thousands rp)</i>	5 907	5 946
Indeks Pembangunan Manusia <i>Human Developemnet Index</i>	58,52	59,39

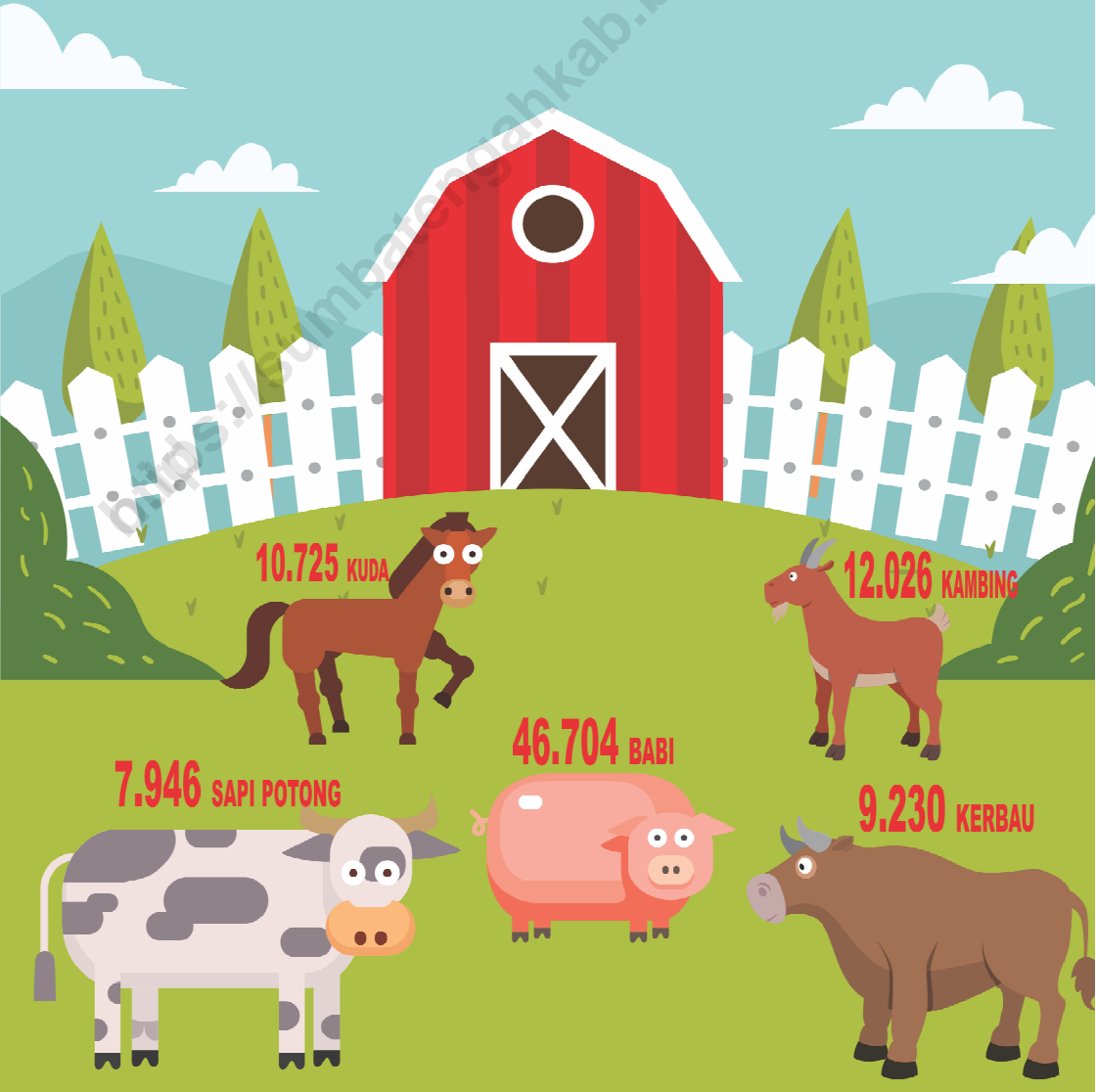
Catatan/Note: Tahun 2017 Sumba Tengah peringkat ke 19 dari 22 Kabupaten/Kota di NTT

Sumber : IPM NTT 2017
Source IPM NTT 2017

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

POPULASI TERNAK SUMBA TENGAH

2017



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

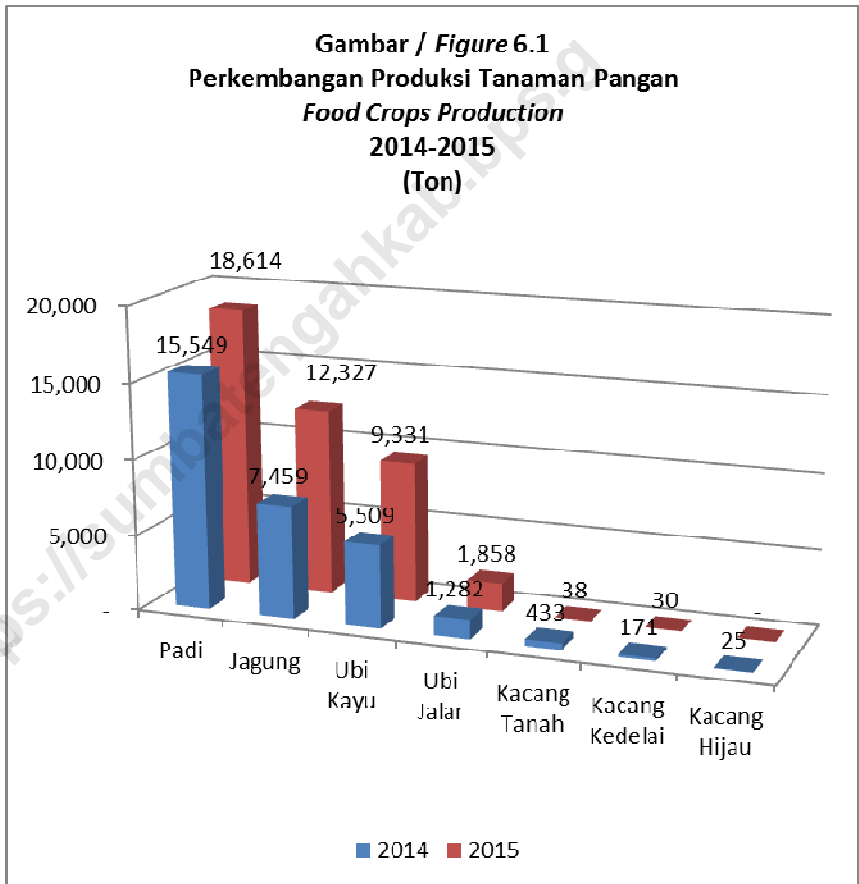
1. Pengumpulan data Statistik Pertanian (SP) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.
2. Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas. Sementara data produksi diperoleh dari perkalian luas panen dan produktivitas.
3. Data produksi tanaman pangan yang disajikan mencakup:
 - a. Tanaman padi (padi sawah dan padi ladang) berupa gabah kering giling
 - b. Jagung berupa pipilan kering
 - c. Kedelai dan kacang tanah berupa biji kering
 - d. Ubi kayu dan ubi jalar berupa umbi basah
4. Data statistik perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan data sekunder yang bersumber dari SKPD terkait.

TECHNICAL NOTES

1. *The data collecting of Agricultural Statistics is carried out by Statistics Indonesia in cooperation with the Directorate General of Food Crops, The Ministry of Agriculture.*
2. *The main food crops data collected consist of area harvested and productivity. Food crops production is generated by area harvested multiplied by productivity.*
3. *Food crops production covers:*
 - a. *Paddy (wetland paddy and dryland paddy), presented in the form of dry unhusked rice*
 - b. *Maize, presented in the form of dry loose maize*
 - c. *Soybeans and peanut, presented in the form of dry sheels crops*
 - d. *Cassava and sweet potatoes, presented in the form of fresh roots*
4. *Data on estate, livestock, forestry and fishery is a secondary data taken from the other institution.*

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Gambar / Figure 6.1
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan
Food Crops Production
2014-2015
(Ton)



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

5.1.

TANAMAN PANGAN /
FOOD CROPS

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 5.1.1
 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Sumba Tengah (hektar)
Area of Wetland by Subdistrict and Type of Irrigation in Sumba Tengah Regency
 2017

	Kecamatan Subdistrict	Irigasi <i>Irrigation</i>	Non Irigasi <i>Non Irrigation</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Katikutana	300	1 001	1 301
2	Katikutana Selatan	369	1 713	2 082
3	Umbu Ratu Nggay Barat	647	1 329	1 976
4	Umbu Ratu Nggay	558	720	1 278
5	Mamboro	818	146	964
	Sumba Tengah	2 692	4 909	7 601

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah
Source : Food Crops, Horticulture and Estate Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.1.2

Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak
 Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah (hektar)
*Area of Dry Field/Garden, Shifting Cultivation, Land and Temporarily Unused Land by
 Subdistrict in Sumba Tengah Regency (hectar)*
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Tegal/Kebun Dry Field/Garden	Ladang/Huma Shifting Cultivation	Sementara Tidak Diusahakan Temporarily Unused
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Katikutana	1 040	1 000	500
2 Katikutana Selatan	1 713	652	7 425
3 Umbu Ratu Nggay Barat	2 759	531	9 243
4 Umbu Ratu Nggay	2 679	2 967	25 429
5 Mamboro	3 000	1 704	1 280
Sumba Tengah	11 191	6 854	43 877

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah
 Source : *Food Crops, Horticulture and Estate Service of Sumba Tengah Regency*

Tabel / Table 5.1.3
 Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah (hektar)
Harvested Area of Wetland and Dryland Paddy by Subdistrict in Sumba Tengah Regency (hectar)
 2 0 1 7

	Kecamatan Subdistrict	Padi Sawah Wetland Paddy	Padi Ladang Dryland Paddy
	(1)	(2)	(3)
1	Katikutana	1 175	18
2	Katikutana Selatan	1 444	380
3	Umbu Ratu Nggay Barat	2 146	214
4	Umbu Ratu Nggay	1 109	129
5	Mamboro	483	256
	Sumba Tengah	6 357	997

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah
 Source : Food Crops, Horticulture and Estate Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.1.4

Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah (Ha)
*Harvested Area of Maize, Soybean, Peanut, Mungbean, Cassava, and Sweet Potato by
Subdistrict in Sumba Tengah Regency (Ha)*
2017

Kecamatan Subdistrict	Jagung Maize	Kedelai Soybean	Kacang Tanah Peanut	Kacang Hijau Mungbean	Ubi Kayu Cassava	Ubi Jalar Sweet Potato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	335	26	-	-	52	25
2 Katikutana Selatan	561	94	-	44	94	38
3 Umbu Ratu Nggay Barat	640	101	-	33	80	30
4 Umbu Ratu Nggay	3 115	65	5	4	282	9
5 Mamboro	1 409	153	15	167	168	-
Sumba Tengah	6 060	439	20	248	676	102

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah
Source : Food Crops, Horticulture and Estate Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.1.5
 Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah (Ton)
Production of Wetland and Dryland Paddy by Subdistrict in Sumba Tengah Regency (Ton)
 2017

	Kecamatan Subdistrict	Padi Sawah Wetland Paddy	Padi Ladang Dryland Paddy
	(1)	(2)	(3)
1	Katikutana	1 937	13
2	Katikutana Selatan	3 109	760
3	Umbu Ratu Nggay Barat	2 988	327
4	Umbu Ratu Nggay	496	129
5	Mamboro	1 083	307
	Sumba Tengah	9 613	1 537

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah
 Source : Food Crops, Horticulture and Estate Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.1.6

Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah (Ton)
Production Area of Maize, Soybean, Peanut, Mungbean, Cassava, and Sweet Potato by Subdistrict in Sumba Tengah Regency (Ton)
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Jagung Maize	Kedelai Soybean	Kacang Tanah Peanut	Kacang Hijau Mungbean	Ubi Kayu Cassava	Ubi Jalar Sweet Potato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	314	11	-	-	-	-
2 Katikutana Selatan	842	68	-	-	-	-
3 Umbu Ratu	1 684	6	-	-	-	-
4 Nggay Barat	2 212	-	-	-	-	-
5 Umbu Ratu Nggay	1 946	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	6 998	85	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah
 Source : Food Crops, Horticulture and Estate Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.1.7
 Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah (Kw/Ha)
Productivity of Wetland and Dryland Paddy by Subdistrict in Sumba Tengah Regency (Kw/Ha)
 2017

	Kecamatan Subdistrict	Padi Sawah Wetland Paddy	Padi Ladang Dryland Paddy
	(1)	(2)	(3)
1	Katikutana	16,5	7,4
2	Katikutana Selatan	21,5	20
3	Umbu Ratu Nggay Barat	13,9	15,3
4	Umbu Ratu Nggay	4,5	10
5	Mamboro	22,4	12
	Sumba Tengah	15,1	15,4

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah
 Source : Food Crops, Horticulture and Estate Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.1.8

Produktivitas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah (Kw/Ha)

Productivity of Maize, Soybean, Peanut, Mungbean, Cassava, and Sweet Potato by Subdistrict in Sumba Barat Regency (Kw/Ha)

2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Jagung Maize	Kedelai Soybean	Kacang Tanah Peanut	Kacang Hijau Mungbean	Ubi Kayu Cassava	Ubi Jalar Sweet Potato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	9,4	4,3	-	-	-	-
2 Katikutana Selatan	15	7,2	-	-	-	-
3 Umbu Ratu Nggay Barat	26,3	0,5	-	-	-	-
4 Umbu Ratu Nggay	7,1	0	-	-	-	-
5 Mamboro	13,8	0	-	-	-	-
Sumba Tengah	11,5	1,9	-	-	-	-

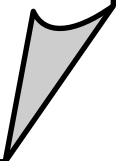
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah

Source : Food Crops, Horticulture and Estate Service of Sumba Tengah Regency

52.

HORTIKULTURA

HORTICULTURE



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 5.2.1
 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten
 Sumba Tengah
*Harvested Area of Vegetables by Subdistrict and Kind of Plant in Sumba Tengah
 Regency
 2 0 1 7*

Kecamatan Subdistrict	Bawang Merah Shallot	Cabai Chilli	Kentang Potato	Kubis Cabbage	Petsai Chinese Cabbage	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	-	-	-	-	-	-
2 Katikutana Selatan	-	-	-	-	-	-
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-	-	-	-
4 Umbu Ratu Nggay	-	-	-	-	-	-
5 Mamboro	-	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-

Catatan : Data Tidak Ada

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah
Source Food Crops, Horticulture, and Estate Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.2.2

Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Sumba Tengah

Production of Vegetables by Subdistrict and Kind of Plant in Sumba Tengah Regency 2017

Kecamatan Subdistrict	Bawang Merah Shallot	Cabai Chilli	Kentang Potato	Kubis Cabbage	Petsai Chinese Cabbage	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	-	-	-	-	-	-
2 Katikutana Selatan	-	-	-	-	-	-
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-	-	-	-
4 Umbu Ratu Nggay	-	-	-	-	-	-
5 Mamboro	-	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-

Catatan : Data Tidak Ada

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah

Source : Food Crops, Horticulture, and Estate Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.2.3
 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Sumba Tengah
Production of Fruits by Subdistrict and Kind of Fruit in Sumba Tengah Regency
 2017

Kecamatan Subdistrict	Mangga Mango	Durian Durian	Jeruk Orange	Pisang Banana	Pepaya Papaya	Nanas Pine- apple	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Katikutana	-	-	-	-	-	-	-
2 Katikutana Selatan	-	-	-	-	-	-	-
3 Umu Ratu Nggay Barat	-	-	-	-	-	-	-
4 Umu Ratu Nggay	-	-	-	-	-	-	-
5 Mamboro	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-

Catatan : Data Tidak Ada

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah
 Source : Food Crops, Horticulture, and Estate Service of Sumba Tengah Regency

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

53.

PERKEBUNAN /
ESTATE CROPS

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 5.3.1
 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten
 Sumba Tengah (hektar)
*Planted Area of Estate Crops by Subdistrict and Kind of Crop in Sumba Tengah
 Regency (hectare)*
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Kelapa Coconut	Jambu Mete Cashew	Kopi Coffee	Kakao Cocoa	Kemiri Candlenut	Pinang Betel palm	Asam Tamarind
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Katikutana	379	49	464,9	80	87	265	-
2 Katikutana Selatan Umbu	414	461	734,9	159,5	104	254	47
3 Ratu Nggay Barat Umbu	498	121	818,8	215	268	1 154,5	-
4 Ratu Nggay	1 315	886	676,5	168	331	1 138	-
5 Mambooro	1 943	1 777	609,9	426,5	433	225	55
Sumba Tengah	4 549	3 294	3,305	1 049	1 223	3 036,5	102

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah
 Source Food Crops, Horticulture, and Estate Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.3.2

Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumba Tengah (ton)

Production of Estate Crops by Subdistrict and Kind of Crop in Sumba Tengah Regency (ton)
2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Kelapa Coconut	Jambu Mete Cashew	Kopi Coffee	Kakao Cocoa	Kemiri Candlenut	Pinang Betel palm	Asam Tamarind
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Katikutana	1 210	4	134,81	7,01	-	17	-
2 Katikutana Selatan	106	22	212,42	38,40	-	20	3
3 Umbu Ratu	124	7	117,71	126,57	36	95	-
4 Nggay Barat Umbu	133	56	146,76	102,11	96	57	-
5 Ratu Nggay Mamboro	266	415	266,9	415	119	99	6
Sumba Tengah	1 839	504	878,6	504	251	288	9

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Sumba Tengah

Source : Food Crops, Horticulture, and Estate Service of Sumba Tengah Regency

54.

PETERNAKAN /
LIVESTOCK

<https://sumbatengahkab.bps.g>

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 5.4.1

Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sumba Tengah
Livestock Population by Subdistrict and Kind of Livestock in Sumba Tengah Regency
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Sapi Perah Dairy Cattle	Sapi Potong Beef Cattle	Kerbau Buffalo	Kuda Horse	Kambing Goat	Domba Sheep	Babi Pig
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Katikutana	-	109	1 766	2 233	322	-	6 084
2 Katikutana Selatan	-	473	1 414	762	779	-	7 002
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	637	1 739	1 533	1 885	-	7 442
4 Umbu Ratu Nggay	-	4 107	2 454	4 453	6 709	-	16 097
5 Mamboro	-	2 620	1 857	1 744	2 331	-	10 079
Sumba Tengah		7 946	9 230	10 725	12 026	-	46 704

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumba Tengah
Source Livestock and Animal Health Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.4.2

Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Sumba Tengah
Poultry Population by Subdistrict and Kind of Poultry in Sumba Tengah Regency
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Ayam Kampung Native Chicken	Ayam Petelur Layer	Ayam Pedaging Broiler	Itik/Itik Manila Duck/Muscovy Duck
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Katikutana	6 341	-	10 000	5281
2 Katikutana Selatan	15 000	-	1 000	3 350
3 Umbu Ratu Nggay Barat	18 422	-	10 000	1 315
4 Umbu Ratu Nggay	9 813	-	800	1 314
5 Mamboro	20 802	-	2 400	850
Sumba Tengah	70 378	-	24 200	12 110

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumba Tengah
 Source : Livestock and Animal Health Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.4.3
 Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten
 Sumba Tengah
Livestock Slaughtered by Sub District and Kind of Livestock in Sumba Tengah Regency
 2 0 1 7

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Sapi Potong <i>Beef Cattle</i>	Kerbau <i>Buffalo</i>	Kuda <i>Horse</i>	Kambing <i>Goat</i>	Domba <i>Sheep</i>	Babi/Pig
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Katikutana	40	40	8	95	-	-
2	Katikutana Selatan	55	30	15	95	-	-
3	Umbu Ratu Nggay Barat	32	36	15	102	-	-
4	Umbu Ratu Nggay	40	25	12	95	-	-
5	Mamboro	39	35	7	101	-	-
	Sumba Tengah	206	166	57	488	-	-

Catatan : Pemotongan ternak di luar RPH

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumba Tengah

Source : *Livestock and Animal Health Service of Sumba Tengah Regency*

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

55.

PERIKANAN /
FISHERY

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 5.5.1
 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di
 Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Fish Capture Households by Subdistrict and Subsector in Sumba Tengah
 Regency*
 2 0 1 6 – 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Perikanan Laut <i>Marine Fisheries</i>		Perairan Umum <i>Inland Water</i>		Jumlah <i>Total</i>	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	-	-	90	90	90	90
2 Katikutana Selatan	110	150	150	150	260	300
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	260	260	260	260
4 Umbu Ratu Nggay	580	1 031	130	130	710	1 161
5 Mambo	430	980	110	110	540	1 090
Sumba Tengah	1 120	2 161	740	740	1 860	2 901

Catatan :

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Sumba Tengah

Source : *Fishery Service of Sumba Tengah Regency*

Tabel / Table 5.5.2

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sumba Tengah (ton)

Production of Fish Capture by Subdistrict and Subsector in Sumba Tengah Regency (ton)

2016 – 2017

Kecamatan Subdistrict	Perikanan Laut Marine Fisheries		Perairan Umum Inland Water		Jumlah Total	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	-	-	8,00	9	8,00	9
2 Katikutana Selatan	2 717,53	2 817	12,00	13	2 729,53	2 830
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	19,00	24	19,00	24
4 Umbu Ratu Nggay	3 178,67	3 596	15,00	21	3 193,67	3 617
5 Mamboro	4 893,40	4 912	10,00	11	4 903,40	4 923
Sumba Tengah	10 789,60	11 325	64,00	78	10 853,60	11 403

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Sumba Tengah

Source : Fishery Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.5.3
 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di
 Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Aquaculture Households by Subdistrict and Type of Aquaculture in Sumba
 Tengah Regency
 2 0 1 7*

Kecamatan Subdistrict	Budidaya Laut Marine Culture	Tambak Brackish Water Pond	Kolam Fresh Water Pond	Keramba, Jaring Apung Cage, Floating Cage Net	Sawah Paddy Field	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	-	-	50	-	-	50
2 Katikutana Selatan	-	-	80	-	-	80
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	180	10	-	190
4 Umbu Ratu Nggay	110	-	200	-	-	310
5 Mamboro	30	-	100	20	-	150
Sumba Tengah	140	0	610	30	0	780

Catatan :Data kategori keramba dan jaring apung digabung

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Sumba Tengah

Source : Fishery Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.5.4

Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sumba Tengah (ton)

Production of Fish Capture by Subdistrict and Subsector in Sumba Tengah Regency (ton)
2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Budidaya Laut Marine Culture	Tambak Brackish Water Pond	Kolam Fresh Water Pond	Keramba, Jaring Apung Cage, Floating Cage Net	Sawah Paddy field	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	-	-	13	0	-	13
2 Katikutana Selatan	-	-	17	0	-	17
3 Uumbu Ratu Nggay Barat	-	-	32	1,5	-	33,5
4 Uumbu Ratu Nggay	52,3	-	67	0	-	119,3
5 Mamboro	7	2	27	1	-	37
Sumba Tengah	59,3	2	156	2,5	0	219,8

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Sumba Tengah
Source : Fishery Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 5.5.5
 Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Fishing Boats by Subdistrict and Type of Boat in Sumba Tengah Regency
 2 0 1 7

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Perahu Tanpa Motor, Jukung <i>Nonpowered Boat</i>	Perahu Motor Tempel <i>Outboard Motorboat</i>	Kapal Motor <i>Inboard Motorboat</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Katikutana	-	-	-
2 Katikutana Selatan	23	11	4
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-
4 Umbu Ratu Nggay	96	25	14
5 Mambo	268	53	42
Sumba Tengah	387	89	60

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Sumba Tengah

Source : Fishery Service of Sumba Tengah Regency

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

5.6.

KEHUTANAN /
FORESTY

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 5.6.1
 Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
 (hektar)
Forest and Inland Water Area by Subdistrict in Sumba Tengah Regency (hectare)
 2 0 1 7

Kecamatan Subdistrict	Hutan Lindung Protection Forest	Suaka Alam dan Pelestarian Alam Sanctuary Reserve and Nature Conservation Area	Hutan Produksi Production Forest			Jumlah Luas Hutan dan Perairan Total Forest and Water Area
			Terbatas Limited	Tetap Permanent	Dapat Dikonve rsi Conver tible	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Katikutana	-	-	-	-	-	-
2 Katikutana Selatan Umbu	-	-	-	-	-	-
3 Ratu Nggay Barat Umbu	-	-	-	-	-	-
4 Ratu Nggay	-	-	-	-	-	-
5 Mamboro	-	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	4 619,3	33 598,42	21 582,04	3 793,76	-	63 593,52

Catatan : Sebagian hutan lintas kecamatan. Kawasan Hutan Manupeu Tanadaru merupakan hutan konservasi/suaka alam dan pelestarian alam. Belum termasuk luas perairan.

Sumber : UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kab. Sumba Tengah

Source Forestry Service of Sumba Tengah Regency

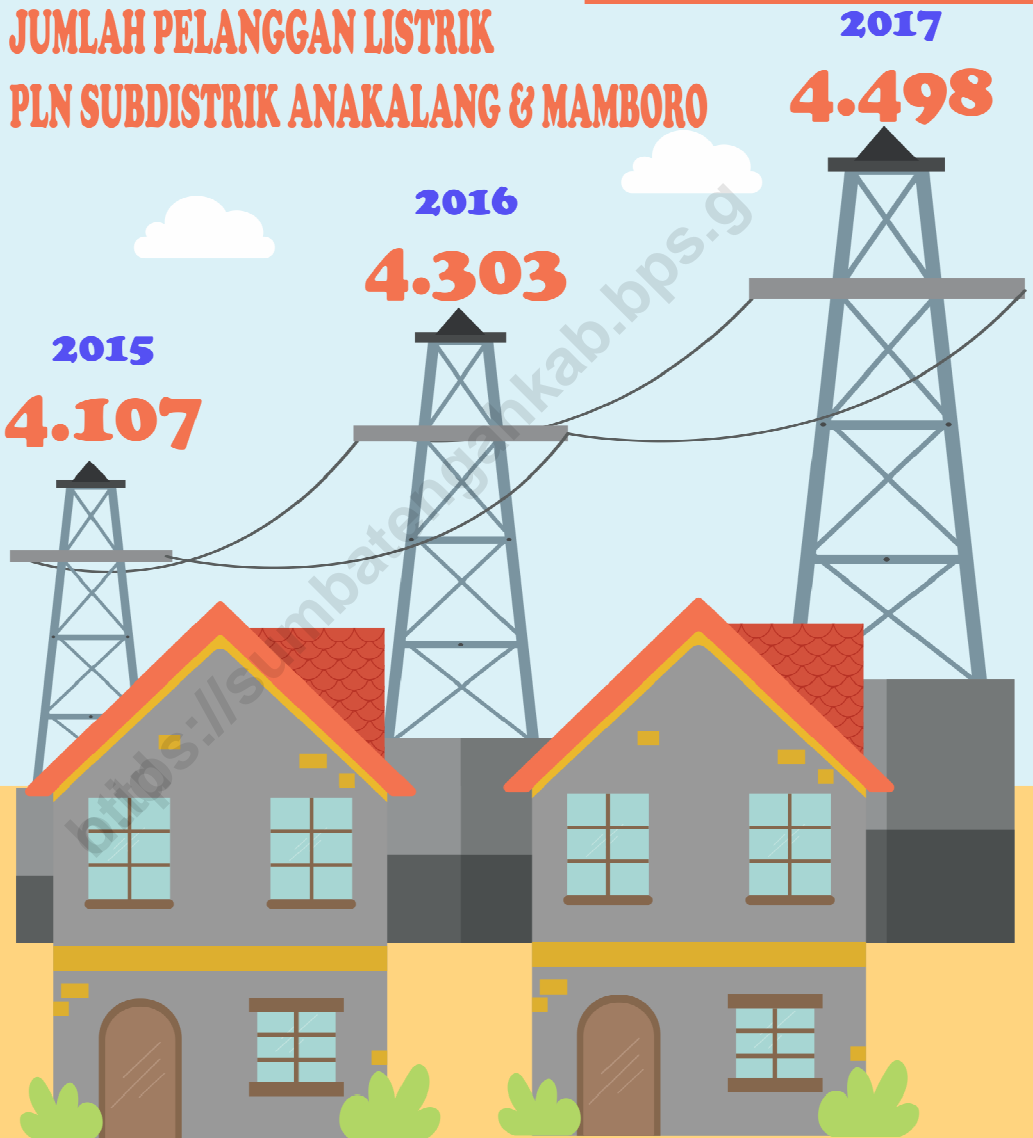
Tabel / Table 5.5.2
 Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Sumba Tengah (m³)
 Timber Production by Type of Product in Sumba Tengah Regency (m³)
 2 0 1 7

Bulan Month	Rimba Campuran	Mahoni	Nangka	Mangga	Gmelina
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	8,27	-	-	-
Oktober	21,01	2,48	-	0,003	0,004
November	-	-	-	-	-
Desember	0,08	0,33	-	-	4,67
2017	21,09	11,08	-	0,003	4,674

Sumber : UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kab. Sumba Tengah

Source : Forestry Service of Sumba Tengah Regency

**JUMLAH PELANGGAN LISTRIK
PLN SUBDISTRIK ANAKALANG & MAMBORO**

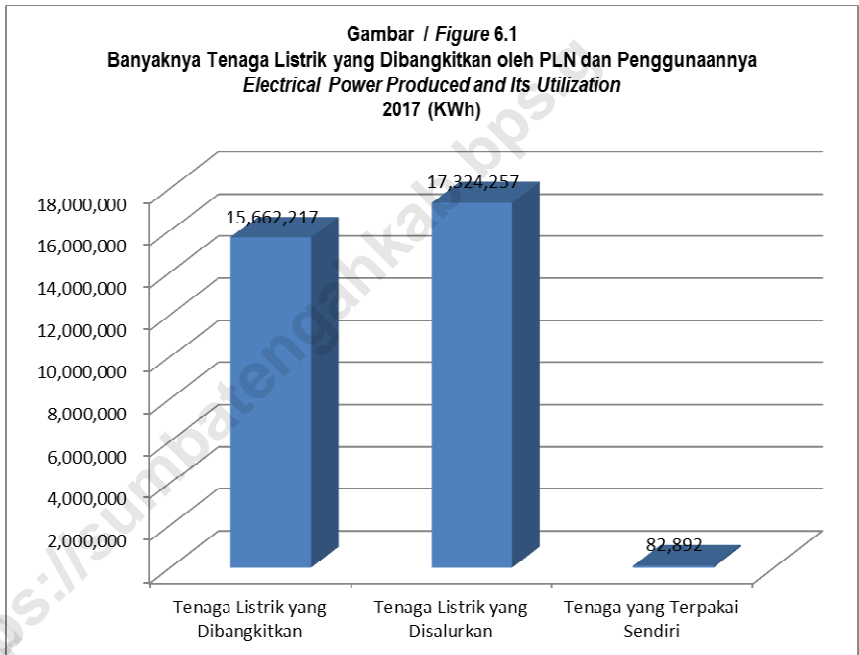


<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS**TECHNICAL NOTES**

1. Perusahaan/usaha industri adalah unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
 2. Industri pengolahan dikelompokkan dalam 4 golongan, yakni industri besar (100 orang pekerja atau lebih), industri sedang / menengah (20-99 pekerja), industri kecil (5-19 pekerja) dan industri mikro (1-4 pekerja).
 3. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air.
 4. Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah perusahaan umum milik Negara yang mempunyai aktivitas kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.
 5. Perusahaan air bersih adalah perusahaan yang kegiatannya menampung, menjernihkan, dan menyalurkan air bersih dari terminal air melalui saluran air, pipa atau mobil tangki kepada rumah tangga, perusahaan industri atau lainnya.
1. *A manufacturing establishment is defined as a production unit engaged in economic activity, producing goods and services, located in a certain location, keeping a business record concerning the production and cost structure, and having a person or more that are responsible to those activities.*
 2. *Manufacturing industries are divided into: large scale manufacturing (100 employees or more), medium scale manufacturing (20-99 employees), small scale manufacturing (5-19 employees), and micro scale manufacturing (1-4 employees).*
 3. *Mining is an activity in taking valued quarrying material from within the earth layer, under the earth surface and under water level.*
 4. *State electricity company (PLN) is a state owned company that has activities for electricity production, transmission and distribution.*
 5. *The water supply company (PDAM) is a company with several activities such as collecting, purifying, and distributing water to household, industries and other users.*

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

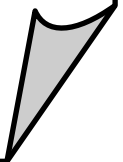


<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

6.1.

INDUSTRI /

INDUSTRY



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 6.1.1
 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri di
 Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Establishment, Employees, and Production Value by Industrial Classification
 in Sumba Tengah Regency
 2 0 1 7*

Klasifikasi Industri <i>Industrial Classification</i>	Perusahaan <i>Establishments</i>	Tenaga Kerja <i>Employee</i>	Nilai Produksi <i>Production Value*</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengembangan Non Agro	35	167	-
2. Agro Industri	70	275	-
3. Tenunan	42	210	-
4. Anyaman	35	250	-
5. Meubeleir	18	74	-
6. Bengkel	24	72	-
7. Emas dan Perak	5	38	-
Sumba Tengah	229	1 086	-

Keterangan : Jumlah Perusahaan adalah jumlah Industri Kecil Mengah (IKM). Data nilai produksi belum tersedia

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumba Tengah
 Source : *Cooperative, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of Sumba Tengah Regency*

Tabel / Table 6.1.2
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sumba Tengah
Construction Costliness Index of Sumba Tengah Regency
2010 -2017

Tahun Year	Nilai Value
(1)	(2)
2010	102,88
2011	102,27
2012	82,14
2013	92,56
2014	88,99
2015	90,07
2016	98,79
2017	100,78

Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2017

Source Province and Regency/Municipality Construction Costliness Index 2017

6.2.

ENERGI /
ENERGY

<https://sumba.com/abpps.g>

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 6.2.1
 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada
 Cabang/Ranting PLN Kabupaten Sumba Barat
*Installed Capacity, Production, and Distribution of Electricity of State Electricity
 Company at Branch Level in Sumba Barat Regency*
 2014-2017

Tahun/Year	Daya Terpasang <i>Installed Capacity (KW)</i>	Produksi Listrik <i>Production (KWh)</i>	Listrik Terjual <i>Electricity Sold (KWh)</i>	Dipakai Sendiri <i>Own Usage (KWh)</i>	Susut/Hilang <i>Shrunked (KWh)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2014	4 311	11 405 984	11 257 575	148 409	-
2015	4 096	11 240 509	11 124 905	115 604	-
2016	5 120	13 070 061	16 278 243	143 041	-
2017	5 482	15 662 217	17 324 257	82 892	-

Catatan :

Sumber : PT. PLN (Persero) Ranting Waikabubak

Source *State Electrical Company of Sub Region Waikabubak*

Tabel / Table 6.2.2

Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Sub Ranting (SR) di PLN Kabupaten Sumba Barat
Number of Registered Electricity Costumers by SR in Sumba Barat Regency PLN
 2015 - 2017

Kecamatan Subdistrict	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(3)
1 Lamboya	784	824	875
2 Wanokaka	367	388	426
3 Kota Waikabubak	6 832	7 200	7 535
4 Anakalang	3 151	3 320	3 511
5 Mambo	956	983	987
Jumlah/Total	12 090	12 715	13 334

Catatan : Data

Sumber : PT. PLN (Persero) Ranting Waikabubak

Source : State Electrical Company of Sub Region Waikabubak

Tabel / Table 6.2.3
 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Customer and Distributed Clean Water by Type of Customers in Sumba Tengah Regency
 2 0 1 7

Pelanggan <i>Customers</i>	Pelanggan <i>Customers</i>	Air Disalurkan <i>Distributed Water</i> (m ³)	Nilai/Value (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosial/ <i>Social</i>	-	-	-
Rumah Tangga/ <i>Household</i>	-	-	-
Instansi Pemerintah <i>Government</i> <i>Institution</i>	-	-	-
Niaga/ <i>Trade</i>	-	-	-
Industri/ <i>Industry</i>	-	-	-
Khusus/ <i>Exclusive</i>	-	-	-
Jumlah/ <i>Total</i>	-	-	-

Catatan : PDAM belum ada

Sumber :

Source

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

JUMLAH SARANA PERDAGANGAN SUMBA TENGAH 2017

31 WARUNG



9 TOKO



1.270 KIOS



11 PASAR

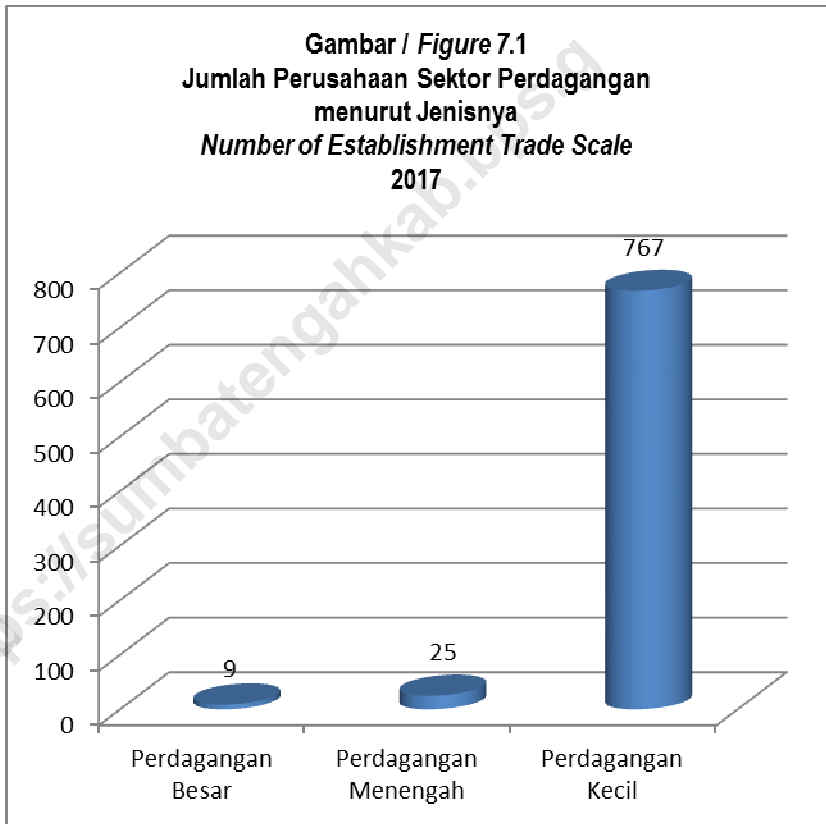


<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS**TECHNICAL NOTES**

- | | |
|---|---|
| 1. Usaha sektor perdagangan berdasarkan jenisnya terbagi atas perdagangan besar, perdagangan sedang dan perdagangan kecil. | 1. <i>Establishment of trade sector is divided into large scale, medium scale, and small scale establishment.</i> |
| 2. Jumlah PT, CV, Firma dan perusahaan perorangan lainnya berdasarkan jumlah pendaftaran /perpanjangan izin usaha pada tahun itu. | 2. <i>The number of PT, CV, Firma and other individual companies shall be based on the number of registration / renewal of the business license in that year.</i> |

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 7.1
 Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Establishments by Type of Business Entity in Sumba Tengah Regency
 2015 - 2017

Tipe Badan Hukum <i>Type of Business Entity</i>	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Perseroan Terbatas	2	7	14
CV/Firma	92	91	92
Koperasi	52	69	81
Perorangan	29	30	31
Lainnya	3	5	5
Jumlah/Total	178	202	223

Sumber : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Source Transmigration, Employment and Investment Service and Cooperative, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 7.2
 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Merchants by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2017

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Pedagang Besar <i>Wholesaler</i>	Pedagang Menengah <i>Medium Trader</i>	Pedagang Kecil <i>Small Trader</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Katikutana	6	16	177
2 Katikutana Selatan	-	-	156
3 Umbu Ratu Nggay Barat	1	5	135
4 Umbu Ratu Nggay	1	-	128
5 Mamboro	1	4	171
Sumba Tengah	9	25	767

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumba Tengah
 Source : *Cooperative, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade Service of Sumba Tengah Regency*

Tabel / Table 7.3
 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Trading Facilities by Type of Facility in Sumba Tengah Regency
 2013 - 2017

Sarana Perdagangan <i>Trading Facilities</i>	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pasar/Market	7	7	9	11	11
Toko/Store	3	4	4	5	9
Kios	794	955	1 245	1 250	1 270
Warung*)	13	18	22	24	31
Jumlah/Total	817	984	1 280	1 290	1 321

Keterangan : *) Warung Makan

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumba Tengah

Source : Cooperative, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 7.4

Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
*Number of Cooperatives by Type of Cooperative and Subdistrict in Sumba Tengah
 Regency
 2017*

	Kecamatan Subdistrict	KUD	KSP	KOPKAR	Lainnya Other	Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Katikutana	1	15	-	-	16
2	Katikutana Selatan	-	14	-	-	14
3	Umbu Ratu Nggay Barat	-	23	-	-	23
4	Umbu Ratu Nggay	-	18	-	-	18
5	Mamboro	1	9	-	-	10
	Sumba Tengah	2	79			81

Keterangan :

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumba Tengah

Source : Cooperative, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of Sumba Tengah Regency

JUMLAH HOTEL DI SUMBA TENGAH 2017



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

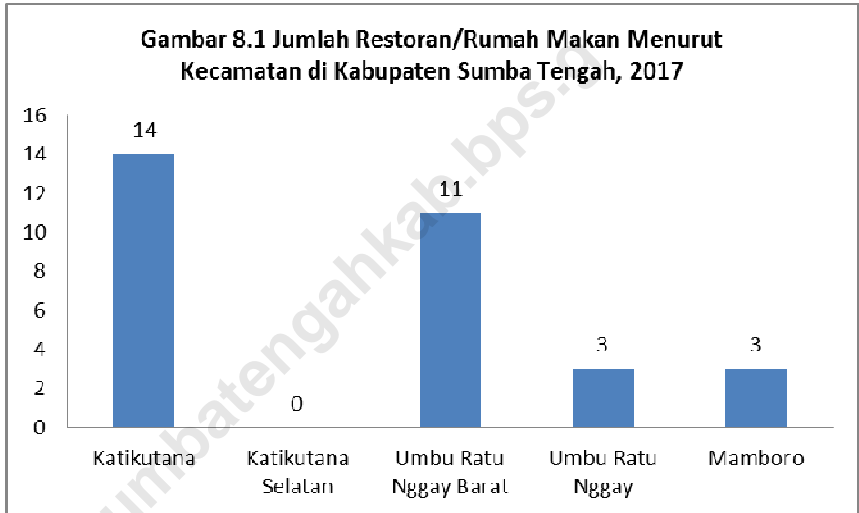
PENJELASAN TEKNIS

1. Wisatawan mancanegara ialah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan itu tidak lebih dari 12 bulan. Definisi ini mencakup:
 - a. Wisatawan (turis), yaitu setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam untuk berlibur, rekreasi, olah raga, bisnis, menghadiri pertemuan, studi atau kunjungan dengan alasan kesehatan.
 - b. Excurcionista, yaitu setiap pengunjung seperti di atas yang tinggal kurang dari 24 jam, termasuk cruise passenger (tidak menginap di akomodasi yang tersedia, misalnya kapal laut).

TECHNICAL NOTES

1. *A foreign visitor is any person visiting a country other than his usual place of residence, in order not to earn some incomes in the country visited for less than 12 months. This definition covers:*
 - a. *Tourist, is a visitor staying at least 24 hours for these purpose: pleasure, recreation, sports, business, visiting friends and relatives, study or visit for health reason.*
 - b. *Excurcionista, is any visitor staying less than 24 hours in the country visited including cruise passenger (not stay in any accommodation).*

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 8.1.

Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Klasifikasi di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Hotel and Other Accomodations by Classification in Sumba Tengah Regency
 2012 - 2017

Tahun Year	Hotel/Hotels					Akomodasi Lainnya Other Accomodation
	Bintang 1 1 Star	Bintang 2 2 Star	Bintang 3 3 Star	Bintang 4 4 Star	Bintang 5 5 Star	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-

Catatan : Kabupaten Sumba Tengah belum memiliki hotel

Tabel / Table 8.2
 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut Bulan di
 Kabupaten Sumba Tengah (hari)
*Average Length of Stay of Foreign and Domestic Visitors by Month in Sumba Tengah
 Regency (day)*
 2 0 1 7

Bulan Month	Tamu Asing Foreign Visitor	Tamu Domestik Domestic Visitor
(1)	(2)	(3)
Januari/January	-	-
Februari/February	-	-
Maret/March	-	-
April/April	-	-
Mei/May	-	-
Juni/June	-	-
Juli/July	-	-
Agustus/August	-	-
September/September	-	-
Oktober/October	-	-
November/November	-	-
Desember/December	-	-
2017	-	-

Catatan : Kabupaten Sumba Tengah belum memiliki hotel

Tabel / Table 8.3.
 Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis
 Hotel dan Bulan di Kabupaten Sumba Tengah
*Room Occupancy Rate of Hotels and Other Accommodations by Type of Accomodation and
 Month in Sumba Tengah Regency*
 2017

Bulan Month	Hotel Berbintang Star Hotel	Hotel Nonbintang Nonstar Hotel
(1)	(2)	(3)
Januari/January	-	-
Februari/February	-	-
Maret/March	-	-
April/April	-	-
Mei/May	-	-
Juni/June	-	-
Juli/July	-	-
Agustus/August	-	-
September/September	-	-
Oktober/October	-	-
November/November	-	-
Desember/December	-	-
Jumlah/Total		

Catatan : Kabupaten Sumba Tengah belum memiliki hotel

Tabel / Table 8.4.
 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Restaurant by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2016 - 2017

Kecamatan Subdistrict		2016	2017
(1)		(2)	(3)
1	Katikutana	10	14
2	Katikutana Selatan	-	-
3	Umbu Ratu Nggay Barat	9	11
4	Umbu Ratu Nggay	2	3
5	Mamboro	3	3
Sumba Tengah		24	31

Keterangan : *) Warung Makan

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumba Tengah
 Source : Cooperative, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of Sumba Tengah Regency

PANJANG JALAN DI SUMBA TENGAH 2017

MENURUT PEMERINTAHAN YANG BERWENANG MENGELOLA (KM)



JALAN NEGARA **54** KM



JALAN PROVINSI **27** KM



JALAN KABUPATEN
754 KM



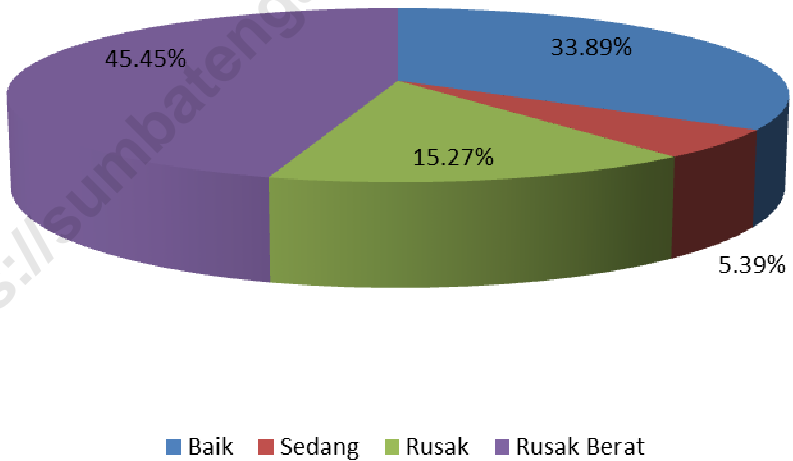
<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS**TECHNICAL NOTES**

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Data transportasi dan komunikasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Panjang jalan b. Angkutan darat c. Pos dan komunikasi 2. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI/Polri dan Korps diplomatik. 3. Kantor pos adalah pemberi pelayanan pengiriman barang, uang, dsb dari suatu tempat ke tempat yang lain. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, tetapi rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil. 4. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, sura dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Data on transportations and communications cover:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Length of road</i> b. <i>Land transportation</i> c. <i>Pos and telecommunication</i> 2. <i>Motor vehicles are any kind of vehicles motorized by machine set up in those vehicle, usually used for transporting people and goods on roads, except vehicle moving along railways. The data cover all kind of vehicles, except those belong to Indonesia Army Force / Indonesia State Police and Diplomatic Corps.</i> 3. <i>Post office is an establishment dealing with the delivery of goods, letters, money, etc from one place to another place. A mailing house has the same function as post office and auxilliary post office, but usually located in a remote areas.</i> 4. <i>Telecommunication includes every transmitting, delivering and or receiving from every information of marking, signal, article, picture, sound and voice throughstrand of wire system, optic, radio or other electromagnetic system.</i> |
|--|--|

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Gambar / Figure 9.1
Panjang Jalan di Sumba Tengah
Menurut Kondisi Jalan tahun
Length of Road by Condition
2017 (Km)



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

9.1

TRANSPORTASI /
TRANSPORTATION

<https://sumbergagalweb.bps.g>

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 9.1.1
 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya
 di Kabupaten Sumba Tengah (km)
*Length of Roads by Subdistrict and Level of Government Authority in Sumba Tengah
 Regency (km)*
 2017

Kecamatan <i>District</i>	Jalan Negara <i>State</i>	Jalan Propinsi <i>Provincial</i>	Jalan Kabupaten <i>Regency</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Katikutana	12,0	-	30	42
02. Katikutana Selatan	-	-	199,5	199,5
03. URG Barat	18,0	-	171	189
04. Umbu Ratu Nggay	24,0	-	245,8	269,8
05. Mamboro	-	27,0	107,7	134,7
Sumba Tengah	54,0	27,0	754	835

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumba Tengah
 Source : *Public Works and Spatial Service of Sumba Tengah Regency*

Tabel / Table 9.1.2

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sumba Tengah (km)

Length of Roads by Subdistrict and Type of Road Surface in Sumba Tengah Regency (km)
2017

Kecamatan <i>District</i>	Aspal Hot Mix <i>Hot Mix Asphalted</i>	Aspal Asphalted	Krikil Gravel	Tanah <i>Land</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Katikutana	12	13	12	5	42
02. Katikutana Selatan	21	68,5	42,5	67,5	199,5
03. URG Barat	43,6	78	25,4	42	189
04. Umbu Ratu Nggay	24	83,8	56	106	269,8
05. Mamboro	35	49	19	31,7	134,7
Sumba Tengah	135,6	292,3	154,9	252,5	835

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumba Tengah

Source : Public Works and Spatial Service of Sumba Tengah Regency

Tabel / Table 9.1.3
 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Sumba Tengah
 (km)
Length of Roads by Subdistrict and Road Condition in Sumba Tengah Regency (km)
 2017

Kecamatan <i>District</i>	Baik <i>Good</i>	Sedang <i>Moderate</i>	Rusak Damaged	Rusak Berat <i>Heavily Damaged</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Katikutana	20	2	6	14	42
02. Katikutana Selatan	58	11	31,5	99	199,5
03. URG Barat	76	6	27	80	189
04. Umbu Ratu Nggay	86	19	36	128,8	269,8
05. Mamboro	43	7	27	57,7	134,7
Sumba Tengah	283	45	127,5	379,5	835

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumba Tengah

Source : *Public Works and Spatial Service of Sumba Tengah Regency*

Tabel / Table 9.1.4

Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis dan Pelat Kendaraan di Kabupaten
Sumba Tengah

*Number of Motor Vehicles by Type and License Plate of Vehicle in Sumba Tengah
Regency
2017*

	Jenis Kendaraan <i>Type of Vehicle</i>	Pelat Kendaraan/ <i>License Plate of Vehicle</i>		
		Tidak Umum <i>Not Public</i>	Umum <i>Public</i>	Dinas <i>Official</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus	132	46	77
2	Bus, Micro Bus	-	4	13
3	Truk, Pick Up	159	23	57
4	Khusus	-	-	-
5	Roda 2,3 & Scooter	2409	658	-
Jumlah/ <i>Total</i>				

Sumber : UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wilayah Kab. Sumba Tengah

Source :

9.2

POS DAN KOMUNIKASI /
POST AND COMMUNICATION

<https://sumber.gajahkab.bps.g>

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 9.2
 Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah
Number of Auxiliary Post Office by Subdistrict in Sumba Tengah Regency
 2014 - 2017

Kecamatan Subdistrict	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Katikutana	1	1	1	1
2 Katikutana Selatan	-	-	-	-
3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-	-
4 Umbu Ratu Nggay	-	-	-	-
5 Mamboro	-	-	-	-
Jumlah/ Total	1	1	1	1

Tabel / Table 9.2.2

Jumlah Satuan Sambungan Telepon menurut Kelompok Pelanggan dan Kecamatan
Number of Telephone Customers by Group and District
 2017

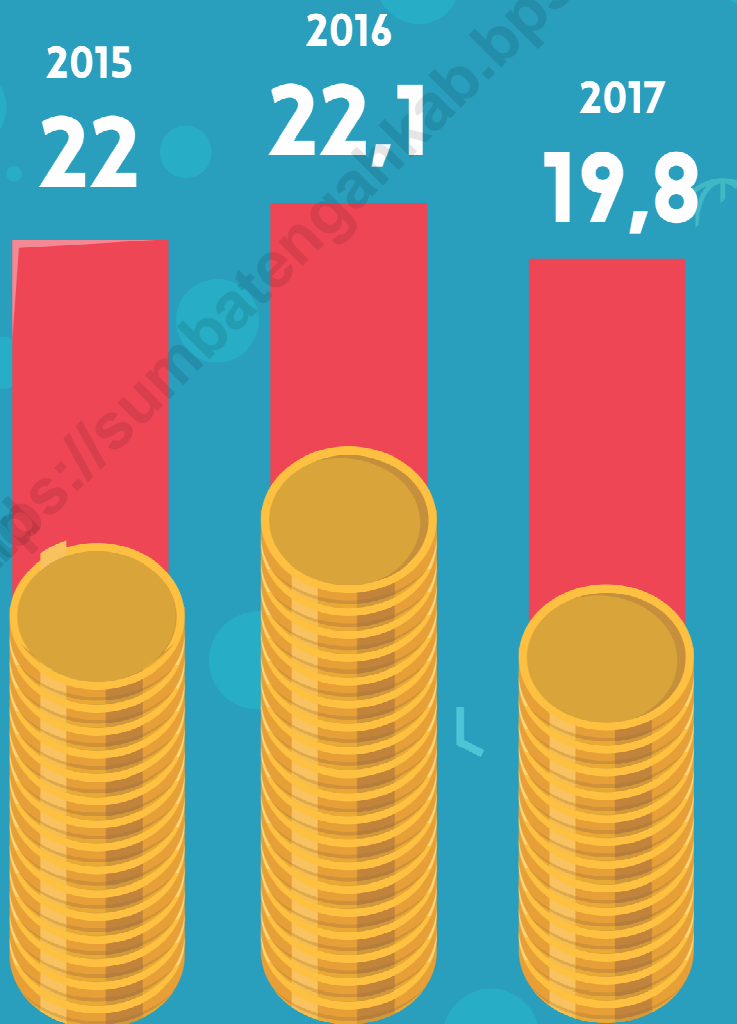
Kecamatan <i>District</i>	Pemerintah <i>Government</i>	Swasta/Bisnis <i>Private/Business</i>	Sosial <i>Social</i>	Rumahtangga <i>Household</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Katikutana	-	-	-	-
02. Katikutana Selatan	-	-	-	-
03. Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-	-
04. Umbu Ratu Nggay	-	-	-	-
05. Mamboro	-	-	-	-
Sumba Tengah	-	-	-	-

Catatan : Data Tidak Tersedia

Sumber : PT. Telkom

Source *Regional Telecommunications Company*

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMBA TENGAH (RP MILYAR)



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

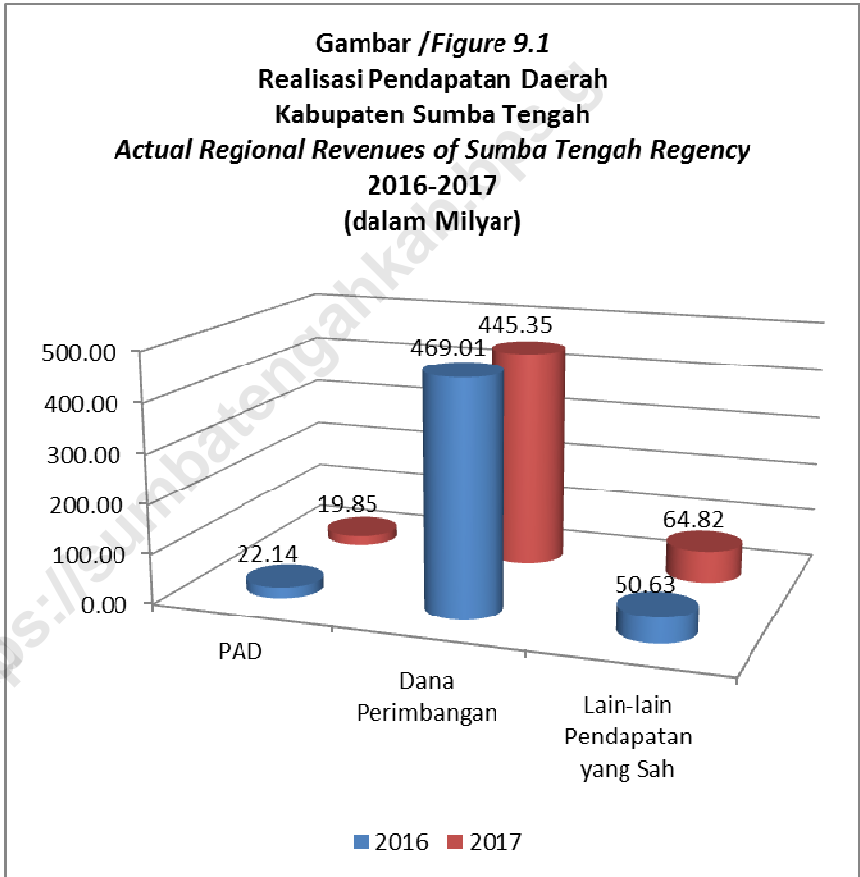
TECHNICAL NOTES

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam perencanaan anggaran dari belanja negara, pemerintah menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakan agar ada keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan prinsip dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah sehingga kemampuan dalam daerah bertambah dan ketergantungan pada bantuan keuangan dari luar daerah semakin berkurang. 2. Data statistik perbankan bersumber dari kantor bank yang ada di Waikabubak. 3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. 4. Data harga yang disajikan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Indeks harga konsumen (IHK) dan laju inflasi b. Rata-rata harga eceran sembilan bahan pokok 5. IHK merupakan indikator inflasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan makanan b. Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau c. Perumahan, air, listrik, gas dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The government policy in terms of public finance was reflected on state Budget, based on dynamic and balance principal. Balance principal means there should be balance between revenue and expense. While dynamic principal means, as number of national budget and saving increase, government ability particularly in terms of finance also increases and the dependency to other sources decreases.</i> 2. <i>Banking statistics are obtained from the bank office in Waikabubak.</i> 3. <i>Cooperatives is an establishment that its members are people or establishments with legal status of cooperative and its activities based on people economic movement.</i> 4. <i>Price statistic cover:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Consumer price index (CPI) and inflation rate</i> b. <i>Retail prices average of nine essential</i> 5. <i>The CPI is a indicator of inflation which covers:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Foodstuff</i> b. <i>Prepared food, beverages and tobacco products</i> c. <i>Housing, water, electricity, gas</i> |
|---|--|

KONSUMSI DAN KEADAAN RUMAHTANGGA
CONSUMPTION AND HOUSEHOLD CONDITION

- | | |
|--|---|
| <p>bahan bakar</p> <p>d. Sandang</p> <p>e. Kesehatan</p> <p>f. Pendidikan, rekreasi dan olah raga</p> <p>g. Transport, komunikasi dan jasa keuangan.</p> | <p><i>and fuel</i></p> <p>d. <i>Clothing</i></p> <p>e. <i>Health</i></p> <p>f. <i>Education, recreation and sports</i></p> <p>g. <i>Transportation, communication, and financial services</i></p> |
|--|---|
-
- | | |
|---|--|
| <p>6. Metode yang digunakan dalam penghitungan IHK adalah formula Laspeyres yang telah dimodifikasi, yaitu:</p> <p>Dimana:</p> <p>I_n : indeks bulanan</p> <p>P_n : harga pada bulan ke n</p> <p>P_{n-1} : harga pada bulan ke n-1</p> <p>P_0 : harga pada tahun dasar</p> <p>Q_0 : kuantitas pada tahun dasar</p> | <p>6. <i>The method used in calculating CPI is the modified Laspeyres formula as follow:</i></p> <p><i>Where</i></p> <p><i>I_n : monthly index</i></p> <p><i>P_n : price in month n</i></p> <p><i>P_{n-1} : price in month n-1</i></p> <p><i>P_0 : price in the base year</i></p> <p><i>Q_0 : quantity in the base year</i></p> |
|---|--|
-
- | | |
|--|---|
| <p>7. Persentase perubahan IHK (laju inflasi) bulanan diperoleh dari</p> <p>Dimana</p> <p>I_n : IHK bulan ke n</p> <p>I_{n-1} : IHK bulan ke n-1</p> <p>Inflasi jika nilainya > 0</p> <p>Deflasi jika nilainya < 0</p> | <p>7. <i>Percentage of the monthly CPI (inflation rate) is obtained from:</i></p> <p><i>Where</i></p> <p><i>I_n : CPI for month n</i></p> <p><i>I_{n-1} : CPI for month n-1</i></p> <p><i>Inflation if the value > 0</i></p> <p><i>Deflation if the value < 0</i></p> |
|--|---|
-
- | | |
|--|--|
| <p>8. Persentase perubahan IHK dalam satu tahun dihitung dengan menggunakan metode point to point.</p> | <p>8. <i>The percentage change of the yearly CPI is calculated by using the point to point method.</i></p> |
|--|--|

Gambar /Figure 9.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumba Tengah
Actual Regional Revenues of Sumba Tengah Regency
2016-2017
(dalam Milyar)



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 10.1
 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Menurut Jenis
 Pendapatan (rupiah)
Actual Revenues of Government of Sumba Tengah Regency by Source of Revenues
(rupiahs)
 2015 - 2017

Jenis Pendapatan Source of Revenues		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Original Local Government Revenue		22 019 333 727,02	22 141 962 606,67	19 853 827 453,15
1.1 Pajak Daerah/Local Taxes	6 140 316 369,00	5 217 934 851,00	4 925 082 760,00	
1.2 Retribusi Daerah/Retributions	831 149 689,05	920 169 249,50	754 000 290,00	
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	3 917 483 491,00	5 949 481 030,00	4 302 800 365,00	
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Original Local Gov. Revenue	11 130 384 177,97	10 054 377 476,17	9 871 944 638,15	
2. Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	409 013 186 050,00	469 107 132 620,00	445 353 516 981,00	
2.1 Bagi Hasil Pajak/ <i>Tax Sharing*</i>	10 000 228 050,00	9 947 308 494,00	6 891 432 321,00	
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/ <i>Non Tax/Natural Resources Sharing</i>	-	-	987 502 462,00	
2.3 Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	316 115 258 000,00	348 202 873 000,00	345 763 373 000,00	
2.4 Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	82 897 700 000,00	110 956 951 126,00	91 710 709 198,00	

Catatan : Data 2.1 dan 2.2 digabung

Note

Lanjutan Tabel / Continued Table 10.1

Jenis Pendapatan Source of Revenues		2015	2016	2017
(1)		(2)	(3)	(4)
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Legal Revenue	45 405 422 823,00	51 630 962 050,00	64 820 940 638
3.1	Pendapatan Hibah/Grants	24 810 887 000,00	42 063 518 000,00	
3.2	Dana Darurat Emergency Funds	-		
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/tax sharing from province and other local governments	7 380 009 823,00	8 099 444 050,00	10 826 761 638,10
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Outonomous Region and Balancing Funds	12 802 026 000,00	-	53 994 179 000,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/financial assistance from province and other local government governments	412 500 000,00	468 000 000,0	-
3.6	Lainnya/Other Funds	-	-	-
Jumlah/Total		476 437 942 600,02	541 880 057 276,67	510 174 457 619,10

Tabel / Table 10.2
 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Menurut Jenis Belanja
 (rupiah)
Actual Expenditures of Government of Sumba Tengah Regency by Kind of Expenditures
 (rupiahs)
 2015 – 2017

Jenis Belanja <i>Kind of Expenditures</i>		2015	2016	2017
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Belanja Tidak Langsung <i>Indirect Expenditure</i>	159 147 071 524,19	239 567 288 898,00	127 931 971 810,00
1.1	Belanja Pegawai/ <i>Personnel expenditure</i>	119 773 649 814,00	157 842 181 814,00	119 731 244 810,00
1.2	Belanja Bunga/ <i>Rebtributions</i>	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	-	-	-
1.4	Belanja Hibah/ <i>Grant</i>	2 390 045 000,00	3 959 475 000,00	7 042 727 000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Expenditure</i>	1 390 000 000,00	780 000 000,00	1 158 000 000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota <i>Sharing Fund Expenditure to Provincial/District/City and Village Government</i>	-	-	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa <i>Financial Assistance Expenditure to Provincial/ District/City and Village Government</i>	34 609 376 710,19	-	-
1.8	Belanja Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	984 000 000,00	-	-

Lanjutan Tabel / Continued Table 10.2

Jenis Belanja <i>Kind of Expenditures</i>		2015	2016	2017
		(1)	(3)	(4)
2.	Belanja Langsung <i>Direct Expenditure</i>	324 673 515 803,00	329 910 129 899,00	443 061 732 191,00
2.1	Belanja Pegawai/ <i>Personnel expenditure</i>	43 891 370 000,00	41 427 421 500,00	120 640 230 810,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	115 554 928 079,00	124 754 143 465,00	179 524 615 644,00
2.3	Belanja Modal <i>Capital expenditure</i>	165 227 217 724,00	163 728 564 934,00	142 896 885 737,00
Jumlah/Total		483 820 587 327,19	569 477 418 797,00	570 993 704 001,00

Tabel / Table 10.3
 Perkembangan Penabung dan Tabungan pada Bank-Bank di Waibakul
Trend of Accounts and Saving Deposits
 2010 - 2017

Tahun Year	Jumlah Penabung Number of Accounts (Orang / Persons)	Posisi Tabungan Outsanding Saving Deposits (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)
2010	4 356	79 587 942
2011	9 054	55 492 300
2012	13 821	59 676 019
2013	25 506	74 117 548
2014	27 495	84 190 363
2015	29 047	59 905 488
2016	33 627	86 045 879
2017	63 065	98 352 898

Sumber : BRI Unit dan Bank NTT Capem Anakalang

Source BRI Branch and NTT Bank Sub Branch of Anakalang

Tabel / Table 10.4
 Perkembangan Kredit Perbankan menurut Jenis Penggunaan
 pada Bank-Bank di Waibakul
Trend of Bank Credits by Type of Utilization
 2010 - 2017

(Rp. 000)

Tahun Year	Investasi Investment	Modal Kerja Capital	Konsumsi Consumption	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	268 656	851 964	87 991 115	89 511 735
2011	15 513 121	2 029 855	56 895 418	74 438 394
2012	296 767	2 820 813	93 501 128	96 618 708
2013	1 082 316	9 319 504	101 741 131	112 142 950
2014	1 069 180	14 734 981	121 304 175	137 108 336
2015	792 339	18 336 197	148 443 362	167 571 898
2016	1 544 436	17 475 969	176 257 148	195 277 552
2017	2 081 659	18 286 819	204 406 293	224 774 771

Sumber : BRI Cabang, Bank NTT Cabang Anakalang
 Source : BRI Branch and NTT Bank Branch of Anakalang

Tabel / Table 10.5
Perkembangan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal
Kerja Permanen (KMKP) pada Bank-Bank di Waibakul
2010 - 2017

Tahun Year	K I K		KMKP		Jumlah Total	
	Nasabah (Orang)	Nominal (Rp.000)	Nasabah (Orang)	Nominal (Rp.000)	Nasabah (Orang)	Nominal (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	3	105 000	2	55 000	5	160 000
2011	4	140 000	5	610 000	9	750 000
2012	3	150 000	3	205 000	6	355 000
2013	11	738 248	35	1 657 752	46	2 396 000
2014	27	1 069 180	355	14 734 981	382	15 804 161
2015	19	792 339	477	18 336 197	496	19 128 536
2016	13	1 544 436	578	17 475 968	591	19 020 404
2017	15	2 081 659	634	18 286 818	649	20 368 477

Sumber : BRI Cabang, Bank NTT Cabang Anakalang
Source BRI Branch and NTT Bank Branch of Anakalang

Tabel / Table 10.6
 Perkembangan Giro Perbankan pada Bank-Bank di Waibakul
Trend of Bank Transfers
 2010 - 2017

(Rp. 000)

Tahun Year	Jumlah Total
(1)	(2)
2010	19 499 520
2011	53 402 808
2012	20 132 297
2013	13 639 118
2014	17 931 332
2015	60 197 110
2016	34 687 884
2017	39 084 518

Sumber : BRI Cabang, Bank NTT Cabang Anakalang
 Source : BRI Branch and NTT Bank Branch of Anakalang

Tabel / Table 10.7
Posisi Pinjaman Perbankan Dirinci menurut Sektor
Outstanding of Bank Loan by Sector
2014 - 2017

(Rp. 000)

Sektor Sector	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Pertanian/ <i>Agriculture</i>	840 666	1 319 466	661 566	483 101
02. Perindustrian/ <i>Industry</i>	599 518	1 208 207	1 271 874	1 140 585
03. Perdagangan/ <i>Trade</i>	5 408 512	7 178 908	10 549 787	13 177 111
04. Perhubungan/ <i>Communication</i>	317 692	166 910	361 348	355 198
05. Jasa Dunia Usaha/ <i>Labour Service</i>	413 228	9 255 045	5 916 929	5 212 482
06. Lain-lain/ <i>Others</i>	129 528 719	148 443 362	124 742 206	141 971 836
Jumlah <i>Total</i>	137 108 336	167 571 898	143 503 710	162 340 313

Sumber : BRI Cabang, Bank NTT Cabang Anakalang

Source BRI Branch and NTT Bank Branch of Anakalang

Tabel / Table 10.8
 Indeks Harga Konsumen Kota Waikabubak
 Consumer Price Index of Kota Waikabubak
 2015

Bulan Month	Umum General	Bahan Makan- an Food	Mkn Jadi, Mnm,Ro- kok & Tembau- kau Meal, Beve- rage, Ciga- rette, & Tobacco	Peru- mahan Housing	San- dang Clothing	Kese- hatan Health	Pen- ddkn, Rek- reasi & Olah- raga Educa- tion, Recrea- tion, & Sport	Transpor & Ko- muni- kasi Trans- portation & Commu- nication
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Januari	101,76	103,63	102,83	100,14	101,06	100,58	101,67	101,99
2. Februari	102,50	104,92	103,43	100,42	101,65	100,90	101,76	102,85
3. Maret	103,02	105,09	104,13	100,65	101,93	101,16	101,78	103,23
4. April	103,76	105,91	104,89	101,63	102,30	101,87	102,15	103,61
5. Mei	104,35	106,94	105,72	101,79	102,60	102,36	102,33	104,05
6. Juni	104,84	107,21	106,30	101,98	103,79	103,13	103,55	104,93
7. Juli	105,96	108,57	107,67	102,61	104,09	103,53	104,52	106,98
8. Agustus	106,40	109,39	108,21	102,68	104,46	104,05	104,87	107,13
9. September	106,86	110,04	108,97	103,02	104,75	104,32	105,13	107,34
10. Oktober	107,27	110,53	109,64	103,03	105,12	104,86	105,30	108,20
11. November	107,72	110,82	109,76	103,62	105,29	105,56	105,64	109,20
12. Desember	109,42	112,07	111,23	106,01	107,49	106,61	106,20	111,45
Rata-rata Th. 2015	105,32	107,93	106,90	102,30	103,71	103,24	103,74	105,91

Catatan : Berdasarkan Survei Harga Konsumen 2015

Note Based on 2015 Consumer Price Survey

Tabel / Table 10.9
Laju Inflasi Kota Waikabubak menurut Kelompok
Inflation Rate of Kota Waikabubak by Group
2013 - 2015

Kelompok <i>Group</i>	(Persentase)		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Bahan Makanan / <i>Food</i>	13,03	7,91	11,48
02. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau / <i>Meal, Beverage, Cigarette, and Tobacco</i>	15,18	8,95	10,72
03. Perumahan / <i>Housing</i>	10,38	6,88	5,87
04. Sandang / <i>Clothing</i>	8,76	6,42	7,26
05. Kesehatan / <i>Health</i>	4,73	5,18	6,42
06. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga / <i>Education, Recreation, and Sport</i>	8,04	3,82	6,05
07. Transpor dan Komunikasi <i>Transportation and Communication</i>	10,98	8,12	10,91
Kumulatif <i>Cummulative</i>	11,41	7,32	9,05

Catatan : Berdasarkan Survei Harga Konsumen 2015

Note Based on 2015 Consumer Price Survey

Tabel / Table 10.10
 Rata-rata Harga Eceran Sembilan Bahan Pokok dan Bahan Strategis Lainnya
 di Pasar Inpres Waikabubak
*Average Retail Price of Nine Essential Commodities and Other Strategies Commodities
 at Pasar Inpres Waikabubak*
 2014 - 2015

(Rupiah per Satuan/unit)

Jenis Komoditi <i>Kind of Commodities</i>	Satuan	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Beras Lokal	Kg	8 000	9 750
2. Telur	Pak	51 000	50 750
3. Minyak Goreng	1000 ml	16 000	18 000
4. Gula Pasir	Kg	13 000	13 167
5. Garam Beryodium	200 Gr	1 000	1 000
6. Minyak Tanah	Liter	5 500	5 500
7. Susu Kental Manis	Kaleng	11 000	12 000
8. Tepung Terigu	Kg	8 667	10 750
9. Semen	Zak	75 000	74 500
10. Sabun Cuci (Daia)	Kg	17 000	18 000

Catatan : Berdasarkan Survei Harga Konsumen 2015

Note Based on 2015 Consumer Price Survey

Tabel / Table 10.11
 Rata-rata Perkembangan Harga Eceran Sembilan Bahan Pokok dan
 Bahan Strategis Lainnya di Pasar Inpres Waikabubak
*Average Trend of Retail Price of Nine Essential Commodities and
 Other Strategies Commodities at Pasar Inpres Waikabubak
 2014 - 2015*

(Rupiah per Satuan/unit)

Jenis Komoditi <i>Kind of Commodities</i>	Satuan <i>Unit</i>	2014	2015	Perubahan <i>Change (%)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Beras Lokal	Kg	8 000	9 750	21,88
2. Telur	Pak	51 000	50 750	(0,49)
3. Minyak Goreng	1000 ml	16 000	18 000	12,50
4. Gula Pasir	Kg	13 000	13 167	1,28
5. Garam Beryodium	200 Gr	1 000	1 000	-
6. Minyak Tanah	Liter	5 500	5 500	-
7. Susu Kental Manis	Kaleng	11 000	12 000	9,09
8. Tepung Terigu	Kg	8 667	10 750	24,03
9. Semen	Zak	75 000	74 500	(0,67)
10. Sabun Cuci (Daia)	Kg	17 000	18 000	5,88

Catatan : Berdasarkan Survei Harga Konsumen 2015

Note Based on 2015 Consumer Price Survey

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN SUMBA TENGAH 2017 (RUPIAH)

MAKANAN
330.788



NON MAKANAN
192.457



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. Data pengeluaran dan konsumsi penduduk menurut kelompok barang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016.
2. Data konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan pada Susenas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan.
3. Konsumsi/pengeluaran makanan dirinci menjadi 215 komoditi, yang masing-masing dikumpulkan data kuantitas dan nilainya.
4. Konsumsi bukan makanan pada umumnya yang dikumpulkan hanya data nilainya, kecuali untuk penggunaan listrik, air, gas, dan bahan bakar minyak (BBM) yang juga dikumpulkan kuantitasnya.

TECHNICAL NOTES

1. *Data on consumer expenditure and consumption by commodity group of expenditure are obtained from the 2016 National Socio-Economic Survey (Susenas).*
2. *The data of consumption/expenditure collected in susenas are divided into two groups, namely food and non-food consumption.*
3. *Consumption/expenditure on food covers 215 commodities, both quantity data and avalues are collected.*
4. *For consumption of non-food, the data collected in general are only their values, except for electricity, water, gass, fuel, which are also collected for their quantity data.*

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 11.1
 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di
 Kabupaten Sumba Tengah
*Percentage of Population by Expenditure Per Capita Per Month Class in Sumba Tengah
 Regency
 2017*

Golongan Pengeluaran <i>Expenditure Class</i> (rupiah)	Persentase Penduduk <i>Percentage of Population</i>
(1)	(2)
< 150 000	0,00
150 000–199 999	3,00
200 000–299 999	22,00
300 000–499 999	41,23
500 000–749 999	19,06
750 000–999 999	8,13
>1 000 000	6,58
Jumlah/ <i>Total</i>	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017
 Source: *National Socio Economic Survey 2017*

Tabel / Table 11.2

Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Sumba Tengah
*Average Expenditure and Percentage of Average Expenditure Per Capita Per Month by
Food Group in Sumba Tengah Regency
2017*

Kelompok Makanan <i>Food Group</i>	Rata-rata Pengeluaran <i>Average Expenditure</i> (rupiah)	Persentase Rata-rata Pengeluaran <i>Percentage of</i> <i>Average Expenditure</i>
(1)	(2)	(3)
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	107 845	32,60
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	3 673	1,11
Ikan/Udang/Cumi/Kerang <i>Fish/Prawn/Squid/Clam</i>	23 432	7,08
Daging/ <i>Meat</i>	28 801	8,71
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	8 539	2,58
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	34 047	10,29
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	2 755	0,83
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	6 355	1,92
Minyak dan Kelapa/ <i>Oil and Coconut</i>	5 421	1,64
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	15 485	4,68
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	3 769	1,14
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	2 924	0,88
Makanan dan minuman jadi <i>Prepared food and beverages</i>	52 479	15,87
Rokok/ <i>Cigarette</i>	35 263	10,67
Jumlah/Total	330 788	100

Tabel / Table 11.3
 Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
 Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Sumba Tengah
*Average Expenditure and Percentage of Average Expenditure Per Capita Per Month by
 Non-Food Group in Sumba Tengah Regency*
 2017

Kelompok Bukan Makanan Non-Food Group	Rata-rata Pengeluaran Average Expenditure (rupiah)	Persentase Rata-rata Pengeluaran Percentage of Average Expenditure
(1)	(2)	(3)
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facility</i>	70 553	36,66
Aneka barang dan jasa/ <i>Goods and services</i>	52 797	27,43
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	9 794	5,09
Barang yang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	18 743	9,74
Pajak, pungutan, dan asuransi <i>Taxes and insurances</i>	17 051	8,86
Keperluan pesta dan upacara <i>Parties and ceremonies</i>	23 520	12,22
Jumlah/Total	192 457	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017
 Source: National Socio Economic Survey 2017

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PERTUMBUHAN EKONOMI SUMBA TENGAH 2017 (%)

4,92



<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS**TECHNICAL NOTES**

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu sektoral dan penggunaan. PDRB sektoral merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktifitas produksinya. Sementara PDRB penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
 2. Penyajian PDRB sektoral dirinci menurut sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan dan jasa-jasa.
 3. PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 versi, yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan.
 4. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya) dibagi nilai pada tahun n-1, dikali 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan
1. *The Gross Domestic Regional Product (GDRP) was the basic measure of output arising from economic activity at a certain period. To compile the statistics, 2 approaches has been used, i.e productin approach and expenditure approach. The first approach is to measure value added, produced by various kinds of economic activities, while the second approach is to measure final uses of the country's output. In the other words, GDRB is the sum of total value added produced by all economic sectors and the way of using it.*
 2. *GDRP by sector is classified by types of economic activities such as agriculture; mining and quarrying; manufacturing; electricity; gas and water supply; construction; wholesale and retail trade, restaurants and hotels; transport and communication; finance, insurance, real estate and business service, and other services.*
 3. *GDRP and its aggregations are presented in two forms; at current market prices and at constant base year market prices.*
 4. *Growth rate of GDRP is derivated from GDRP at constant market prices. It is obtained by subtracting the value of GRDP year n-1 then multiplied by 100 percent. The growth rate of GDRP explains the income growth during the given*

perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

5. Produk Regional Bruto (PRB) adalah PDRB ditambah dengan pendapatan faktor neto dari luar negeri. Pendapatan faktor neto merupakan pendapatan faktor produksi yang diterima dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan dari/ke luar negeri oleh residen dan non residen. Pendapatan faktor produksi meliputi upah dan gaji, deviden, bunga modal, royalty, maupun pendapatan atas faktor kepemilikan lainnya.
6. Produk regional neto adalah PDRB dikurangi dengan penyusutan atas ausnya barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun. Disebut juga sebagai produk regional neto atas dasar harga pasar.
7. Produk regional neto atas dasar biaya faktor adalah produk regional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Dengan istilah lain disebut sebagai pendapatan regional, yang menggambarkan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk.
8. Pendapatan regional per kapita adalah pendapatan regional atau pendapatan regional neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

period.

5. *Gross Regional Product is gross domestic regional product plus net factor income from abroad. Net factor income is received minus paid incomes due the ownership of production factor from or to non resident. The income could be in the form of compensation of employees, dividend, capital interest, royalties and income from other properties factors.*
6. *Net regional product is gross regional product minus the depreciation of fixed capital goods utilitted in the process of production in one year. It is also called net regional product at market prices.*
7. *Net regional product at factor costs equals to net regional product at market prices minus net indirect taxes (indirect taxes minus subsidies). It is also known as regional income that describes income actually received by resident.*
8. *Per capital regional income is regional income or net regional product at factor costs divided by midyear population.*

Tabel / Table 12.1
 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah Atas Dasar Harga Berlaku
 menurut Lapangan Usaha
*Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency at Current Market Prices
 by Industrial Origin*
 2 0 1 5 – 2 0 1 7

(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	340 006,89	368 497,61	397 222,18
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	30 485,45	34 068,66	36 423,61
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4 619,89	5 112,99	5 731,00
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	28,20	33,63	38,04
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	66,62	72,30	78,07
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	27 140,80	31 371,45	35 339,85
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	35 646,49	39 729,25	43 680,96
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4 132,32	4 525,72	4 894,98

Lanjutan Tabel / Continued Table 12.1

(Juta Rupiah)			
Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	921,06	999,35	1 091,46
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	56 250,54	60 122,33	62 295,88
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	10 512,76	11 729,11	13 149,84
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	23 696,77	26 886,22	29 113,61
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	108,42	122,45	134,91
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	213 811,66	242 667,73	270 429,34
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	75 939,95	85 074,55	95 502,82
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	3 040,83	3 421,84	3 703,31
R,S,T,U Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2 512,77	2 721,41	2 954,85
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	828 921,42	917 156,60	1 001 784,70

* Angka sementara/*Preliminary Figures*** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Tabel / Table 12.2
 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah Atas Dasar
 Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
 Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency at Constant 2010
 Market Prices by Industrial Origin
 2 0 1 5 – 2 0 1 7

(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	247 252,55	254 277,91	265 894,17
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	22 521,87	24 169,23	25 755,84
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3 472,20	3 621,11	3 848,96
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	23,66	26,54	27,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	53,05	55,59	58,54
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	20 316,93	22 089,90	23 950,66
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	27 903,91	29 538,75	31 068,59
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	3 276,42	3 414,81	3 579,67

Lanjutan Tabel / Continued Table 12.2

(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	704,78	729,38	773,12
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	47 963,32	50 862,85	52 603,81
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	8 314,93	8 978,03	9 727,97
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	17 106,73	18 150,86	18 987,64
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	84,95	90,53	93,95
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	164 388,66	174 331,61	182 725,09
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	51 225,32	53 891,54	56 846,88
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2 451,29	2 615,90	2 733,40
R,S,T,U Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1 809,50	1 878,25	1 976,57
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	618 870,07	648 722,78	680 651,93

* Angka sementara/*Preliminary Figures*** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Tabel / Table 12.3
 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah
 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
*Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah
 Regency at Current Market Prices by Industrial Origin*
 2 0 1 5 – 2 0 1 7

(Persentase/ Percentage)

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	41,02	40,18	39,65
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,68	3,71	3,64
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,56	0,56	0,57
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,00	0,00	0,00
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,01	0,01	0,01
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	3,27	3,42	3,53
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,30	4,33	4,36
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,50	0,49	0,49

Lanjutan Tabel / Continued Table 12.3

<i>(Persentase / Percentage)</i>			
Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0.11	0.11	0.11
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6.79	6.56	6.22
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1.27	1.28	1.31
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2.86	2.93	2.91
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0.01	0.01	0.01
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	25.79	26.46	26.99
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	9.16	9.28	9.53
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0.37	0.37	0.37
R,S,T,U Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0.30	0.30	0.29
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/*Preliminary Figures*** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Tabel / Table 12.4
 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah
 Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
*Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah
 Regency at Constant 2010 Market Prices by Industrial Origin*
 2015 - 2017

(Persentase/ Percentage)			
Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	39,95	39,20	39,06
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,64	3,73	3,78
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,56	0,56	0,57
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,00	0,00	0,00
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,01	0,01	0,01
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	3,28	3,41	3,52
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,51	4,55	4,56
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,53	0,53	0,53

Lanjutan Tabel / Continued Table 12.4

<i>(Persentase / Percentage)</i>			
Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,11	0,11	0,11
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,75	7,84	7,73
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,34	1,38	1,43
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,76	2,80	2,79
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,01	0,01	0,01
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	26,56	26,87	26,85
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	8,28	8,31	8,35
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,40	0,40	0,40
R,S,T,U Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,29	0,29	0,29
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00

Tabel / Table 12.5
 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah
 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
*Chain Index of Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency
 at Current Market Prices by Industrial Origin*
 2015 - 2017

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	9,68	8,38	7,80
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	13,20	11,75	6,91
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	12,18	10,67	12,09
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	27,23	19,26	13,12
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	5,64	8,52	7,99
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	12,49	15,59	12,65
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	10,12	11,45	9,95
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	11,17	9,52	8,16

Catatan : Data pertumbuhan ekonomi ada di Tabel 12.6

Lanjutan Tabel / Continued Table 12.5

Lapangan Usaha/Industry		2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	10.25	8.50	9.22
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6.91	6.88	3.62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	8.02	11.57	12.11
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	13.83	13.46	8.28
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	13.23	12.93	10.18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	11.11	13.50	11.44
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	12.49	12.03	12.26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	12.42	12.53	8.23
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	10.95	8.30	8.58
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		10,47	10,64	9,23

Tabel / Table 12.6
 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah
 Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
*Chain Index of Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency
 at Constant 2010 Market Prices by Industrial Origin*
 2015 - 2017

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	3,00	2,84	4,57
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	7,13	7,31	6,56
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,52	4,29	6,29
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	15,27	12,16	1,93
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	2,93	4,78	5,32
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,92	8,73	8,42
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3,71	5,86	5,18
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,87	4,22	4,83

Catatan : Data pertumbuhan ekonomi ada di Tabel 12.6

Lanjutan Tabel / Continued Table 12.6

Lapangan Usaha/Industry		2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2,70	3,49	6,00
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,14	6,05	3,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,88	7,97	8,35
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,30	6,10	4,61
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,38	6,57	3,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	6,61	6,05	4,81
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,96	5,20	5,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,01	6,72	4,49
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	5,38	3,80	5,23
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		4,79	4,82	4,92

Tabel / Table 12.7
 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Tengah
 menurut Lapangan Usaha (2010=100)
*Implicit Price Index of Gross Regional Domestic Product of Sumba Tengah Regency
 by Industrial Origin (2010=100)*
 2015 - 2017

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	137,51	144,92	149,39
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	135,36	140,96	141,42
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	133,05	141,20	148,90
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	119,17	126,70	140,61
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	125,58	130,06	133,36
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	133,59	142,02	147,55
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	127,75	134,50	140,60
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	126,12	132,53	136,74

Lanjutan Tabel / Continued Table 12.7

Lapangan Usaha/Industry		2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	130,69	137,01	141,18
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	117,28	118,20	118,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	126,43	130,64	135,18
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	138,52	148,13	153,33
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	127,64	135,26	143,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	130,06	139,20	148,00
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	148,25	157,86	168,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	124,05	130,81	135,48
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	138,87	144,89	149,49
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		133,94	141,38	147,18

Tabel / Table 12.8
 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
 Kabupaten Sumba Tengah Menurut Lapangan Usaha (persen)
*Growth Rate of Implicit Price Indices Of Gross Regional Domestic
 of Sumba Tengah Regency by Industry (percent)*
 2015 - 2017

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	6,49	5,39	3,09
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	5,67	4,14	0,33
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7,32	6,12	5,45
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	10,38	6,32	10,98
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	2,64	3,57	2,54
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,20	6,31	3,90
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,18	5,29	4,53
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,00	5,08	3,18

Lanjutan Tabel / Continued Table 12.8

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	7.35	4.84	3.04
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	-0.21	0.79	0.19
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4.99	3.33	3.47
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	8.10	6.93	3.51
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6.44	5.97	6.16
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4.23	7.02	6.32
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7.18	6.49	6.42
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6.04	5.45	3.57
R,S,T,U Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	5.28	4.34	3.18
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	5,42	5,55	4,10

PERBANDINGAN REGIONAL

BERDASARKAN DATA DARI BADAN PUSAT STATISTIK
SELURUH KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR

PERTUMBUHAN EKONOMI 2017 (%)



SUMBA BARAT DAYA



SUMBA TIMUR



SUMBA TENGAH

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2017

KOTA KUPANG

78,25

SUMBA TIMUR

64,19

SUMBA BARAT

62,30

SUMBA BARAT DAYA

61,46

SUMBA TENGAH

59,39

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri atas 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Perhitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
2. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya) dibagi nilai pada tahun n-1, dikali 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

TECHNICAL NOTES

1. *To measure poverty, BPS has used the concept of basic needs approach. Therefore, poverty is viewed as economic inability to fulfill food and non-food basic needs which are measured by consumption/expenditure. The method used is calculating poverty line, which consist of two components that are food poverty line (FPL) and non food poverty line (NFPL). The poverty line was calculated separately for urban and rural areas.*
2. *Growth rate of GDRP is derivated from GDRP at constant market prices. It is obtained by subtracting the value of GRDP year n-1 then multiplied by 100 percent. The growth rate of GDRP explains the income growth during the given period.*

<https://sumbatengahkab.bps.go.id>

Tabel / Table 13.1
 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Population by Regency/City in NTT Province
 2013-2017

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumba Barat	117 787	119 907	121 921	123 413	125 776
Sumba Timur	240 190	243 009	246 294	248 777	252 704
Kupang	328 688	338 415	348 010	352 413	372 777
Timor Tengah Selatan	451 922	456 152	459 310	463 211	463 980
Timor Tengah Utara	239 503	242 082	244 714	246 591	249,711
Belu	199 990	203 284	206 778	209 421	213 596
Alor	196 613	198 200	199 915	201 116	202 890
Lembata	126 704	129 482	132 171	133 969	137 714
Flores Timur	241 590	244 485	246 994	248 842	251 611
Sikka	309 008	311 411	313 509	314 988	317 292
Ende	266 909	268 314	269 724	270 598	272 084
Ngada	150 186	152 519	154 693	155 750	159 081
Manggarai	309 614	314 491	319 607	322 911	329 198
Rote Ndao	137 182	142 106	147 778	152 268	159 614
Manggarai Barat	240 905	245 817	251 689	256 099	263 207
Sumba Tengah	66 314	67 393	68 515	69 333	70 719
Sumba Barat Daya	306 195	312 510	319 119	324 045	331 894
Nagekeo	136 201	137 919	139 577	140 877	142 804
Manggarai Timur	264 979	268 418	272 514	275 591	280 118
Sabu Raijua	80 897	83 501	85 970	88 104	91 512
Malaka	174 391	177 398	180 382	186 933	186 312
Kota Kupang	368 199	380 084	390 877	397 287	412 708
NTT	4 953 967	5 036 897	5 120 061	5 182 537	5 287 302

Sumber : Proyeksi Penduduk 2017

Source Population Projection 2017

Tabel / Table 13.2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

*Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by
Regency/City in NTT Province
2013-2017*

Kabupaten/Kota Regency/City	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumba Barat	5,16	4,76	4,80	5,00	5,03
Sumba Timur	5,07	4,99	5,03	5,06	5,14
Kupang	5,07	5,10	5,05	4,83	5,13
Timor Tengah Selatan	4,25	4,36	4,39	4,79	5,35
Timor Tengah Utara	4,40	4,58	4,70	4,84	5,09
Belu	6,04	5,57	5,34	5,76	5,81
Alor	4,24	4,80	4,86	4,58	4,88
Lembata	4,96	5,09	4,98	4,75	5,04
Flores Timur	4,82	4,84	4,61	4,77	5,16
Sikka	4,20	4,56	4,40	4,93	5,22
Ende	5,33	5,01	5,07	5,08	5,04
Ngada	5,09	4,83	4,69	5,18	4,94
Manggarai	5,43	5,11	5,00	5,09	5,12
Rote Ndao	4,25	4,85	5,06	5,13	5,48
Manggarai Barat	4,49	4,08	4,45	4,76	5,11
Sumba Tengah	4,39	4,22	4,79	4,82	4,92
Sumba Barat Daya	5,54	4,02	4,63	5,02	5,52
Nagekeo	4,54	4,59	4,61	4,55	4,96
Manggarai Timur	5,34	5,27	5,10	5,16	5,14
Sabu Raijua	5,04	5,14	5,04	5,07	5,11
Malaka	5,65	5,08	4,90	5,02	5,11
Kota Kupang	7,20	6,81	6,63	6,74	6,83
NTT	5,41	5,05	4,92	5,17	5,16

Sumber : PDRB NTT 2017

Source NTT GRDP 2017

Tabel / Table 13.3
 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (ribu)
Number of Poor People by Regency/City in NTT Province (thousand)
 2013-2017

Kabupaten/Kota Regency/City	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumba Barat	34,2	33,47	37,35	36,21	36,69
Sumba Timur	68,8	67,40	77,95	78,19	78,18
Kupang	101,5	64,96	80,98	82,57	84,34
Timor Tengah Selatan	126,0	122,49	144,01	138,43	135,22
Timor Tengah Utara	51,8	50,72	61,96	59,34	58,58
Belu	29,3	54,46	34,75	33,13	33,95
Alor	39,6	38,72	45,83	44,95	43,89
Lembata	29,6	29,07	35,93	35,18	36,26
Flores Timur	19,6	19,21	24,02	25,65	26,97
Sikka	39,2	38,28	44,64	45,14	45,00
Ende	56,2	54,74	63,23	64,65	65,10
Ngada	16,9	16,47	19,85	19,76	20,21
Manggarai	65,2	63,86	74,01	72,65	71,84
Rote Ndao	39,1	38,55	45,01	45,06	45,57
Manggarai Barat	44,1	42,55	50,98	49,55	49,37
Sumba Tengah	21,3	21,26	24,69	25,34	25,37
Sumba Barat Daya	82,7	81,01	96,54	99,26	99,54
Nagekeo	16,5	16,64	20,00	19,18	19,20
Manggarai Timur	66,1	64,72	77,67	76,37	74,85
Sabu Raijua	25,3	24,80	28,43	28,58	28,22
Malaka*)	-	-	32,28	31,14	30,90
Kota Kupang	33,8	33,30	39,73	39,59	41,48
NTT	1,006,9	991,88	1 159,84	1 149,92	1 150,79

Catatan : *) Data masih tergabung dengan kabupaten induk,

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Source

Tabel / Table 13,4
Komponen dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota di NTT
Component and Grade HDI by Regency/Municipality in NTT
2017

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Komponen				IPM <i>HDI</i>	Peringkat <i>Grade</i>
	Angka Harapan Hidup <i>Life Expectancy at Birth (tahun/year)</i>	Harapan Lama Sekolah <i>Expected Years Schooling (tahun/year)</i>	Rata-Rata Lama Sekolah <i>Mean Years Schooling (tahun/year)</i>	Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan <i>Per Capita Expenditure (ribu rp/ thousand rp)</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumba Barat	66,20	12,87	6,51	6 997	62,30	10
Sumba Timur	64,12	12,79	6,73	9 093	64,19	5
Kupang	63,49	13,49	7,10	7 301	62,79	9
T T S	65,65	12,54	6,39	6 676	61,08	16
T T U	66,19	13,28	7,14	6 164	62,03	12
Belu	63,42	12,24	7,07	7 251	61,44	15
Alor	60,47	12,08	7,77	6 553	59,61	18
Lembata	66,19	12,25	7,58	7 084	63,09	6
Flores Timur	64,45	12,88	7,12	7 442	62,89	8
Sikka	66,30	12,34	6,56	7 855	63,08	7
Ende	64,48	13,75	7,63	8 841	66,11	3
Ngada	67,36	12,67	7,85	8 649	66,47	2
Manggarai	65,84	12,32	6,98	7 056	62,24	11
Rote Ndao	63,41	12,91	6,98	6 320	60,51	17
Manggarai Barat	66,19	11,09	7,14	7 269	61,65	13
Sumba Tengah	67,74	12,31	5,51	5 946	59,39	19
S B D	67,76	13,03	6,31	6 134	61,46	14
Nagekeo	66,36	12,45	7,52	8 119	64,74	4
Manggrai Timur	67,40	11,04	6,45	5 643	58,51	21
Sabu Raijua	59,00	13,11	6,02	5 120	55,22	22
Malaka	64,29	12,75	6,32	5 726	58,90	20
Kota Kupang	68,58	15,77	11,45	13 028	78,25	1
NTT	66,07	13,07	7,15	7 350	63,73	33^{*)}

Catatan/Note : *) Peringkat nasional

Sumber : IPM NTT 2017

Source

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
Enlighten The Nation



BPS KABUPATEN SUMBA BARAT

Jl. Wee Karou, Waikabubak 87211

Telp. (0387) 21256 Fax. (0387) 21256

Homepage: <http://sumbabaratkeb.bps.go.id>

Email: bps5301@bps.go.id

ISSN 2355-4846



9 772355 488000 >